

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



**OPTIMALISASI DIPLOMASI INDONESIA DALAM INTERNASIONALISASI
ISU PAPUA GUNA MENJAGA STABILITAS NASIONAL**

OLEH:

SUSANTO DWI ASMARA, S.H.

KOLONEL KAV NRP. 11930086020171

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LXVI
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb., salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis, sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVI, telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, berupa Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul, **“Optimalisasi Diplomasi Indonesia dalam Internasionalisasi Isu Papua guna Menjaga Stabilitas Nasional”**.

Penetapan Tutor dan Judul Taskap ini didasarkan pada Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2024 tanggal 28 Maret 2024 tentang Penetapan Judul Taskap Peserta PPRA LXVI Tahun 2024, yang menentukan bahwa penulis harus menulis Taskap sesuai judul yang telah ditetapkan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Plt. Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXVI di Lemhannas RI tahun 2024. Ucapan terima kasih yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami, Bapak Laksda TNI (Purn) Robert Mangindaan, Tim Penguji Taskap, serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing penyelesaian Taskap ini sesuai dengan waktu dan ketentuan yang ditetapkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mohon masukan guna penyempurnaan naskah ini. Besar harapan kami agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan banggakan.

Sekian dan terima kasih. *Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Jakarta, 20 Agustus 2024
Penulis,



Susanto Dwi Asmara, S.H.
Kolonel Kav NRP. 11930086020171



PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Susanto Dwi Asmara, S.H.

Pangkat : Kolonel Kav NRP. 11930086020171

Jabatan : Pamen Denma Mabasad

Instansi : Mabes TNI AD

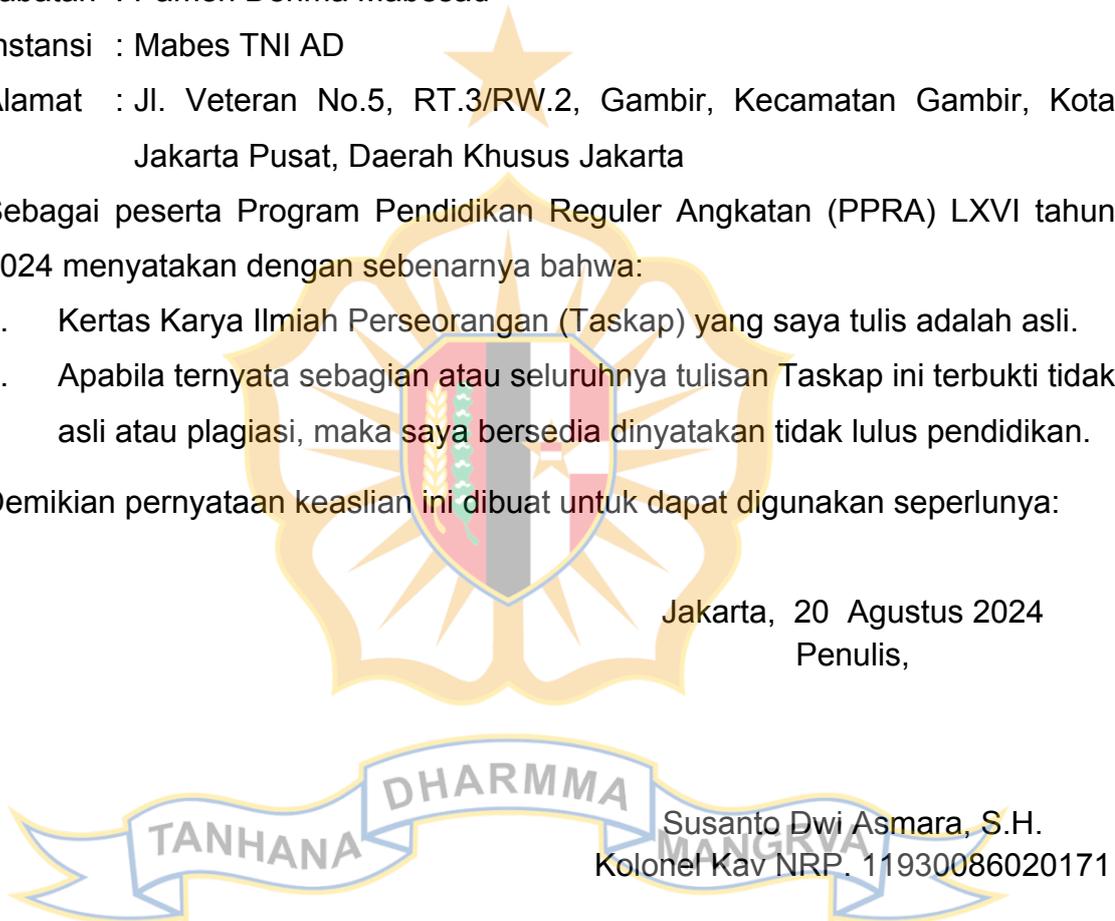
Alamat : Jl. Veteran No.5, RT.3/RW.2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota
Jakarta Pusat, Daerah Khusus Jakarta

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVI tahun
2024 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya:

Jakarta, 20 Agustus 2024
Penulis,


Susanto Dwi Asmara, S.H.
Kolonel Kav NRP. 11930086020171

DAFTAR ISI

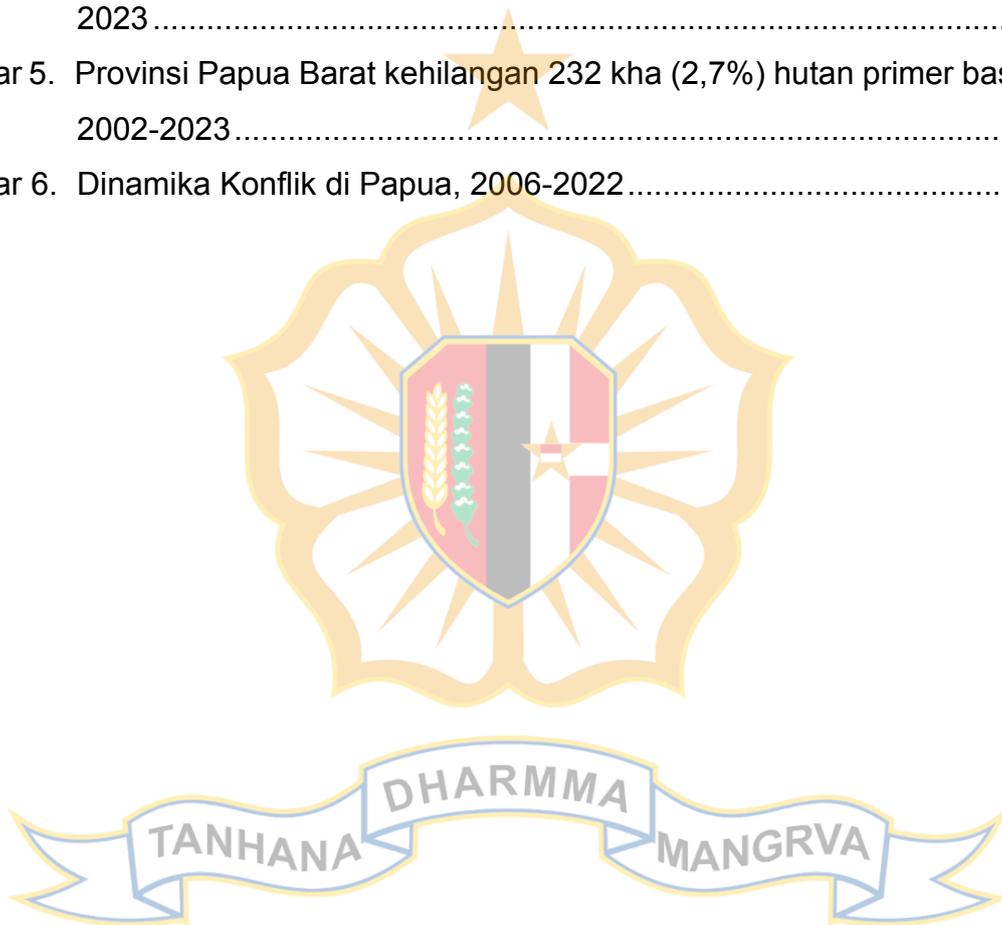
KATA PENGANTAR.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	4
3. Maksud dan Tujuan.....	5
4. Ruang Lingkup dan Sistematika.....	5
5. Metode dan Pendekatan.....	7
6. Pengertian.....	7
BAB II LANDASAN PEMIKIRAN.....	10
7. Umum.....	10
8. Peraturan Perundang-undangan.....	10
9. Data dan Fakta.....	12
10. Kerangka Teoritis.....	27
11. Lingkungan Strategis.....	36
BAB III PEMBAHASAN.....	43
12. Umum.....	43
13. Kondisi diplomasi Indonesia dalam Mengatasi Internasionalisasi isu Papua Saat Ini.....	44
14. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Diplomasi Indonesia dalam Internasionalisasi Isu Papua guna Menjaga Stabilitas Nasional..	55
15. Langkah Strategis Optimalisasi Diplomasi Indonesia dalam Internasionalisasi Isu Papua guna Menjaga Stabilitas Nasional..	68
BAB IV PENUTUP.....	81
16. Simpulan.....	81
17. Rekomendasi.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	89

ALUR PIKIR.....100
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....101



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Delegasi Penandatanganan Perjanjian New York, 15 Agustus 1962..	15
Gambar 2. Hubungan Indeks Kutukan Sumber Daya Alam dengan Indeks Pembangunan Berkelanjutan Antar Daerah.....	16
Gambar 3. Perbandingan Citra Satelit Deforestasi Tanah Papua 2019 dan 2023	17
Gambar 4. Provinsi Papua kehilangan 480 kha (2,0%) hutan primer basah, 2002-2023	18
Gambar 5. Provinsi Papua Barat kehilangan 232 kha (2,7%) hutan primer basah, 2002-2023.....	19
Gambar 6. Dinamika Konflik di Papua, 2006-2022	24



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Papua memiliki sejarah yang unik dan kompleks dalam proses integrasinya ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sejak Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) atau *Act of Free Choice* pada tahun 1969, Papua secara resmi bergabung dengan Indonesia dan diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Resolusi Nomor 2504. Namun, hasil Pepera tersebut menimbulkan ketidakpuasan di kalangan sebagian masyarakat Papua, yang merasa bahwa proses tersebut tidak sepenuhnya demokratis dan melanggar hak-hak mereka. Ketidakpuasan ini menjadi akar dari gerakan separatisme yang kemudian dikenal sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang hingga saat ini masih aktif berjuang untuk memisahkan diri dari Indonesia (Firdausi, 2019; Sucahyo, 2022). Masalah Papua yang awalnya bersifat domestik telah berkembang menjadi isu internasional yang kompleks, dengan dampak yang signifikan terhadap stabilitas nasional Indonesia.

Internasionalisasi isu Papua didorong oleh dukungan dari beberapa negara Pasifik Selatan, terutama Vanuatu, yang secara konsisten menyuarakan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua pada forum-forum internasional seperti Majelis Umum PBB. Vanuatu bersama dengan negara-negara yang tergabung dalam *Melanesian Spearhead Group* (MSG) mendukung *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP), sebuah organisasi yang menyatukan faksi-faksi separatist Papua untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua melalui jalur diplomatik internasional. ULMWP, dengan dukungan negara-negara ini, berhasil memasukkan isu Papua ke dalam agenda internasional, yang memperparah tantangan diplomasi Indonesia dalam menjaga stabilitas nasional (Sabir, 2018; Ramdhan, 2021; Rahim & Timur, 2021).

Diplomasi Indonesia di kawasan Pasifik Selatan menghadapi tantangan besar, terutama karena kuatnya ikatan etnis dan budaya Melanesia antara Papua dan negara-negara di kawasan tersebut. Dukungan Vanuatu terhadap gerakan separatist Papua, misalnya, didorong oleh *Melanesian Renaissance*, sebuah gerakan yang mengedepankan solidaritas etnis Melanesia dan menuntut

dekolonisasi bagi bangsa Melanesia yang masih berada di bawah kekuasaan negara lain. Dalam konteks ini, Vanuatu telah menjadi salah satu negara yang paling vokal dalam mendukung kemerdekaan Papua, baik melalui kampanye politik di MSG maupun dalam berbagai forum internasional lainnya (Sabir, 2018; Hematang et al., 2019). Pengaruh kuat dari negara-negara ini terhadap proses internasionalisasi isu Papua menunjukkan bahwa tantangan diplomasi Indonesia tidak dapat diremehkan, terutama dalam konteks menjaga keutuhan dan stabilitas nasional.

Diplomasi Indonesia tidak hanya berhenti pada upaya meredam dukungan internasional terhadap separatisme Papua. Indonesia juga melakukan berbagai langkah diplomatik, termasuk mengajukan diri sebagai anggota observer di MSG dan meningkatkan kerja sama dengan negara-negara Pasifik Selatan lainnya seperti Fiji dan Papua Nugini yang mendukung kedaulatan Indonesia atas Papua. Upaya ini merupakan bagian dari strategi Indonesia untuk meredam penyebaran internasionalisasi isu Papua dan menjaga stabilitas kawasan serta integritas wilayah Indonesia (Hematang et al., 2019; Ramdhan, 2021). Peran Indonesia dalam MSG, misalnya, telah memberikan pengaruh yang signifikan dalam upaya mencegah isu Papua menjadi agenda utama dalam organisasi tersebut (Sabir, 2018; Rahim & Timur, 2021).

Di sisi lain, masalah Papua juga melibatkan isu sosial dan ekonomi yang kompleks. Meskipun Papua kaya akan sumber daya alam, seperti emas, tembaga, dan kayu, manfaat ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat Papua sangat minim. Ketimpangan ekonomi antara Papua dan wilayah lain di Indonesia terus terjadi, dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan akses terhadap pendidikan serta layanan kesehatan yang terbatas. Hal ini diperparah oleh kebijakan otonomi khusus yang belum sepenuhnya berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Sebaliknya, kebijakan ini justru sering menjadi sumber ketidakpuasan yang memicu keinginan sebagian masyarakat Papua untuk merdeka (Hutabarat, 2022; Hematang et al., 2019).

Pendekatan militeristik yang sering diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi gerakan separatis juga menambah kompleksitas masalah. Meskipun bertujuan untuk menjaga keamanan, pendekatan ini sering kali menimbulkan pelanggaran HAM yang memperburuk citra Indonesia di mata

internasional. Tindakan represif terhadap masyarakat Papua telah memicu reaksi balik yang semakin memperkuat narasi separatisme dan menarik perhatian internasional terhadap apa yang dianggap sebagai upaya kolonisasi oleh Indonesia (Ramdhan, 2021; Perkasa, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih holistik dan inklusif diperlukan untuk mengatasi masalah Papua, baik dari sisi diplomasi internasional maupun kebijakan domestik.

Isu hak asasi manusia di Papua telah menjadi sorotan utama di panggung internasional. Berbagai laporan internasional mengemukakan adanya dugaan pelanggaran HAM, termasuk kekerasan terhadap warga sipil, diskriminasi, dan pembatasan kebebasan berekspresi. Isu-isu ini telah dimanfaatkan oleh kelompok separatis dan negara-negara pendukung mereka untuk mendiskreditkan Indonesia di forum internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, kampanye internasional oleh kelompok pro-kemerdekaan Papua semakin gencar dilakukan, dengan dukungan yang semakin kuat dari organisasi internasional dan negara-negara tertentu (Hergianasari et al., 2022; Rahim & Timur, 2021).

Dalam menghadapi tantangan ini, diplomasi Indonesia perlu lebih fokus pada aspek komunikasi internasional. Komunikasi yang efektif menjadi kunci dalam membangun narasi yang positif mengenai Papua di mata dunia internasional. Indonesia perlu menunjukkan komitmen nyata dalam menghormati hak asasi manusia di Papua, sambil terus memperjuangkan kedaulatan nasional. Melalui diplomasi publik yang proaktif, Indonesia dapat mengklarifikasi tuduhan-tuduhan yang dilontarkan sambil menunjukkan pembangunan yang telah dilakukan di Papua (Sabir, 2018; Febriyanti & Roring, 2022; Afriandi, 2015).

Diplomasi publik Indonesia terhadap Vanuatu, misalnya, menjadi salah satu contoh penting dalam upaya membendung internasionalisasi isu Papua. Meskipun upaya diplomasi ini belum sepenuhnya berhasil, terutama karena kuatnya pengaruh doktrin *Melanesian Renaissance* di Vanuatu, Indonesia masih memiliki peluang untuk mengoptimalkan pendekatan diplomasi publik yang lebih inklusif dan melibatkan berbagai aktor non-negara. Dengan melibatkan lebih banyak elemen masyarakat dalam diplomasi publik, seperti LSM, akademisi, dan media, Indonesia dapat memperkuat posisinya di hadapan negara-negara

Pasifik dan komunitas internasional secara keseluruhan (Sabir, 2018; Perkasa, 2024).

Pembangunan manusia di Papua juga menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas nasional. Pembangunan yang adil dan merata, yang memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua, harus menjadi prioritas utama pemerintah. Program-program pembangunan yang ada perlu dioptimalkan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi yang ada di Papua. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa hak-hak dasar masyarakat Papua terlindungi dengan baik, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak (Hutabarat, 2022; Hematang et al., 2019; Mery & Dewi, 2019).

Melalui pendekatan yang lebih inklusif, pemerintah Indonesia dapat meredakan ketidakpuasan yang ada di Papua dan memperkuat integrasi wilayah ini ke dalam NKRI. Pembangunan manusia yang berkelanjutan tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, tetapi juga akan memperkuat posisi Indonesia di mata dunia internasional. Dengan demikian, upaya diplomasi internasional dalam menghadapi internasionalisasi isu Papua harus diiringi dengan upaya nyata di dalam negeri untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua (Febriyanti & Roring, 2022; Sagala & Baskoro, 2023; Thalang & Siraprasiri, 2016).

Oleh karena itu, Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) ini berjudul **“Optimalisasi Diplomasi Indonesia dalam Internasionalisasi Isu Papua guna Menjaga Stabilitas Nasional.”** Taskap ini bertujuan untuk mengkaji strategi-strategi diplomasi yang lebih efektif dalam menghadapi internasionalisasi isu Papua, dengan fokus pada komunikasi internasional, pembangunan manusia, dan perlindungan HAM sebagai kunci untuk menjaga stabilitas nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang serta fakta kondisi yang terjadi, maka rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) adalah, **“Bagaimana optimalisasi diplomasi**

Indonesia dalam internasionalisasi isu Papua guna menjaga stabilitas nasional?"

Untuk menjawab dan menemukan solusi atas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan kajiannya:

- a. Bagaimana kondisi diplomasi Indonesia dalam mengatasi internasionalisasi isu Papua saat ini?
- b. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi diplomasi Indonesia dalam mengatasi internasionalisasi isu Papua sehingga stabilitas nasional dapat terjaga?
- c. Bagaimana langkah strategis optimalisasi diplomasi Indonesia dalam mengatasi internasionalisasi isu Papua sehingga dapat menjaga stabilitas nasional?

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penulisan Taskap ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan mengenai upaya optimalisasi diplomasi Indonesia dalam internasionalisasi isu Papua sehingga stabilitas nasional dapat terjaga.

b. Tujuan

Penulisan Taskap ini ditujukan sebagai sumbangsih pemikiran terkait bagaimana optimalisasi diplomasi Indonesia dalam internasionalisasi isu Papua sehingga dapat menjaga stabilitas nasional. Selain itu, Taskap ini ditujukan kepada para pemangku kepentingan sebagai rekomendasi kebijakan atas permasalahan sebagaimana dimaksud.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

a. Ruang Lingkup

Agar penulisan dalam Taskap ini lebih jelas, maka penulis membatasi ruang lingkup pada pembahasan mengenai optimalisasi diplomasi Indonesia dalam internasionalisasi isu Papua pada aspek pembangunan

manusia, perlindungan hak asasi manusia, dan komunikasi internasional guna menjaga stabilitas nasional.

b. Sistematika

Sistematika penulisan Taskap ini disusun secara saksama sehingga dapat menghasilkan kajian yang jelas dan tersusun sebagai satu-kesatuan yang koheren. Adapun tata urutan Taskap sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bab pertama akan dijelaskan mengenai latar belakang serta pokok-pokok permasalahan yang dibahas dalam Taskap. Kemudian, dalam bab ini pula akan disampaikan rumusan masalah, maksud dan tujuan penulisan, ruang lingkup dan sistematika yang digunakan, metode dan pendekatan yang digunakan, serta pengertian yang akan digunakan dalam Taskap ini. Hal tersebut penting disampaikan agar terdapat kesamaan persepsi dalam memahami pembahasan dalam Taskap ini.

Bab II Landasan Pemikiran. Pada bab kedua akan diuraikan landasan pemikiran yang digunakan sebagai kerangka pikir untuk membahas pada bab selanjutnya. Landasan pemikiran berasal dari peraturan perundang-undangan atau regulasi yang ada pada saat Taskap ini dituliskan. Berikutnya, kerangka teoritis berupa teori-teori yang digunakan sebagai 'alat' analisis berikut dengan faktor-faktor perkembangan lingkungan strategis global, regional, dan nasional.

Bab III Pembahasan. Pada bab ketiga akan diuraikan analisis setiap pertanyaan kajian yang diajukan dalam rumusan masalah pada Bab I. Pembahasan akan menggunakan peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan faktor-faktor lingkungan strategis untuk menjawab ketiga pertanyaan kajian.

Bab IV Penutup. Pada bab keempat akan disampaikan simpulan yang diperoleh dari seluruh pembahasan dengan solusi pada setiap pokok bahasan. Berikutnya juga akan disampaikan rekomendasi kebijakan yang menjadi saran dari pembahasan Taskap ini.

5. Metode dan Pendekatan

a. Metode Analisis

Taskap ini disusun melalui pendekatan kualitatif-deskriptif analitis dengan fokus pada pengumpulan data sekunder melalui kajian literatur dan analisis dokumen.

b. Pendekatan

Taskap ini disusun dengan pendekatan yang berorientasi pada kepentingan nasional, mengintegrasikan analisis multidisiplin yang sejalan dengan kerangka teoretis yang digunakan dalam pembahasan. Pendekatan tersebut menekankan pada hubungan antara upaya optimalisasi diplomasi Indonesia dan internasionalisasi isu Papua dengan tujuan utama untuk mempertahankan stabilitas nasional.

6. Pengertian

Berikut ini adalah daftar pengertian untuk kata, frasa, dan istilah dalam Taskap ini:

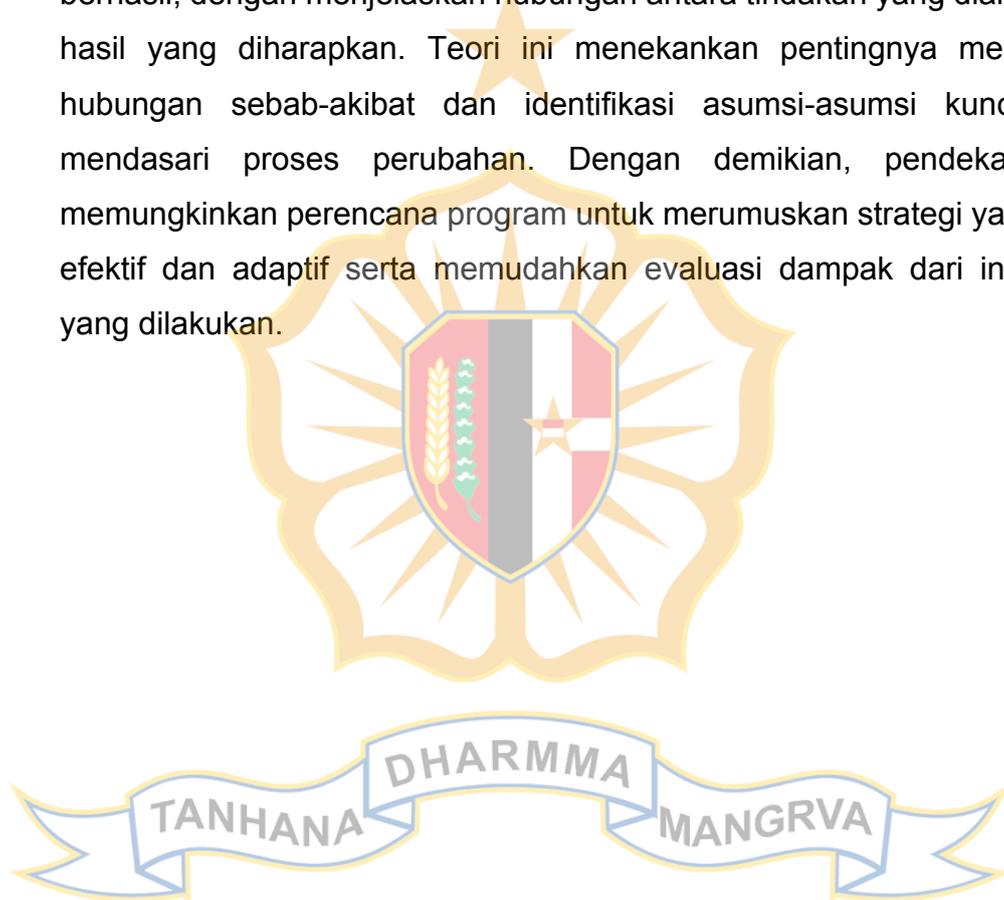
- a. **Diplomasi:** Seni dan praktek mengelola hubungan internasional melalui negosiasi antar negara dan aktor non-negara lainnya. Henry Kissinger (2012) mendefinisikan diplomasi sebagai proses di mana negara-negara berinteraksi untuk mencapai tujuan luar negeri mereka dengan cara yang paling menguntungkan dan damai. Menurut Kissinger, diplomasi melibatkan kombinasi dari strategi negosiasi, penggunaan kekuatan, dan diplomasi publik untuk mempengaruhi perilaku dan keputusan negara lain. Diplomasi juga mencakup berbagai teknik dan praktik, termasuk dialog resmi, pembentukan dan penggunaan aliansi, serta pemanfaatan soft power dan diplomasi multilateral melalui organisasi internasional. Esensinya, diplomasi adalah alat vital dalam memelihara stabilitas dan mempromosikan kerjasama internasional, dan merupakan kebalikan dari penggunaan kekuatan militer dalam menangani isu-isu internasional.
- b. **Internasionalisasi Isu:** Istilah ini merujuk pada proses di mana isu-isu domestik atau regional mendapatkan perhatian dan menjadi subjek diskusi atau tindakan di tingkat global. Dalam konteks ini, isu tersebut bertransformasi dari masalah yang sebelumnya hanya diperhatikan oleh

negara atau wilayah tertentu menjadi masalah yang diperhatikan oleh banyak negara dan aktor internasional, seperti organisasi internasional atau transnasional. Thomas G. Weiss (2010) mengartikulasikan bahwa internasionalisasi isu sering kali terjadi melalui peran organisasi internasional yang mengidentifikasi dan mempromosikan isu tersebut sebagai bagian dari agenda global mereka. Melalui proses ini, isu tersebut dapat menerima alokasi sumber daya yang lebih luas, perhatian politik yang lebih intens, serta kerja sama internasional dalam mencari solusi. Ini adalah mekanisme penting dalam mengatasi masalah yang memiliki dampak lintas batas, seperti perubahan iklim, keamanan internasional, dan hak asasi manusia.

- c. **Papua:** Wilayah di Indonesia yang terdiri dari enam provinsi, yaitu: Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya. Papua memiliki karakteristik geografis yang unik dengan kekayaan alam yang melimpah, termasuk tambang emas, tembaga, dan kayu. Selain itu, Papua juga memiliki keberagaman etnis dan budaya yang berbeda dengan wilayah lain di Indonesia, yang membuatnya menjadi wilayah yang kaya akan warisan budaya dan tradisi lokal. Namun, konflik politik dan sosial yang berkepanjangan telah menjadi tantangan besar bagi stabilitas dan pembangunan di wilayah ini.
- d. **Stabilitas Nasional:** mengacu pada keadaan di mana sebuah negara berhasil menjaga ketertiban internal, keamanan, dan berfungsi efektif tanpa gangguan signifikan, baik dari dalam maupun luar. Ahli politik Bruce Russett (1993) mengeksplorasi bagaimana demokrasi dan kerjasama internasional dapat menyumbang pada stabilitas nasional. Menurut Russett, stabilitas nasional tidak hanya melibatkan ketiadaan konflik atau kekerasan, tetapi juga pencapaian pemerintahan yang stabil, ekonomi yang sehat, dan masyarakat yang harmonis. Russett menekankan bahwa stabilitas nasional dicapai melalui lembaga-lembaga demokratis yang memperkuat norma-norma politik dan sosial yang mendukung perdamaian dan kerjasama. Stabilitas ini juga diperkuat oleh keterlibatan aktif dalam komunitas internasional, yang membantu mencegah isolasi dan meningkatkan dukungan untuk tata kelola yang baik. Melalui demokrasi

dan diplomasi, negara dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan.

- e. **Pendekatan Teori Perubahan:** *Theory of Change* adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program atau intervensi dengan cara memetakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Carol H. Weiss (1995) mendefinisikan teori perubahan sebagai cara berpikir sistematis mengenai bagaimana dan mengapa suatu inisiatif dapat berhasil, dengan menjelaskan hubungan antara tindakan yang diambil dan hasil yang diharapkan. Teori ini menekankan pentingnya memahami hubungan sebab-akibat dan identifikasi asumsi-asumsi kunci yang mendasari proses perubahan. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan perencana program untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dan adaptif serta memudahkan evaluasi dampak dari intervensi yang dilakukan.



BAB II

LANDASAN PEMIKIRAN

7. Umum

Untuk memahami konstruksi berpikir dalam menerjemahkan diplomasi Indonesia dalam Internasionalisasi isu Papua, maka dibutuhkan suatu landasan pemikiran dari berbagai perspektif yang saling terkait baik peraturan perundang-undangan, data dan fakta terkini, kerangka teoritis yang akan digunakan untuk analisis, serta lingkungan strategis yang meliputi dimensi global, regional, dan nasional. Dengan demikian akan mendapatkan pemahaman dan kerangka berpikir yang meletakkan beberapa landasan tersebut sebagai acuan dasar pada optimalisasi diplomasi Indonesia dalam menghadapi internasionalisasi isu Papua untuk dapat menjaga stabilitas nasional.

8. Peraturan Perundang-undangan

Sub bab ini akan menyajikan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan isu Papua, mencakup undang-undang yang memberikan kerangka hukum untuk otonomi khusus, hak asasi manusia, dan kebijakan luar negeri. Penjelasan ini akan membantu kita memahami landasan legal yang mengatur tindakan pemerintah serta implikasinya terhadap upaya diplomasi.

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama pasal-pasal berikut:

- 1) Pasal 25A: Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang wilayahnya dan batas-batasnya ditetapkan dengan undang-undang. Sesuai pasal ini, wilayah Indonesia meliputi seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke, merupakan wilayah Indonesia yang tetap, tidak boleh berubah dan akan dipertahankan seiring tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Pasal 28I ayat (1): Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah

hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

- 3) Pasal 33 ayat (3): Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
 - 4) Pasal 18B ayat (1): Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua. Undang-undang ini mengatur mengenai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat Papua, serta mengakomodasi aspirasi dan kepentingan nasional dalam konteks NKRI. Undang-undang ini juga mengatur mengenai kewenangan, dana, pengawasan, dan sanksi terkait dengan pelaksanaan otonomi khusus Papua.
 - c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini mengatur mengenai pengakuan, perlindungan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia, termasuk hak-hak dasar, sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Undang-undang ini juga mengatur mengenai kewajiban negara, masyarakat, dan individu dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, serta mekanisme penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia.
 - d. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Undang-undang ini mengatur mengenai asas, tujuan, prinsip, arah, dan prioritas hubungan luar negeri Indonesia, yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Undang-undang ini juga mengatur mengenai kewenangan, tanggung jawab, dan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga negara dalam hubungan luar negeri, serta peran dan fungsi masyarakat dalam hubungan luar negeri.

9. Data dan Fakta

a. Geografi dan Demografi

Papua, yang terletak di ujung timur Indonesia, merupakan wilayah yang kaya akan keberagaman geografis dan budaya. Saat ini, Papua telah terbagi menjadi enam provinsi: Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya. Pembagian ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang sangat luas ini¹.

Geografis Papua ditandai dengan karakteristik yang unik, termasuk pegunungan yang menjulang, lembah-lembah yang subur, dan hutan hujan tropis yang luas. Pulau Papua memiliki gunung tertinggi di Asia Tenggara, yaitu Puncak Jaya, dengan ketinggian sekitar 4.884 meter. Selain itu, terdapat juga sungai-sungai panjang yang menjadi sumber kehidupan bagi penduduk setempat².

Demografi Papua juga mencerminkan keberagaman yang signifikan. Wilayah ini dihuni oleh lebih dari 300 kelompok etnis yang berbeda, masing-masing dengan bahasa dan budaya mereka sendiri. Beberapa kelompok etnis yang terkenal di Papua adalah Dani, Asmat, Biak, dan Yali. Keberagaman ini menciptakan mozaik budaya yang sangat beragam di wilayah ini³.

Kebudayaan Papua sangat kaya dan beragam, diwariskan dari berbagai etnis yang ada di wilayah tersebut. Misalnya, suku Asmat terkenal dengan ukiran kayu rumit yang merefleksikan manusia, hewan, dan simbol-simbol spiritual. Suku Dani dikenal dengan rumah adatnya yang disebut Honai, bentuk kerucut dari kayu dan jerami. Kebudayaan ini tidak hanya menarik dari segi artistik tetapi juga memiliki nilai-nilai tradisional dan spiritual yang mendalam⁴.

¹ <https://mediaindonesia.com/humaniora/633757/6-provinsi-di-papua-letak-dan-ibukotanya>

² <https://travel.detik.com/detiktravel/d-5117050/kondisi-geografis-pulau-papua-berdasarkan-peta-lengkap-dengan-batasnya>

³ <https://pojokjakarta.com/2023/09/23/kekayaan-dan-keunikan-budaya-papua-eksplorasi-keberagaman-di-tanah-papua/>

⁴ <https://www.anakbisa.com/fakta-unik-keberagaman-suku-dan-budaya-papua/>

Kondisi geografi dan demografi Papua mencerminkan keunikan dan kekayaan yang tidak terpisahkan dari identitas Indonesia. Pembagian menjadi enam provinsi merupakan langkah strategis untuk mengelola wilayah yang sangat luas ini, dengan harapan dapat lebih fokus dalam mengembangkan potensi wilayah, mendorong pembangunan ekonomi, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Proses ini tidak hanya mencerminkan keberagaman geografis Pulau Papua tetapi juga komitmen untuk meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi bagi seluruh penduduk di wilayah ini.

b. Sejarah Integrasi Papua

Sejarah integrasi Papua ke Indonesia adalah narasi kompleks dan beragam yang mengaitkan aspirasi masyarakat, kepentingan geopolitik suatu negara, dan konsep penentuan nasib sendiri yang terus berkembang di era pascakolonial. Proses integrasi dimulai dalam konteks dekolonisasi, ketika Hindia Belanda, sebuah konglomerasi wilayah di bawah pemerintahan kolonial Belanda, dibongkar setelah Perang Dunia II.

Papua, yang dikenal sebagai *West New Guinea* pada masa penjajahan Belanda, merupakan pengecualian dalam proses dekolonisasi yang mengarah pada terbentuknya Indonesia. Meskipun sebagian besar wilayah Hindia Belanda dimasukkan ke dalam Republik Indonesia yang baru merdeka pada tahun 1949, Papua tetap berada di bawah kendali Belanda. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk keunikan identitas etnis dan budaya masyarakat Papua, yang berbeda dari daerah lain di Indonesia, dan keyakinan Belanda bahwa Papua belum siap untuk memiliki pemerintahan sendiri.

Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Sukarno, berusaha menegaskan kedaulatan atas seluruh wilayah bekas Belanda, termasuk Papua. Perbedaan pandangan yang signifikan antara Indonesia dan Belanda muncul selama Konferensi Meja Bundar (KMB) atau *Nederlands-Indonesische rondetafelconferentie* pada 23 Agustus s.d. 2 November 1949. Belanda menolak untuk menyerahkan Papua Barat, sementara Indonesia bersikeras bahwa wilayah itu harus menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS) (Firdausi, 2019). Selama perundingan KMB,

Indonesia dan Belanda gagal mencapai kesepakatan mengenai status kedaulatan Papua Barat. Meskipun berbagai dokumen dan kesepakatan berhasil dibuat, masalah Papua Barat tetap tidak terselesaikan. Penolakan Belanda untuk menyerahkan Papua Barat kepada Indonesia menyebabkan kesepakatan untuk menunda pembicaraan mengenai status wilayah ini selama satu tahun setelah pengakuan kedaulatan Indonesia (Agung, 1973; Kahin, 1952).

Setelah KMB, upaya untuk mengembalikan Papua ke dalam wilayah Indonesia melalui jalan damai semakin sulit dilakukan, ketegangan terus meningkat, dan kegagalan diplomasi di berbagai forum internasional. Oleh karena itu Indonesia mencari jalan lain, yaitu mengambil, "*action outside the United Nations mechanism*" (Tarling, 2008). Hal tersebut dikarenakan Belanda mengingkari janjinya untuk menyelesaikan status Papua dalam waktu satu tahun setelah KMB. Kegagalan perundingan damai pasca KMB menyebabkan meningkatnya ketegangan antara Indonesia dan Belanda yang berujung pada konflik bersenjata. Belanda terus menguasai Papua Barat yang dianggap Indonesia sebagai bagian dari wilayahnya. Ketegangan memuncak ketika kedua negara bersiap melakukan keterlibatan militer untuk menegaskan klaim mereka (Tarling, 2008; Bakhshi, 2021).

Eskalasi konflik antara Indonesia dan Belanda mengenai status Papua Barat kemudian dibawa ke PBB, yang berujung pada Perjanjian New York pada tahun 1962. Perjanjian ini mengamanatkan pengalihan pemerintahan Papua Barat kepada Otoritas Eksekutif Sementara PBB (*United Nations Temporary Executive Authority, UNTEA*), yang kemudian menyerahkan kendali kepada Indonesia pada tahun 1963. Perjanjian tersebut juga mencakup ketentuan untuk "Penentuan Pendapat Rakyat" yang akan dilakukan pada tahun 1969, yang memungkinkan masyarakat Papua untuk menentukan masa depan politik mereka (Crocombe, 2007; Chauvel, 2005).

Gambar 1. Delegasi Penandatanganan Perjanjian New York, 15 Agustus 1962



Sumber: Martin Sitompul dalam Historia.id (2023)

Penentuan Pendapat Rakyat atau Pepera yang dilakukan pada tahun 1969 merupakan peristiwa penting dalam sejarah Papua. Tujuan dari *Act of Free Choice* atau Pepera adalah untuk memastikan keinginan masyarakat Papua mengenai integrasi mereka ke Indonesia. Referendum tersebut menghasilkan suara bulat untuk integrasi dengan Indonesia yang diambil oleh 1.025 wakil terpilih atas nama seluruh penduduk Papua (Musgrave, 2015).

Dengan hasil Pepera tersebut, terjadilah integrasi Papua ke Indonesia. Namun terdapat sebagian kelompok yang menolak hasil referendum tersebut. Integrasi Papua bukan hanya tentang peristiwa-peristiwa yang menyebabkan masuknya Papua ke dalam Indonesia, namun juga tentang perjuangan yang sedang berlangsung untuk mendapatkan pengakuan, hak, dan penentuan nasib sendiri depan wilayah tersebut. Ini adalah sejarah yang mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam pembangunan bangsa dan upaya untuk bersatu di tengah keberagaman di dunia pasca-kolonial.

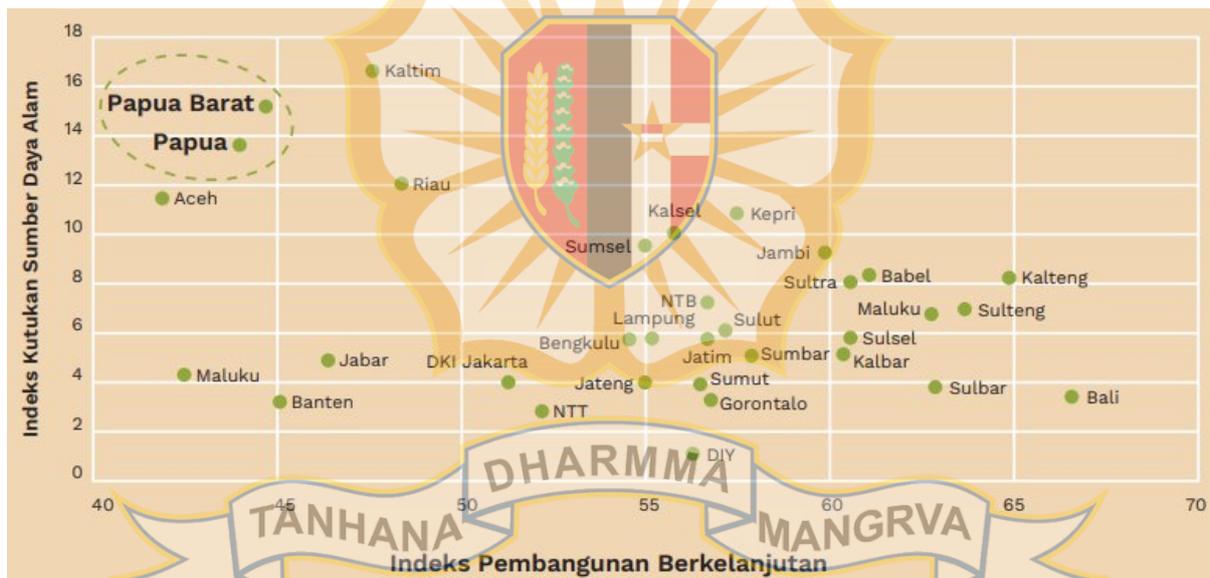
c. Sumber Kekayaan Alam

Papua memiliki sumber kekayaan alam yang menjadikannya penting secara ekonomi dan penting secara ekologis. Kekayaan alam di kawasan ini mencakup hamparan hutan hujan tropis yang luas, cadangan mineral yang besar, dan kehidupan laut yang melimpah. Sumber kekayaan ini

merupakan keuntungan sekaligus kerugian bagi komunitas lokal Papua dan lingkungan hidup.

Hutan di Papua merupakan salah satu hutan terluas dan paling beragam secara biologis di dunia, mencakup sebagian besar wilayah tersebut. Kawasan ini merupakan rumah bagi banyak sekali spesies tumbuhan dan hewan, banyak di antaranya bersifat endemik dan tidak dapat ditemukan di tempat lain di Bumi. Hutan juga memainkan peran penting dalam mengatur iklim dan merupakan sumber penghidupan penting bagi masyarakat adat Papua, yang bergantung pada hutan untuk berburu, meramu, dan pertanian tradisional (Friawan, 2023). Untuk dapat menggambarkan hubungan antara sumber kekayaan alam Papua dan hasil pembangunan saat ini dapat dijelaskan melalui data dibawah ini.

Gambar 2. Hubungan Indeks Kutukan Sumber Daya Alam dengan Indeks Pembangunan Berkelanjutan Antar Daerah



Sumber: Greenpeace Indonesia (2022)

Salah satu eksploitasi sumber daya alam di Papua adalah eksploitasi tambang Grasberg, yang merupakan tambang emas terbesar dan salah satu tambang tembaga terbesar di dunia. Seperti yang diuraikan oleh Bobby Anderson dalam studinya "*Papua's Insecurity: State Failure in the Indonesian Periphery*" (2015) tambang ini dioperasikan oleh Freeport-McMoRan, sebuah perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat, dan telah menjadi sumber konflik selama beberapa dekade. Proses penambangan telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan,

termasuk deforestasi, degradasi tanah, dan pencemaran air dengan limbah beracun yang berdampak pada ekosistem lokal dan sumber daya air yang digunakan oleh masyarakat setempat untuk pertanian dan konsumsi sehari-hari.

Di bawah hutan lebat terdapat cadangan mineral yang kaya, termasuk emas, tembaga, dan nikel. Tambang Grasberg, yang dioperasikan oleh Freeport-McMoRan, adalah salah satu contoh kekayaan mineral Papua. Wilayah ini juga memiliki cadangan gas alam dan minyak yang signifikan, yang telah menarik investasi asing dalam jumlah besar, diantaranya adalah eksploitasi gas alam di Teluk Bintuni oleh *British Petroleum*, serta minyak bumi di Sorong, Papua Barat (Marr, 2011). Sumber daya alam ini, jika dikelola dengan baik, dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian lokal dan nasional. Dibawah ini akan di gambarkan hasil pencitraan satelit terhadap kondisi hutan Papua.

Gambar 3. Perbandingan Citra Satelit Deforestasi Tanah Papua 2019 dan 2023



Sumber: Greenpeace Indonesia (2023)

Namun eksploitasi sumber daya alam ini telah menimbulkan dampak negatif yang besar terhadap lingkungan dan masyarakat lokal. Operasi penambangan skala besar telah menyebabkan penggundulan hutan, erosi tanah, dan pencemaran saluran air dengan *tailing* beracun dan bahan kimia. Proyek-proyek besar seperti *Merauke Integrated Food and Energy*

Estate (MIFEE) telah mengubah peruntukan lahan secara besar-besaran, termasuk hutan, untuk dijadikan perkebunan yang ditanami berbagai tanaman untuk pangan, energi, dan tanaman produktif lainnya. Degradasi lingkungan pada gilirannya berdampak pada menurunnya keanekaragaman hayati dan berpengaruh pada cara hidup tradisional masyarakat adat. Hal ini telah menimbulkan kekhawatiran mendalam terhadap potensi kerusakan yang akan ditimbulkan terhadap masyarakat adat, tanah adat, sumber daya alam, dan budaya mereka (Marr, 2011).

Eksplorasi sumber daya alam di Papua sering kali diwarnai dengan pendekatan dari atas ke bawah, di mana keputusan diambil tanpa melibatkan masyarakat setempat. Pendekatan ini mengabaikan hak dan kepentingan masyarakat lokal, serta merusak lingkungan dan mengganggu kehidupan sosial budaya mereka (Marr, 2011). Selain itu, pemekaran wilayah Papua yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan dan pemerataan pembangunan, apabila tidak dikelola dengan baik, dikhawatirkan akan membuka ruang eksploitasi sumber daya alam yang lebih besar, yang dapat mengancam keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat lokal (Hutabarat, 2022). Hal diatas dapat dijelaskan melalui data dibawah ini.

Gambar 4. Provinsi Papua kehilangan 480 kha (2,0%) hutan primer basah, 2002-2023



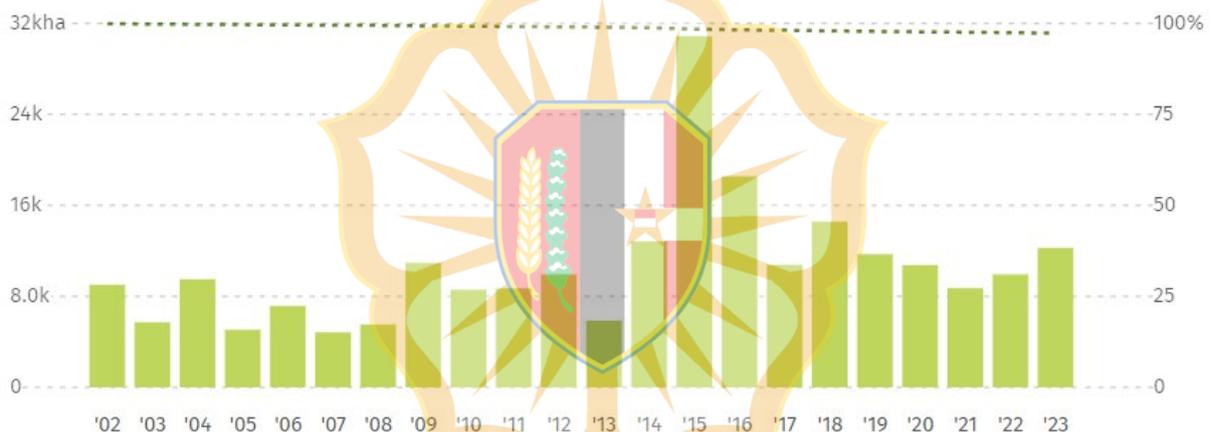
Sumber: Dasbor *Global Forest Watch*

Kegiatan kehutanan, khususnya pembalakan liar dan konversi lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, telah mengakibatkan hilangnya tutupan hutan, mengancam habitat keanekaragaman spesies dan warisan budaya masyarakat Papua. Hilangnya hutan juga memperburuk perubahan

iklim, karena hutan merupakan penyerap karbon yang signifikan (Marr, 2011).

Dampak negatif dari eksploitasi sumber daya alam ini tidak hanya terbatas pada kerusakan lingkungan, tetapi juga pada kondisi sosial ekonomi masyarakat asli Papua. Eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan tanpa investasi serius bagi pembangunan masyarakat asli Papua, telah dan akan memperburuk kondisi mereka, serta ekosistem dalam jangka panjang (Greenpeace Indonesia, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa kekayaan alam yang melimpah di Papua bisa menjadi kutukan daripada anugerah jika tidak dikelola dengan bijaksana dan berkelanjutan. Data dibawah ini dapat menjelaskan hasil eksploitasi hutan di Papua.

Gambar 5. Provinsi Papua Barat kehilangan 232 kha (2,7%) hutan primer basah, 2002-2023



Sumber: Dasbor *Global Forest Watch*

Dampak eksploitasi sumber daya terhadap masyarakat Papua sangat besar. Masuknya pekerja migran telah mengubah susunan demografi wilayah tersebut, yang sering kali menimbulkan ketegangan dengan masyarakat lokal. Janji pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sering kali dikaburkan oleh dampak sosial dan lingkungan hidup, sehingga menimbulkan situasi yang digambarkan sebagai “kutukan sumber daya,” di mana melimpahnya sumber daya alam tidak menghasilkan peningkatan standar hidup bagi sebagian besar masyarakat (Friawan, 2023).

d. **Perlindungan Hak Asasi Manusia**

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Papua merupakan salah satu isu yang krusial dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah Indonesia. Sejak integrasi Papua ke dalam wilayah Indonesia, pemerintah

telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa HAM masyarakat Papua terjaga dengan baik. Namun demikian, berbagai tantangan masih terus dihadapi, termasuk tuduhan pelanggaran HAM yang sering kali dimanfaatkan oleh kelompok separatis untuk mendiskreditkan pemerintah Indonesia di mata internasional.

Pemerintah Indonesia telah menegaskan komitmennya terhadap perlindungan HAM di Papua melalui berbagai kebijakan dan langkah konkret. Misalnya, pemerintah berusaha menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM berat secara yudisial dan non-yudisial. Salah satu langkah nyata adalah pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu yang dibentuk melalui Keppres Nomor 17 Tahun 2020. Tim ini bertujuan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat secara adil dan transparan, serta memprioritaskan kepentingan korban (Mulyana, 2023).

Pada tahun 2022, pemerintah juga berhasil memulai proses yudisial terhadap kasus pelanggaran HAM berat di Paniai. Proses ini berjalan dengan aman, terbuka, objektif, independen, dan imparial, menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam menegakkan keadilan. Selain itu, upaya untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sesuai dengan amanat UU Otonomi Khusus Papua juga sedang dalam proses pembahasan, yang diharapkan dapat menjadi langkah penting dalam penyelesaian masalah HAM di Papua (Mulyana, 2023).

Selain upaya yudisial dan non-yudisial, pemerintah juga fokus pada pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Hal ini diwujudkan melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Instruksi Presiden ini menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan pelayanan publik, reformasi birokrasi, dan tata kelola yang baik. Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan bahwa masyarakat Papua dapat menikmati hak-hak dasar mereka, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi (Mulyana, 2023).

Namun, meskipun pemerintah telah berusaha keras untuk meningkatkan kondisi HAM di Papua, masih terdapat tantangan yang

signifikan. Isu-isu seperti kekerasan, pelanggaran hak-hak orang asli Papua, dan situasi pengungsi masih menjadi perhatian utama komunitas internasional. Untuk menangani isu-isu ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan inklusif. Salah satu rekomendasi yang sering diajukan adalah perlunya dialog antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perwakilan masyarakat Papua. Dialog ini diharapkan dapat menurunkan eskalasi konflik bersenjata dan mencari solusi damai yang berkelanjutan untuk masalah Papua (Hamid, 2023).

Selain itu, pemerintah juga perlu terus memperkuat diplomasi internasional untuk meluruskan misinformasi yang sering kali disebarkan oleh kelompok separatis. Diplomasi yang efektif dapat membantu mengurangi tekanan internasional dan memastikan bahwa pandangan global terhadap situasi di Papua lebih seimbang dan objektif. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan responsif terhadap pertanyaan dari *Special Procedures Mandate Holders* PBB, yang mencerminkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam menangani isu-isu HAM di Papua (Faizasyah, 2023).

Dalam menghadapi tantangan internasionalisasi isu Papua, strategi pemerintah harus mencakup upaya penguatan narasi positif tentang kemajuan pembangunan di Papua, pelurusan informasi yang keliru, dan penekanan pada prinsip non-intervensi. Kerja sama dengan negara-negara sahabat dan organisasi internasional juga harus terus ditingkatkan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam forum-forum internasional (Litaay, 2023).

e. **Internasionalisasi Isu**

Internasionalisasi isu Papua telah menjadi topik yang semakin mendapatkan perhatian di panggung global, terutama sejak awal abad ke-21. Isu ini berkaitan dengan aspirasi sebagian masyarakat Papua untuk meraih kemerdekaan dari Indonesia, yang telah menimbulkan berbagai reaksi dari komunitas internasional, termasuk pengawasan dan advokasi yang intensif, keterlibatan diaspora Papua, serta dukungan dari negara-negara di Kepulauan Pasifik.

Pengawasan dan advokasi internasional terhadap situasi di Papua telah dilakukan oleh berbagai lembaga dan organisasi hak asasi manusia. Mereka mengangkat isu pelanggaran HAM dan menyerukan dialog inklusif antara pemerintah Indonesia dan perwakilan masyarakat Papua. Upaya ini diperkuat oleh laporan dan investigasi yang dilakukan oleh organisasi-organisasi seperti Amnesty International, yang telah aktif dalam menegakkan keadilan HAM di Indonesia, termasuk di Papua (Hafidz, 2021).

Diaspora Papua juga memainkan peran penting dalam internasionalisasi isu ini. Mereka yang berada di luar negeri seringkali mengorganisir kegiatan dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran internasional terhadap situasi di Papua. Dukungan dari negara-negara di Kepulauan Pasifik, seperti Vanuatu, Nauru, dan Tuvalu, yang memiliki kesamaan etnis Melanesia dengan masyarakat Papua, telah memberikan dorongan moral dan diplomatik bagi aspirasi kemerdekaan Papua (Wardhani, 2020).

Solidaritas yang ditunjukkan oleh *Melanesian Spearhead Group* (MSG) merupakan salah satu contoh dukungan regional yang signifikan. MSG adalah organisasi yang terdiri dari negara-negara Melanesia, termasuk Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu, serta Front Pembebasan Nasional Kanak dan Sosialis dari Kaledonia Baru. Organisasi ini telah menunjukkan dukungan kuat dan pendiriannya dalam solidaritas masyarakat Melanesia terhadap Papua Barat, meskipun ada penolakan terhadap permohonan keanggotaan oleh *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP) oleh MSG (Rahmi, 2021).

Internasionalisasi isu Papua mencerminkan kompleksitas hubungan antara aspirasi lokal, dinamika regional, dan politik global. Meskipun ada pengakuan dan dukungan dari beberapa negara dan organisasi internasional, masih ada perdebatan dan tantangan yang perlu dihadapi dalam konteks diplomasi internasional dan hak penentuan nasib sendiri. Dukungan internasional terhadap Papua sebagai bagian integral dari NKRI juga telah dinyatakan oleh lebih dari 80 negara di dunia, termasuk negara-negara tetangga seperti Australia, Malaysia, dan Singapura (Suyatra,

2024). Ini menunjukkan bahwa isu Papua tidak hanya merupakan masalah domestik Indonesia tetapi juga telah menjadi perhatian yang lebih luas di tingkat internasional.

f. Respons Indonesia terhadap Konflik

Respons Indonesia terhadap konflik Papua telah melibatkan berbagai strategi, mulai dari pemberian otonomi khusus hingga upaya pembangunan infrastruktur. Namun, pendekatan ini sering kali mendapat kritik karena dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan masalah mendasar yang dihadapi oleh masyarakat Papua.

Otonomi khusus, yang diberikan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, dimaksudkan untuk memberikan kewenangan lebih luas kepada Papua dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Namun, beberapa pengamat menilai bahwa otonomi khusus tidak memberikan dampak signifikan pada kemajuan orang Papua⁵. Kritik ini mengarah pada gagasan bahwa meskipun ada peningkatan alokasi dana, hal tersebut belum mampu mengurangi kesenjangan sosial ekonomi atau memperbaiki layanan publik secara substansial.

Inisiatif pembangunan yang dilakukan pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur dan program pemberdayaan ekonomi, juga mendapat sorotan. Meskipun ada peningkatan dalam pembangunan fisik, seperti jalan dan fasilitas umum, masih ada pertanyaan tentang seberapa jauh proyek-proyek ini berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua⁶. Kritikus berpendapat bahwa pembangunan sering kali tidak menyentuh aspek-aspek mendasar seperti pendidikan dan kesehatan, yang merupakan kunci untuk pembangunan jangka panjang⁷.

Dalam konteks yang lebih luas, respons Indonesia terhadap konflik Papua mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam mengelola keberagaman dan aspirasi daerah dalam kerangka negara-bangsa. Meskipun ada upaya untuk memperbaiki kondisi kehidupan di Papua,

⁵ <https://www.voaindonesia.com/a/otonomi-khusus-papua-tak-berdampak-signifikan-pada-kemajuan-orang-papua/5482919.html>

⁶ <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/3352/membangun-papua-membangun-indonesia>

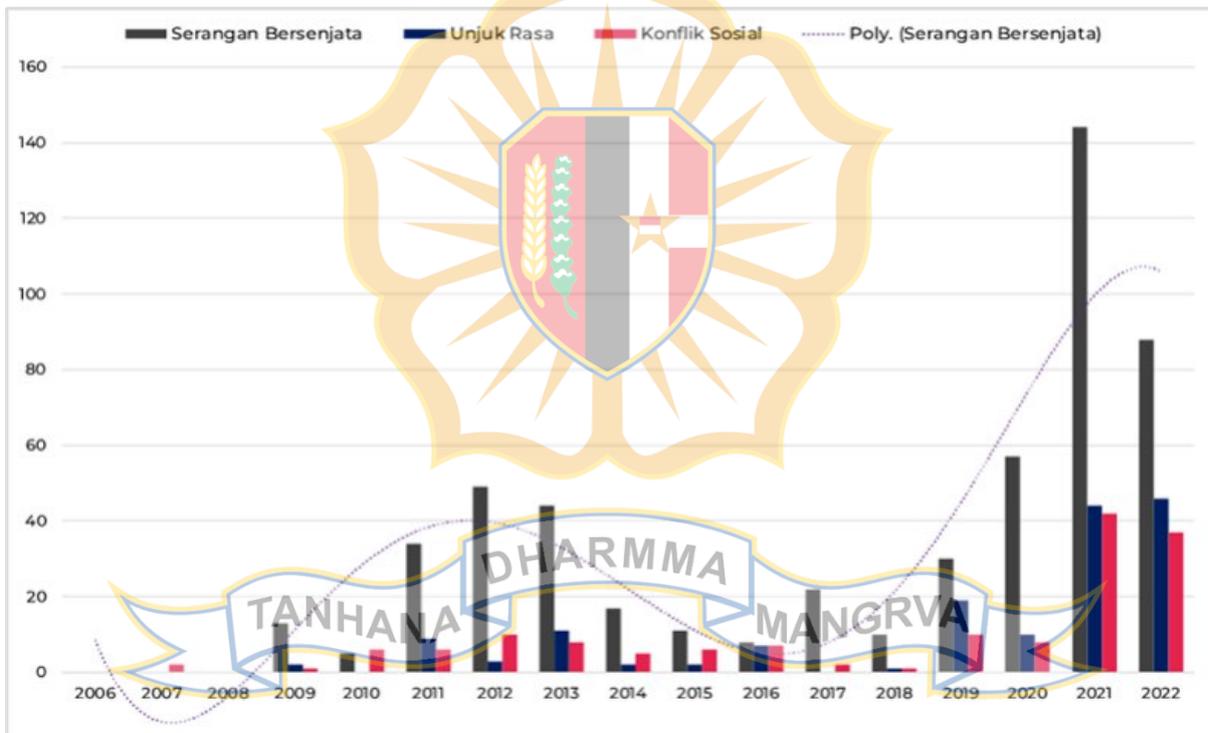
⁷ <https://nasional.kompas.com/read/2021/07/22/00280001/imparsial-kritik-pengesahan-ruu-otsus-papua-di-tengah-banyak-penolakan>

masih ada jalan panjang yang harus ditempuh untuk mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

g. Dinamika Kekerasan dan Konflik

Dinamika kekerasan dan konflik di Papua telah menjadi salah satu isu yang paling kompleks dan berkepanjangan di Indonesia. Konflik ini melibatkan berbagai faktor, mulai dari aspirasi kemerdekaan, ketidakpuasan terhadap pembangunan, hingga masalah hak asasi manusia. Salah satu aktor utama dalam konflik ini adalah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), yang merupakan sayap bersenjata dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) (Strangio, 2021). Dinamika konflik Papua dapat digambarkan dalam diagram dibawah ini.

Gambar 6. Dinamika Konflik di Papua, 2006-2022



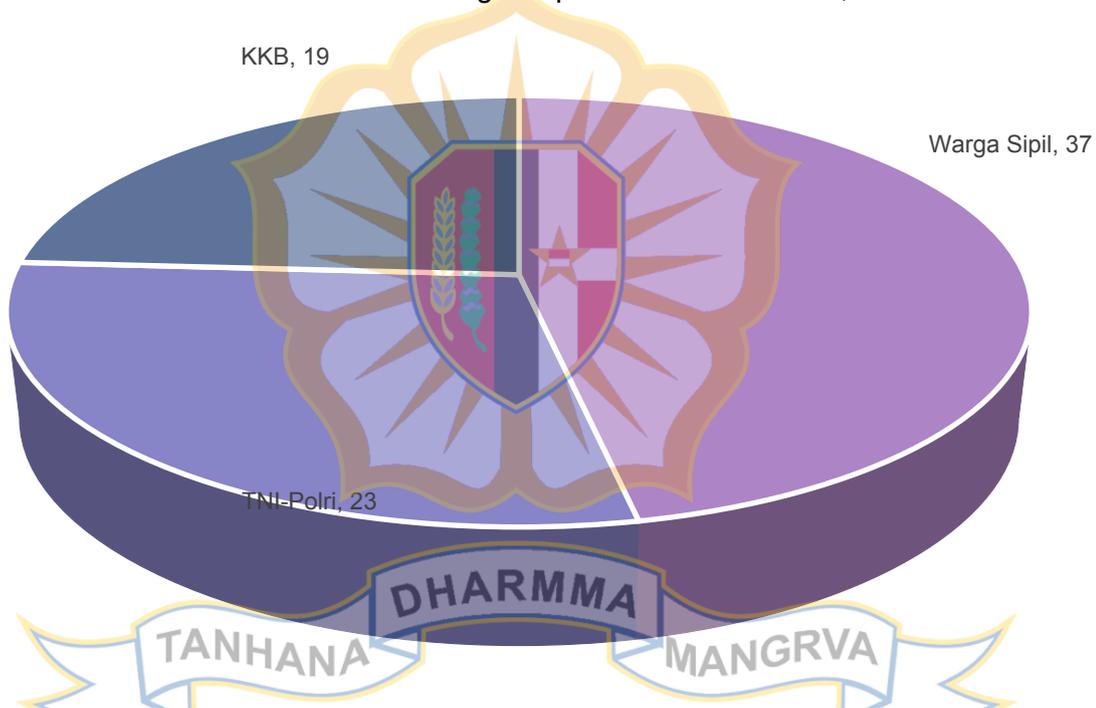
Sumber: Paparan Gubernur Lemhannas RI “Pola Kekerasan di Papua” (2023)

TPNPB dikenal karena menggunakan taktik gerilya dan seringkali menargetkan infrastruktur sebagai bentuk penolakan terhadap pembangunan. Serangan-serangan yang dilakukan oleh TPNPB tidak hanya menasar infrastruktur, namun juga pekerja non-Papua, yang sering kali dianggap sebagai simbol dari kehadiran dan pengaruh pemerintah pusat di tanah Papua (HRM, 2023). Tindakan kekerasan oleh TPNPB telah mengundang tanggapan tegas dari pemerintah Indonesia dengan

melakukan penertiban keamanan untuk menjaga stabilitas wilayah dan melindungi warga sipil.

Eskalasi kekerasan yang ditandai oleh TPNPB mencerminkan ketegangan yang mendalam antara kelompok separatis dengan pemerintah. Kekerasan ini sering kali berujung pada korban jiwa, baik dari pihak TPNPB maupun aparat keamanan, serta warga sipil yang terjebak di tengah-tengah konflik (HRM, 2024). Selain itu, serangan terhadap infrastruktur dan pekerja non-Papua juga berdampak pada pembangunan ekonomi dan sosial di Papua, yang pada gilirannya memperburuk kondisi kehidupan masyarakat setempat. Data korban kekerasan TPNPB dapat dijelaskan dalam diagram dibawah ini.

Gambar 7. Korban Jiwa Satgas Operasi Damai Cartenz, 2023



Sumber: Purnomo, S. (2023). "Strategi Penanganan Konflik dan Percepatan Pembangunan Papua dalam Perspektif Hukum dan HAM."

Pemerintah Indonesia telah mencoba berbagai pendekatan untuk menyelesaikan konflik di Papua, termasuk melalui dialog dan pembangunan infrastruktur. Namun, keberhasilan upaya ini sering kali terhambat oleh kekerasan yang berkelanjutan dan kurangnya kepercayaan antara kedua belah pihak. Di sisi lain, komunitas internasional, termasuk lembaga hak asasi manusia dan pemerintah negara lain, telah menyerukan agar pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah lebih lanjut untuk

menyelesaikan konflik secara damai dan menghormati hak-hak masyarakat Papua (ICG, 2012).

h. Pendekatan Diplomasi

Pendekatan diplomasi Indonesia terhadap internasionalisasi isu Papua telah melibatkan serangkaian strategi yang bertujuan untuk mengatasi narasi pro-kemerdekaan yang berkembang di tingkat internasional. Upaya ini mencakup partisipasi dalam organisasi internasional, diplomasi ekonomi, kerja sama pembangunan, serta pendekatan diplomasi kultural dan kerja sama dalam bencana dan lingkungan hidup (Tobing, 2024). Indonesia telah menunjukkan komitmen kepada dunia internasional terhadap peningkatan kesejahteraan dan penghormatan hak asasi manusia di Papua.

Dalam menghadapi internasionalisasi masalah Papua, pemerintah Indonesia melakukan antisipasi secara nasional dan memperkuat diplomasi politik, baik secara bilateral maupun multilateral, melalui forum regional dan internasional⁸. Hal ini dilakukan untuk menanggapi tuduhan pelanggaran HAM dan mendukung legalitas integrasi Papua ke dalam NKRI. Pemerintah Indonesia juga telah memberikan klarifikasi dan informasi yang akurat tentang situasi di Papua, termasuk langkah-langkah yang telah diambil untuk memperbaiki kondisi di wilayah tersebut.

Perbandingan pendekatan pemerintah Indonesia terhadap Papua dengan Timor Timur menunjukkan perbedaan dalam strategi diplomasi dan advokasi internasional. Pada kasus Timor Timur, Presiden B.J. Habibie memutuskan untuk mengadakan referendum yang memungkinkan Timor Timur untuk memilih kemerdekaan⁹. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk tekanan internasional dan situasi politik domestik saat itu. Pendekatan ini dianggap sebagai langkah berani yang menunjukkan komitmen Indonesia terhadap demokrasi.

Sementara itu, pendekatan terhadap Papua cenderung lebih konservatif, dengan fokus pada pembangunan dan dialog internal, serta

⁸ <https://nasional.sindonews.com/berita/1251091/18/papua-dan-diplomasi-politik-internasional>

⁹ <https://tirto.id/beda-cara-habibie-dan-jokowi-selesaikan-konflik-timor-timur-papua-ehW2>

penekanan pada kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia menolak ide referendum di Papua, dengan pertimbangan bahwa integrasi Papua ke dalam NKRI telah final melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969¹⁰. Pendekatan ini mencerminkan penyelesaian masalah Papua melalui cara-cara yang tidak mengarah pada fragmentasi wilayah.

Pendekatan diplomasi Indonesia terhadap internasionalisasi isu Papua juga mencerminkan kebijakan politik luar negeri Indonesia, dari reaktif menjadi lebih proaktif dan konstruktif. Indonesia lebih terbuka dalam berdialog dan bekerja sama dengan negara-negara lain untuk menyelesaikan masalah, termasuk isu Papua. Ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya membangun citra positif dan menjaga hubungan baik dengan komunitas internasional.

Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam menghadapi dukungan dari negara-negara Pasifik dan aktor non-negara yang terus menyuarakan isu Papua¹¹. Indonesia harus terus berupaya untuk mengatasi narasi pro-kemerdekaan Papua dengan menunjukkan kemajuan nyata di lapangan dan memperkuat diplomasi yang inklusif dan menghormati hak asasi manusia.

10. Kerangka Teoritis

a. Teori Pembangunan Manusia

Teori Pembangunan Manusia paling signifikan dikembangkan oleh Amartya Sen dan Mahbub ul Haq. Teori ini merupakan pendekatan yang revolusioner dalam mengukur kemajuan sosial dan ekonomi, memfokuskan pada peningkatan kapasitas manusia lebih dari sekadar pertumbuhan ekonomi. Amartya Sen (1999) mengartikulasikan bahwa pembangunan sejati diukur melalui peningkatan kebebasan yang dinikmati oleh individu, yang memungkinkan mereka untuk memilih dan mengejar kehidupan yang mereka nilai.

¹⁰ <https://manado.tribunnews.com/2019/09/03/wiranto-beberkan-perbedaan-papua-papua-barat-dan-timor-timur-intinya-tidak-ada-referendum>

¹¹ <https://imparsial.org/internasionalisasi-isu-papua-dan-reposisi-implementasi-otonomi-khusus-papua/>

Teori ini mengusulkan bahwa kunci pembangunan bukan hanya dalam peningkatan pendapatan, melainkan dalam perluasan kemampuan-kemampuan dasar individu, seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi politik. Sen menekankan pentingnya akses terhadap sumber daya yang memungkinkan individu untuk membangun dan menggunakan kemampuan mereka. Aspek penting lainnya dari teori ini adalah konsep “kemiskinan kapabilitas” yang berfokus pada ketidakmampuan individu untuk mencapai fungsi-fungsi dasar kehidupan akibat kurangnya peluang dan akses terhadap sumber daya.

Teori Pembangunan Manusia juga mendukung ide bahwa pembangunan ekonomi harus disertai dengan keadilan sosial, kesempatan yang setara, dan perlindungan lingkungan, yang semua ini bersifat penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Mahbub ul Haq (1995), dalam menciptakan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index - HDI*), mempraktikkan ide ini dengan mengukur tiga dimensi utama pembangunan manusia: umur panjang dan kesehatan yang baik, pengetahuan, serta standar hidup yang layak.

Teori ini dapat membantu untuk menjelaskan upaya optimalisasi diplomasi Indonesia dalam internasionalisasi isu Papua untuk menjaga stabilitas nasional. *Pertama*, dengan menggunakan kerangka Teori Pembangunan Manusia, Indonesia dapat menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan inklusif dan berkelanjutan dalam strategi diplomasi internasionalnya. Strategi ini bisa mempresentasikan data dan inisiatif yang menunjukkan peningkatan dalam indikator-indikator HDI di Papua, seperti peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, yang dapat menegaskan usaha Indonesia dalam mengatasi ketimpangan regional.

Kedua, dalam menangani isu internasional yang terkait dengan Papua, Indonesia bisa menggunakan pendekatan pembangunan manusia untuk membentuk kolaborasi internasional yang fokus pada proyek-proyek pembangunan manusia. Melalui diplomasi yang berorientasi pada pembangunan manusia, Indonesia bisa menarik dukungan dan investasi internasional untuk program-program yang meningkatkan kapasitas

manusia di Papua, yang tidak hanya memperbaiki kualitas hidup tetapi juga membantu mengurangi ketegangan dan memperkuat stabilitas.

Ketiga, mempromosikan pembangunan manusia sebagai bagian dari diplomasi Indonesia bisa membantu mengurangi kritik internasional atas isu-isu hak asasi manusia dan konflik di Papua. Dengan menunjukkan kemajuan nyata dalam peningkatan kapabilitas manusia, Indonesia dapat membangun narasi yang lebih positif yang menekankan upaya progresif daripada ketegangan.

Keempat, teori ini mendukung penggunaan diplomasi multilateral di mana Indonesia bisa berinisiatif dalam forum internasional untuk mengadvokasi pendekatan pembangunan manusia yang lebih luas, tidak hanya di Papua tetapi sebagai model global yang mendukung perdamaian dan keamanan internasional melalui pembangunan sosial dan ekonomi yang inklusif.

Dengan cara ini, Teori Pembangunan Manusia menyediakan kerangka kerja yang kaya untuk mendukung diplomasi Indonesia dalam menghadapi tantangan di Papua, menekankan pada peningkatan kehidupan manusia sebagai pusat dari stabilitas nasional dan internasional.

b. Teori Perlindungan Hak Asasi Manusia

Teori Perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan kerangka pemikiran yang sangat penting dalam studi hubungan internasional dan hukum internasional. Teori ini berfokus pada promosi dan perlindungan hak-hak dasar manusia, yang secara universal diakui melalui berbagai instrumen hukum internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, serta berbagai konvensi dan pakta internasional yang mengikutinya.

Salah satu ahli terkemuka dalam bidang ini adalah Jack Donnelly (2013) yang menguraikan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang inheren, universal, dan tidak dapat dicabut yang dimiliki setiap individu, tidak tergantung pada status hukum, ekonomi, atau kondisi politik mereka. Donnelly menegaskan bahwa negara-negara memiliki kewajiban hukum dan moral untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak ini. Hal

ini mencakup kewajiban untuk tidak melanggar hak-hak tersebut (*respect*), melindungi individu dari pelanggaran oleh pihak lain (*protect*), dan mengambil langkah aktif untuk memastikan bahwa individu dapat menikmati hak-hak mereka sepenuhnya (*fulfill*).

Teori ini juga membedah bagaimana komunitas internasional bisa terlibat dalam penegakan hak asasi manusia, termasuk melalui mekanisme seperti pengawasan, pelaporan, dan tekanan diplomatik, serta intervensi dalam kasus pelanggaran berat. Donnelly juga menyoroti peran penting dari lembaga-lembaga seperti Mahkamah Hak Asasi Manusia Internasional dan berbagai badan PBB yang khusus mengawasi pelaksanaan konvensi-konvensi hak asasi manusia.

Selanjutnya, dalam konteks implementasi, teori ini mengakui tantangan yang dihadapi negara-negara dalam memenuhi kewajiban-kewajiban ini, terutama dalam situasi konflik, ketegangan politik, atau keterbatasan ekonomi. Teori Perlindungan Hak Asasi Manusia menekankan pentingnya pembangunan kapasitas dan kerjasama internasional untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, serta pentingnya pemberdayaan masyarakat sipil dan kelompok hak asasi manusia untuk mengadvokasi dan memonitor pelaksanaan hak-hak tersebut.

Teori ini dapat membantu untuk menjelaskan upaya optimalisasi diplomasi Indonesia dalam internasionalisasi isu Papua untuk menjaga stabilitas nasional. *Pertama*, teori ini menawarkan kerangka kerja bagi Indonesia untuk memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang tidak hanya memenuhi kewajiban hukum internasional, tetapi juga memperkuat legitimasi negara di mata komunitas internasional dan masyarakatnya sendiri. Dengan aktif mengadvokasi perlindungan hak asasi manusia, Indonesia dapat menunjukkan komitmennya terhadap norma-norma global dan mengurangi kritik internasional.

Kedua, melalui diplomasi yang berfokus pada hak asasi manusia, Indonesia bisa lebih efektif dalam berdialog dan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga internasional dan negara-negara lain untuk mendapatkan dukungan dalam penanganan isu Papua, termasuk mendapatkan akses ke sumber daya, pelatihan, dan teknologi yang dapat

meningkatkan kemampuan lokal dalam mengelola konflik dan mengembangkan Papua.

Ketiga, dengan menempatkan hak asasi manusia sebagai pusat dalam strategi diplomasi, Indonesia dapat membangun narasi yang lebih positif yang menonjolkan upaya-upaya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Papua. Ini dapat membantu mengurangi tensi dan menciptakan dialog yang lebih produktif antara pemerintah dan masyarakat Papua, serta antara Indonesia dan komunitas internasional, yang pada akhirnya dapat mendukung stabilitas nasional yang lebih luas.

c. Teori Diplomasi Publik

Teori Diplomasi Publik merupakan sebuah pendekatan dalam hubungan internasional yang menekankan pada penggunaan alat-alat komunikasi dan informasi oleh sebuah negara untuk mempengaruhi opini publik asing dalam rangka mencapai tujuan kebijakan luar negerinya. Joseph Nye (2004) mengartikulasikan konsep "*soft power*" yang menjadi inti dari banyak strategi diplomasi publik. Menurut Nye, *soft power* adalah kemampuan untuk menarik, dibandingkan dengan "*hard power*" yang mengandalkan paksaan.

Dalam konteks diplomasi publik, *soft power* melibatkan pembentukan citra positif negara, penyebaran nilai-nilai budaya, politik, dan ideologis, serta pembinaan hubungan yang memungkinkan suatu negara untuk mempengaruhi aktor-aktor internasional lainnya dengan lebih efektif. Hal ini dicapai melalui berbagai saluran, termasuk media, pertukaran budaya dan pendidikan, serta program-program yang menargetkan masyarakat sipil dan pemimpin opini di negara lain.

Nicholas J. Cull (2008) memberikan kerangka kerja yang lebih detail tentang elemen-elemen utama diplomasi publik, yaitu: penyiaran informasi, kegiatan budaya, pertukaran pendidikan, pembangunan kapasitas dan pelatihan, serta diplomasi yang berfokus pada advokasi langsung kepada pemerintah negara lain. Cull menekankan pentingnya mendengarkan dalam diplomasi publik, yang mengacu pada pengumpulan dan analisis pandangan dan kebutuhan publik asing untuk memandu kebijakan dan strategi komunikasi yang lebih efektif.

Pendekatan ini menekankan pada peran negara sebagai pelaku yang aktif dalam mempengaruhi narasi global, mengelola persepsi internasional, dan mendukung kepentingan nasionalnya dalam forum global. Diplomasi publik menjadi sangat penting di era globalisasi, di mana batas antara urusan dalam negeri dan luar negeri menjadi semakin kabur dan persepsi atau opini publik menjadi semakin penting dalam mendukung atau menghambat tujuan kebijakan luar negeri.

Teori ini dapat membantu dalam menjawab rumusan masalah mengenai optimalisasi diplomasi Indonesia dalam internasionalisasi isu Papua untuk menjaga stabilitas nasional dalam beberapa hal. *Pertama*, Indonesia dapat menggunakan diplomasi publik untuk mengelola dan mempengaruhi narasi internasional seputar isu Papua, menekankan pada upaya dan kemajuan yang telah dilakukan dalam hal peningkatan hak asasi manusia, pembangunan ekonomi dan sosial, serta dialog dan rekonsiliasi. Dengan mengkomunikasikan ini secara efektif melalui media global dan forum internasional, Indonesia bisa membangun persepsi yang lebih positif dan mengurangi kritik internasional.

Kedua, melalui pertukaran budaya dan pendidikan, Indonesia bisa mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang keragaman dan kekayaan budaya Papua, serta memperkuat hubungan interpersonal antara masyarakat Papua dan dunia internasional, yang dapat mendukung jembatan-jembatan pemahaman dan mengurangi ketegangan.

Ketiga, dengan memfokuskan pada pembangunan kapasitas dan pelatihan, diplomasi publik Indonesia bisa meningkatkan keterampilan dan kapasitas masyarakat Papua dan pemimpin lokal, mendukung pembangunan yang lebih mandiri dan berkelanjutan di wilayah tersebut.

Keempat, Indonesia dapat menggunakan diplomasi publik untuk mempengaruhi dan bekerja sama dengan lembaga internasional dan negara-negara yang berpengaruh dalam mendukung inisiatif-inisiatif perdamaian dan pembangunan di Papua, menciptakan kerangka kerja multilateral yang lebih kondusif untuk penyelesaian masalah secara damai.

Dengan cara-cara ini, diplomasi publik bisa menjadi alat yang sangat berharga bagi Indonesia dalam mengatasi tantangan internasionalisasi isu Papua dan menjaga stabilitas nasional.

d. Teori Realisme dan Liberalisme

Teori Realisme dan Liberalisme adalah dua arus utama dalam studi hubungan internasional yang menawarkan pandangan yang berbeda tentang cara negara-negara berinteraksi di panggung global dan bagaimana kebijakan luar negeri harus dirancang. Teori Realisme, yang pandangannya banyak dipengaruhi oleh pemikiran Hans Morgenthau (1948) menekankan pada keamanan dan kekuasaan sebagai pusat politik internasional. Menurut Morgenthau dan realis lain seperti Kenneth Waltz, negara merupakan aktor rasional yang utama dalam politik internasional dan tindakan mereka didorong oleh keinginan untuk meningkatkan keamanan nasional dan kekuasaan relatif terhadap negara-negara lain. Realisme menganggap dunia sebagai sistem anarkis di mana tidak ada otoritas sentral yang mengatur tindakan negara-negara, sehingga membuat negara-negara selalu dalam keadaan waspada terhadap potensi ancaman dari negara lain. Dalam realisme, diplomasi sering digunakan sebagai alat untuk menjaga keseimbangan kekuatan dan mencegah dominasi oleh kekuatan lain.

Sebaliknya, dalam Teori Liberalisme ditawarkan pandangan yang lebih optimistis tentang kerja sama internasional. Teori ini, yang diartikulasikan oleh para pemikir seperti Immanuel Kant dan lebih modern oleh Robert Keohane dan Joseph Nye (1977) yang berpendapat bahwa organisasi dan aturan internasional dapat membantu mengurangi konflik dan meningkatkan kerja sama global. Liberalisme menekankan peran lembaga internasional, hukum internasional, dan norma-norma, serta interaksi ekonomi dan sosial sebagai faktor yang memperdalam ketergantungan antar negara, yang pada gilirannya dapat mempromosikan perdamaian dan stabilitas. Liberalisme percaya bahwa melalui kerja sama dan membangun institusi bersama, negara-negara dapat mengatasi masalah global dan menemukan solusi yang menguntungkan semua pihak.

Dalam konteks optimalisasi diplomasi Indonesia terhadap internasionalisasi isu Papua untuk menjaga stabilitas nasional, kedua teori ini dapat memberikan wawasan yang berharga:

- 1) Dari perspektif realisme, Indonesia akan menilai isu Papua terutama dari sudut pandang keamanan dan stabilitas nasional. Pendekatan realis akan mendorong Indonesia untuk mempertahankan kedaulatannya atas Papua, mengelola keseimbangan kekuasaan di kawasan Asia Tenggara, dan berhati-hati terhadap intervensi asing yang bisa mempengaruhi kestabilan domestik. Diplomasi dalam konteks ini akan digunakan untuk menegaskan posisi Indonesia dalam forum internasional dan mengelola hubungan bilateral dengan negara-negara yang mungkin mendukung atau menentang klaim kedaulatan Indonesia atas Papua.
- 2) Dari perspektif liberalisme, Indonesia akan melihat kerja sama internasional sebagai alat yang efektif untuk mengatasi tantangan di Papua. Ini bisa mencakup mempromosikan dialog dan rekonsiliasi melalui lembaga-lembaga seperti ASEAN atau PBB, serta menggunakan hukum internasional dan norma-norma global untuk memastikan bahwa pengelolaan isu Papua sejalan dengan standar hak asasi manusia internasional. Diplomasi liberal juga akan mencari dukungan internasional untuk inisiatif pembangunan di Papua, mempromosikan investasi dan bantuan yang dapat membantu meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi di wilayah tersebut.

Dengan menggunakan kedua perspektif ini, Indonesia dapat merumuskan strategi diplomasi yang seimbang, mengakui kebutuhan untuk mengamankan kepentingan nasionalnya sambil juga melibatkan komunitas internasional untuk mendukung pembangunan dan stabilitas di Papua. Dengan menggabungkan pendekatan realisme dan liberalisme, Indonesia dapat lebih efektif dalam menavigasi dinamika internasional yang rumit sekaligus menjaga stabilitas nasional.

e. Teori Resolusi Konflik

Teori Resolusi Konflik mengeksplorasi berbagai metode dan pendekatan untuk menyelesaikan konflik secara damai dan konstruktif.

Salah satu ahli terkemuka dalam bidang ini adalah Johan Galtung yang dianggap sebagai bapak pendekatan modern terhadap studi perdamaian dan konflik. Dalam bukunya "*Peace by Peaceful Means*," (Galtung, 1996) Galtung memperkenalkan konsep "*peacebuilding*" yang melibatkan menciptakan kondisi yang mencegah konflik menjadi kekerasan. Ia membedakan antara "*peacekeeping*" (pemeliharaan perdamaian), "*peacemaking*" (pembuatan perdamaian), dan "*peacebuilding*" (pembangunan perdamaian) yang semuanya adalah elemen penting dalam resolusi konflik.

Galtung juga menekankan pada pentingnya memahami "*triangular conflict model*" yang terdiri dari kontradiksi (perbedaan dalam tujuan antara dua pihak), sikap (persepsi dan prasangka), dan perilaku (aksi yang nyata yang merugikan pihak lain). Menurutnya, resolusi konflik harus menangani semua aspek ini untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Galtung juga mengusulkan pendekatan "transformasi konflik" yaitu proses di mana konflik yang destruktif diubah menjadi interaksi yang konstruktif melalui perubahan persepsi, sikap, dan perilaku.

Seorang ahli lain, John Paul Lederach (2005) menawarkan pendekatan yang lebih holistik dan kreatif terhadap resolusi konflik. Lederach berargumen bahwa efektivitas jangka panjang dalam resolusi konflik bergantung pada kemampuan para pihak konflik untuk masuk ke dalam hubungan yang memungkinkan munculnya solusi kreatif. Ia menekankan pentingnya membangun jaringan antar individu dan kelompok di semua tingkat masyarakat untuk merumuskan solusi yang berkelanjutan dan inklusif.

Pendekatan ini mengakui bahwa konflik sering kali merupakan manifestasi dari masalah struktural dalam masyarakat, seperti ketidakadilan sosial, ketidaksetaraan ekonomi, dan penindasan politik. Oleh karena itu, resolusi konflik bukan hanya tentang menyelesaikan perselisihan tetapi juga tentang mengubah kondisi yang menciptakan dan memperburuk konflik tersebut.

Penerapan teori resolusi konflik dalam konteks optimalisasi diplomasi Indonesia dalam internasionalisasi isu Papua untuk menjaga stabilitas

nasional bisa sangat efektif. *Pertama*, teori ini dapat membantu pemerintah Indonesia dalam mengidentifikasi dan memahami akar penyebab konflik di Papua, yang meliputi masalah politik, ekonomi, dan sosial. Dengan pemahaman ini, diplomasi Indonesia dapat dirancang untuk tidak hanya menanggapi gejala konflik tetapi juga menyasar penyebab utamanya.

Kedua, pendekatan resolusi konflik dapat membantu Indonesia dalam merumuskan strategi yang lebih inklusif dan partisipatif dalam menangani isu Papua. Ini termasuk melibatkan pemangku kepentingan lokal, kelompok masyarakat sipil, dan pemimpin adat dalam dialog dan keputusan yang mempengaruhi masa depan mereka. Pendekatan semacam ini dapat membangun kepercayaan dan legitimasi, serta mengurangi perasaan alienasi dan resistensi dari masyarakat Papua.

Ketiga, dalam konteks internasional, memperlihatkan komitmen terhadap resolusi konflik yang konstruktif dapat meningkatkan citra Indonesia di mata dunia. Ini termasuk berkomunikasi secara terbuka tentang langkah-langkah yang diambil untuk menangani isu hak asasi manusia dan pembangunan sosial di Papua, serta bekerja sama dengan lembaga internasional dan negara lain untuk mendukung inisiatif perdamaian.

Dengan mengadopsi dan mengintegrasikan prinsip-prinsip teori resolusi konflik ke dalam diplomasi publiknya, Indonesia tidak hanya dapat mengoptimalkan pendekatannya dalam menangani isu Papua tetapi juga memperkuat stabilitas nasional melalui pendekatan yang lebih adil dan damai.

11. Lingkungan Strategis

a. Global

Internasionalisasi isu Papua merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh dinamika lanskap geopolitik dunia. Kondisi geopolitik yang mempengaruhi fenomena ini mempunyai banyak aspek, melibatkan dinamika regional, permainan kekuatan global, dan berkembangnya peran organisasi internasional dan media sosial. Kondisi ini membentuk upaya diplomasi Indonesia dalam mengatasi berbagai aspek permasalahan ini,

termasuk perlindungan hak asasi manusia (HAM), pembangunan manusia, dan komunikasi internasional.

Internasionalisasi isu Papua sering kali dikaitkan dengan laporan pelanggaran HAM. Negara-negara di Pasifik, seperti Vanuatu dan beberapa organisasi non-pemerintah, telah secara aktif menyoroti situasi HAM di Papua, mendorong Indonesia untuk meningkatkan standar HAM dan memperkuat diplomasi HAM (Korwa, 2021). Selain itu, laporan-laporan pelanggaran hak asasi manusia telah menarik perhatian berbagai negara dan badan-badan internasional, sehingga diperlukan adanya transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar (Wayar & Blades, 2022). Upaya diplomasi Indonesia dalam konteks ini melibatkan penjelasan langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah, seperti implementasi otonomi khusus dan dialog dengan masyarakat Papua, untuk menunjukkan komitmennya terhadap peningkatan HAM (Bonasir, 2019). Upaya diplomasi Indonesia juga ditujukan sebagai kontra narasi tersebut dengan menyoroti komitmen Indonesia untuk meningkatkan kondisi hak asasi manusia di Papua. Namun, efektivitas upaya-upaya ini sering dipertanyakan, mengingat banyaknya laporan pelanggaran HAM (HRW, n.d.; HRM, 2023).

Dalam aspek pembangunan manusia, Indonesia telah berupaya untuk menunjukkan kemajuan di Papua melalui berbagai program pembangunan. Indonesia telah menekankan pembangunan ekonomi sebagai solusi terhadap permasalahan Papua, berinvestasi pada infrastruktur dan layanan publik untuk meningkatkan standar hidup (APR Editor, 2024). Sejalan dengan hal itu, strategi diplomasi Indonesia mencakup partisipasi dalam organisasi internasional dan kerja sama pembangunan dengan negara-negara donor untuk mendukung inisiatif pembangunan di Papua (Tobing, 2024). Namun, tantangan tetap ada karena gerakan pro-kemerdekaan Papua terus menginternasionalisasi isu dengan menyoroti ketidaksetaraan dan kebutuhan pembangunan yang lebih inklusif (Humairoh, 2018). Bahkan upaya tersebut dianggap belum cukup mengatasi permasalahan mendasar yaitu kesenjangan dan kurangnya kebebasan politik (Wayar & Blades, 2022). Internasionalisasi

isu Papua dalam aspek ini dipicu oleh adanya kesenjangan antara agenda pembangunan Indonesia dan aspirasi masyarakat Papua untuk otonomi yang lebih besar dan pengakuan atas hak-hak mereka (Blades, 2020).

Peran komunikasi internasional sangat penting dalam membentuk wacana seputar isu Papua. Dalam aspek komunikasi internasional, Indonesia menghadapi tantangan dalam menyampaikan narasi yang efektif tentang Papua di forum internasional. Upaya internasionalisasi oleh kelompok-kelompok pendukung Papua Merdeka telah memanfaatkan media sosial dan kampanye internasional untuk menarik simpati dan dukungan, sementara Indonesia berupaya untuk mempromosikan perspektifnya mengenai pembangunan dan persatuan (Bonasir, 2019; Lantang & Tambunan, 2020). Benturan narasi telah mempersulit hubungan diplomatik Indonesia, khususnya dengan negara-negara Pasifik yang memiliki ikatan etnis dan budaya yang sama dengan penduduk Papua (Wanggae, 2016; Darmawan, 2022).

Respons Indonesia terhadap internasionalisasi isu Papua melibatkan kombinasi klaim kedaulatan yang bersifat defensif dan keterlibatan proaktif dengan komunitas internasional. Hal ini mencakup partisipasi dalam forum internasional dan diplomasi ekonomi (Tobing, 2024). Selain itu, Indonesia juga telah memperkuat diplomasi publiknya, termasuk melalui diplomasi budaya dan pendidikan, untuk membangun pemahaman yang lebih baik tentang situasi di Papua dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk memperbaiki kondisi di sana (Sabir, 2018).

b. Regional

Kawasan Indo-Pasifik, sebuah kerangka konseptual yang membentang dari pantai Afrika Timur hingga negara-negara Kepulauan Pasifik, telah muncul sebagai arena persaingan dan kerja sama strategis. Ini adalah ruang di mana kepentingan negara-negara besar saling bersinggungan, dan di mana para pemain regional berusaha untuk menegaskan otonomi dan pengaruh mereka. Asia Tenggara, yang terletak di Indo-Pasifik, mempunyai wilayah yang sangat penting karena rute maritimnya yang strategis, sumber daya alam, dan potensi ekonominya.

Isu internasionalisasi Papua tidak bisa dilepaskan dari pengaruh besar negara-negara besar di kawasan, terutama Amerika Serikat dan Tiongkok. *U.S. Indo-Pacific Strategy*, yang bertujuan untuk mendorong Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, memandang Indonesia, termasuk provinsi-provinsi paling timurnya, sebagai wilayah yang sangat penting untuk memastikan stabilitas dan kemajuan kawasan. Amerika Serikat mempunyai kepentingan ekonomi di wilayah tersebut, seperti investasi Freeport dan produksi pertambangan di Papua, yang semakin memperkuat keterlibatan AS dalam urusan di wilayah tersebut (Liwe, 2019).

Tiongkok, di sisi lain, telah memperluas pengaruh globalnya melalui *Belt and Road Initiative* yang berfokus pada pembangunan infrastruktur dan investasi. Keselarasan Indonesia dengan strategi pembangunan Tiongkok, karena prioritas infrastrukturnya, menciptakan hubungan simbiosis antara kedua negara. Oleh karena itu, sikap Tiongkok terhadap isu Papua kemungkinan besar dipengaruhi oleh kepentingan strategis dan ekonomi Tiongkok di Indonesia, termasuk tidak mengganggu mitra utama Tiongkok dalam ekspansi global mereka (Liwe, 2019).

Internasionalisasi permasalahan hak asasi manusia di Papua telah menjadi tantangan yang terus-menerus bagi Indonesia. Isu pelanggaran hak asasi manusia telah mendapat perhatian dari badan-badan internasional dan organisasi non-pemerintah yang menginginkan Indonesia untuk menunjukkan komitmennya terhadap standar hak asasi manusia (Lantang & Tambunan, 2020; Bakhshi, 2021). Penekanan kawasan Indo-Pasifik terhadap hak asasi manusia, ditambah dengan advokasi negara-negara Kepulauan Pasifik, telah memaksa Indonesia untuk melaksanakan diplomasi yang lebih proaktif untuk mengatasi permasalahan ini.

Meskipun demikian, permasalahan hak asasi manusia ini tampak tidak membuat komunitas internasional bergeming. Setidaknya demikian yang ditunjukkan oleh Amerika Serikat, Tiongkok, dan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Sikap demikian disebabkan oleh posisi strategis Indonesia di Indo-Pasifik. Sebagai negara kepulauan terbesar, terletak di antara Samudera Pasifik dan Hindia, dan sebagai salah satu pendiri ASEAN, Indonesia memiliki pengaruh besar dalam

pengambilan kebijakan regional. *Outlook ASEAN* mengenai Indo-Pasifik, yang didukung oleh seluruh negara anggota, memberikan contoh peran Indonesia dalam membentuk arsitektur regional yang inklusif (Liwe, 2019).

Signifikansi geopolitik Indonesia, ditambah dengan kepentingan ekonomi dan strategis negara-negara besar di wilayah ini, berkontribusi pada lemahnya tanggapan internasional terhadap isu provinsi Papua. Perhitungan strategis negara-negara ini sering kali memprioritaskan stabilitas dan status quo dibandingkan pembelaan hak asasi manusia atau penentuan nasib sendiri, yang berpotensi mengganggu stabilitas kawasan yang penuh dengan persaingan klaim dan sensitivitas. Selain itu, blok ASEAN, yang dikenal dengan prinsip non-intervensi, secara historis menahan diri untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara-negara anggotanya, termasuk situasi di Papua. Sikap ini mencerminkan keinginan kawasan untuk menjaga keharmonisan dan persatuan (Liwe, 2019).

Internasionalisasi isu provinsi Papua juga dipengaruhi oleh narasi global seputar hak asasi manusia dan penentuan nasib sendiri. Meskipun nilai-nilai ini didukung oleh banyak negara, *realpolitik* hubungan internasional sering kali mengarah pada pendekatan selektif dalam penerapannya.

c. Nasional

1) Aspek Politik

Kondisi politik dalam negeri Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap internasionalisasi isu Papua. Salah satu aspek yang berperan adalah implementasi Otonomi Khusus (Otsus) di Papua, yang bertujuan untuk memberikan kewenangan lebih luas kepada masyarakat Papua dalam mengelola sumber daya dan pembangunan daerahnya. Namun, banyak pihak berpendapat bahwa Otonomi Khusus belum berhasil membawa perubahan signifikan yang diharapkan, baik dalam peningkatan kesejahteraan maupun dalam pemberdayaan politik lokal (Korwa, 2021).

Selain itu, isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 sering menjadi isu politik dalam diskusi internasional. Negara-negara Pasifik, seperti

Vanuatu dan negara-negara anggota *Melanesian Spearhead Group* (MSG), secara aktif menyuarakan kekhawatiran mereka atas situasi HAM di Papua dan mendukung aspirasi kemerdekaan Papua di forum internasional (Bayuseno & Windiani, 2020).

2) Aspek Ekonomi

Kondisi ekonomi Indonesia memiliki peran penting dalam internasionalisasi isu Papua. Faktor ekonomi seperti ketimpangan pembangunan dan investasi yang tidak merata antara wilayah barat dan timur Indonesia, termasuk Papua, sering menjadi sorotan dalam diskusi internasional mengenai Papua. Misalnya, proyek infrastruktur besar seperti jalan Trans-Papua, yang bertujuan meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di Papua, telah menarik perhatian internasional terhadap upaya Indonesia dalam mengintegrasikan Papua secara ekonomi dan sosial (Korwa, 2021).

Selain itu, implementasi otonomi khusus di Papua, yang telah memberikan kesempatan lebih besar bagi penduduk lokal untuk belum memberikan kemajuan bagi Papua. Sehingga, banyak pihak berpendapat bahwa Otonomi Khusus yang diberikan belum berhasil membawa perubahan signifikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat Papua, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pandangan internasional terhadap situasi di Papua (Korwa, 2021).

3) Aspek Sosial Budaya

Kondisi sosial budaya Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap internasionalisasi isu Papua. Diversitas etnis dan budaya di Papua, yang mencakup lebih dari 250 suku dan berbagai bahasa, merupakan salah satu aspek yang sering dibahas dalam konteks hak asasi manusia dan identitas lokal. Isu-isu seperti marginalisasi budaya, pendidikan, dan bahasa asli Papua sering menjadi fokus dalam diskusi internasional mengenai hak-hak masyarakat adat dan upaya pelestarian budaya (Korwa, 2021). Berikutnya, ada kekhawatiran bahwa asimilasi budaya dan pengabaian terhadap tradisi lokal dapat mengarah pada hilangnya identitas budaya Papua (FISIP UI, 2018).

4) Aspek Pertahanan dan Keamanan

Kondisi pertahanan dan keamanan dalam negeri Indonesia memegang peranan krusial dalam internasionalisasi isu Papua. Konflik di Tanah Papua, yang melibatkan isu pemisahan diri dan eksistensi 'Organisasi Papua Merdeka' telah menarik perhatian internasional terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan legalitas Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah tertentu, seperti penerapan label separatis terhadap kelompok bersenjata, yang menimbulkan reaksi dari komunitas internasional, khususnya negara-negara Pasifik yang secara vokal menyuarakan kekhawatiran mereka atas situasi HAM di Papua (Korwa, 2021).

Pendekatan keamanan yang berbasis pada peningkatan kehadiran aparat keamanan (TNI dan Polri) untuk menindak kelompok separatis bersenjata telah menyebabkan peningkatan jumlah korban, baik dari pihak aparat, kelompok bersenjata, maupun warga sipil. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih humanis dan menyentuh akar penyebab konflik diperlukan untuk mengurangi ketegangan dan memperbaiki citra Indonesia di mata internasional (Chairil & Sadi, 2020).

Selain itu, konflik yang berkepanjangan dan belum terselesaikan ini seringkali dianggap sebagai 'bom waktu' yang dapat meledak kapan saja, menambah kompleksitas dalam upaya pemerintah untuk mencari resolusi yang tepat. Internasionalisasi isu Papua juga dipengaruhi oleh aktor non-negara, seperti gereja Pasifik, media daring, dan *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP), yang menggunakan platform internasional untuk mengkampanyekan ketidakadilan yang diterima masyarakat Papua dan mempromosikan upaya pembebasan Papua (Hadi R. P., 2016).

BAB III

PEMBAHASAN

12. Umum

Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan dinamika geopolitik, diplomasi Indonesia memegang peranan penting dalam mempertahankan stabilitas nasional, khususnya terkait isu Papua. Kerangka teoritis yang telah dijelaskan pada Bab II akan menjadi landasan dalam membedah tiga aspek utama dalam diplomasi terkait isu Papua: pembangunan manusia, perlindungan hak asasi manusia, dan komunikasi internasional.

Pembahasan pertama adalah bagaimana kondisi diplomasi Indonesia dalam internasionalisasi isu Papua saat ini pada aspek pembangunan manusia dapat menjaga stabilitas nasional. Aspek ini sangat krusial mengingat pembangunan manusia yang inklusif dan berkelanjutan menjadi indikator penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua. Melalui kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) dan berbagai inisiatif pendidikan serta kesehatan, Indonesia berupaya menunjukkan kepada dunia komitmennya dalam mengembangkan Papua.

Selanjutnya pada aspek perlindungan hak asasi manusia. Isu hak asasi manusia sering menjadi fokus kritik internasional terhadap kebijakan Indonesia di Papua. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana diplomasi Indonesia dapat mempromosikan perlindungan hak asasi manusia di Papua sekaligus meredam kritik internasional.

Pada aspek komunikasi internasional. Komunikasi yang efektif dengan komunitas internasional merupakan kunci dalam membentuk persepsi global dan meraih dukungan terhadap kebijakan Indonesia di Papua. Dengan memanfaatkan berbagai platform komunikasi dan forum internasional, Indonesia berupaya menyampaikan narasi positif mengenai upaya pembangunan dan stabilitas di Papua.

Pada pembahasan ini akan mengidentifikasi langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk memperkuat diplomasi Indonesia dan menelaah kebijakan, program, dan pendekatan yang telah diimplementasikan serta bagaimana hal-hal tersebut dapat ditingkatkan melalui langkah strategis diplomasi yang efektif.

Melalui analisis yang komprehensif ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai langkah strategis optimalisasi diplomasi Indonesia dalam menghadapi isu Papua di kancah internasional, yang pada akhirnya bertujuan dapat menjaga dan meningkatkan stabilitas nasional.

13. Kondisi Diplomasi Indonesia dalam Mengatasi Internasionalisasi Papua Saat Ini

Papua merupakan wilayah yang terus menjadi perhatian dalam kebijakan domestik dan diplomasi internasional Indonesia. Isu Papua telah berkembang menjadi tantangan yang kompleks, melibatkan berbagai aspek seperti pembangunan manusia, perlindungan hak asasi manusia (HAM), dan komunikasi internasional. Diplomasi Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kedaulatan dan stabilitas nasional di tengah sorotan serta tekanan dari komunitas internasional yang terus berkembang. Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai strategi diplomasi yang berfokus pada tiga aspek utama: pembangunan manusia, perlindungan HAM, dan komunikasi internasional. Masing-masing aspek ini saling terkait dan membutuhkan pendekatan yang komprehensif serta multifaset untuk dapat mengatasi masalah Papua secara efektif.

a. Pembangunan Manusia di Papua sebagai Upaya Diplomasi

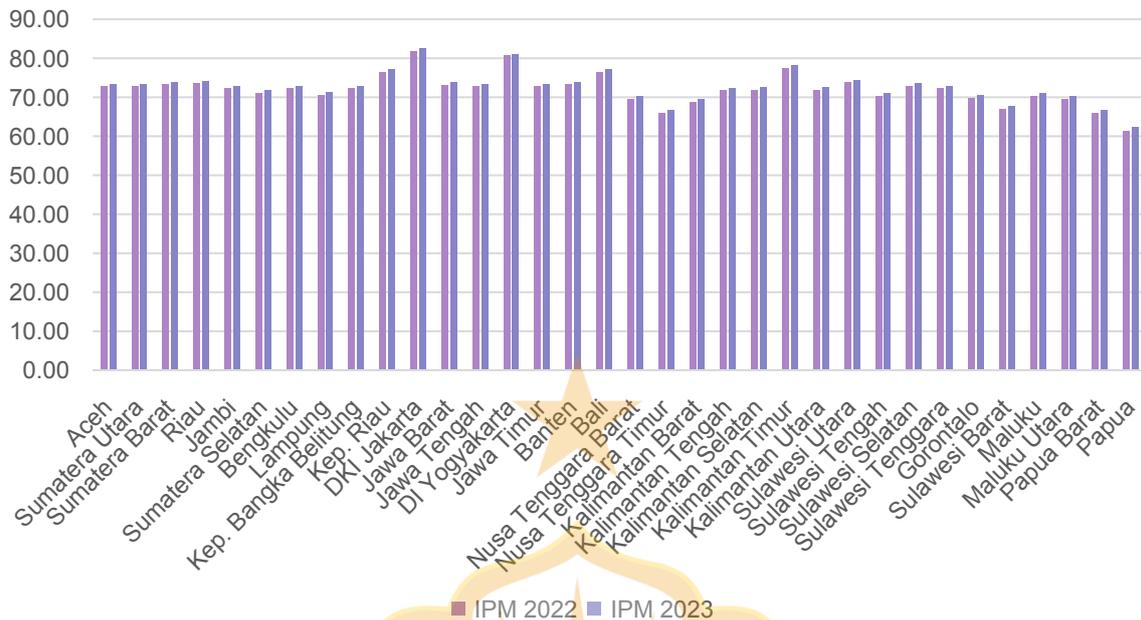
Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam upaya internasionalisasi isu Papua, terutama dalam aspek pembangunan manusia. Diplomasi Indonesia dalam menangani isu ini seringkali menghadapi tekanan dari komunitas internasional yang menyoroti masalah-masalah seperti pelanggaran HAM dan ketidaksetaraan pembangunan. Dalam konteks ini, diplomasi Indonesia bertujuan untuk menegaskan kedaulatan dan komitmennya terhadap pembangunan manusia di Papua. Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah strategis untuk memperkuat citra dan posisi Indonesia di mata dunia internasional, terutama dalam hal pembangunan manusia di Papua.

Salah satu strategi utama yang diambil oleh Indonesia adalah penekanan pada otonomi khusus sebagai solusi politik yang inklusif untuk

Papua. Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, yang disahkan pada tahun 2001 dan kemudian diperbaharui dengan UU Nomor 2 Tahun 2021, dirancang untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah Papua dalam mengelola sumber daya mereka sendiri dan mengembangkan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan lokal (Krisdamarjati, 2023; Budiatri, 2020). Melalui diplomasi ini, Indonesia berusaha menunjukkan bahwa otonomi khusus merupakan upaya nyata untuk mengatasi ketidakadilan historis dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua. Otonomi khusus di Papua juga mencakup desentralisasi asimetris yang memberikan kewenangan khusus kepada pemerintah daerah untuk mengelola pembangunan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal (Sumito, 2024). Kebijakan ini diharapkan dapat mengatasi masalah hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta memperkuat keutuhan NKRI.

Namun, meskipun ada peningkatan alokasi dana otonomi khusus yang signifikan, dampaknya terhadap pembangunan manusia di Papua masih terbatas. Papua tetap menjadi provinsi dengan indeks pembangunan manusia (IPM) terendah di Indonesia, meskipun dana otonomi khusus telah disalurkan untuk meningkatkan sektor pendidikan dan kesehatan (Afaia et al., 2023; Hergianasari et al., 2022). Kesenjangan ini sering menjadi fokus perhatian internasional, yang menganggap Indonesia belum maksimal dalam melakukan pembangunan di Papua. Kegagalan ini menimbulkan kritik terhadap efektivitas kebijakan otonomi khusus, terutama dalam hal penggunaannya yang tidak optimal dan adanya korupsi serta mismanajemen dana (Sianipar & Somantri, 2022; Hasibuan, 2022). Hal diatas dapat digambarkan dalam diagram dibawah ini.

Gambar 8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) per Provinsi, 2022-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik.

Untuk merespons kritik ini, diplomasi Indonesia berusaha mempromosikan keberhasilan dan upaya positif yang telah dilakukan di Papua. Pemerintah sering mengajak perwakilan asing untuk mengunjungi Papua dan melihat langsung proyek-proyek pembangunan yang didanai oleh Dana Otonomi Khusus (Indonesia, 2022; Lantang & Tambunan, 2020). Kunjungan ini bertujuan untuk menunjukkan kepada komunitas internasional bahwa Indonesia serius dalam menangani masalah pembangunan di Papua dan berkomitmen untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat Papua. Selain itu, diplomasi Indonesia juga menekankan pentingnya otonomi khusus sebagai kerangka kerja yang dapat memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Papua, termasuk dalam hal ketidaksetaraan pembangunan dan distribusi sumber daya.

Namun, di samping keberhasilan yang telah dicapai, tantangan internal seperti korupsi dan mismanajemen dana tetap menjadi penghalang signifikan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dana otonomi khusus sering disalahgunakan, yang mengakibatkan kurangnya dampak nyata pada kesejahteraan masyarakat Papua (Sianipar & Somantri, 2022; Hasibuan, 2022). Mismanajemen ini tidak hanya merugikan masyarakat

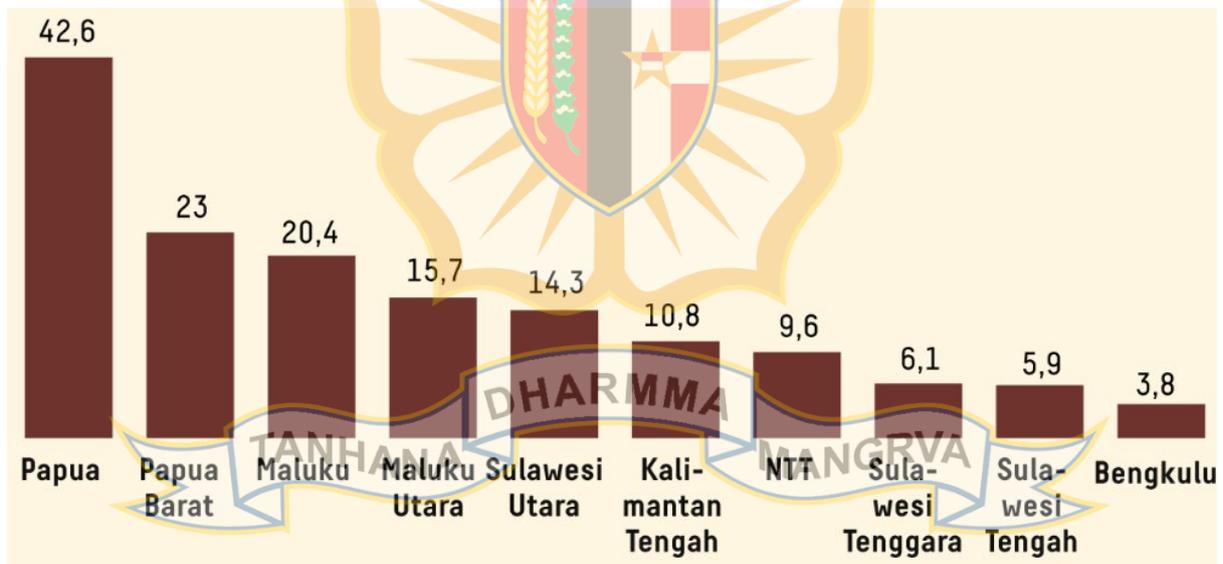
Papua tetapi juga memperburuk persepsi internasional tentang efektivitas upaya Indonesia dalam meningkatkan kondisi di Papua. Oleh karena itu, reformasi internal dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana otonomi khusus menjadi agenda penting dalam diplomasi Indonesia. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana ini harus diperkuat agar program pembangunan dapat berjalan dengan lebih efektif dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Papua.

Selain itu, aspek pendidikan juga menjadi fokus utama dalam upaya diplomasi Indonesia terkait pembangunan manusia di Papua. Pemerintah telah berupaya meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Papua melalui berbagai program beasiswa dan kerjasama dengan institusi pendidikan ternama (Hergianasari et al., 2022). Misalnya, kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada dalam program pengiriman guru dan beasiswa bagi siswa asli Papua bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan sumber daya manusia yang kompeten di Papua (Indonesia, 2022). Pendidikan di Papua tidak hanya dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga sebagai alat penting dalam memperkuat rasa kesatuan dan keutuhan nasional. Dengan meningkatkan pendidikan, pemerintah Indonesia berharap dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada di Papua, serta memperkuat integrasi Papua ke dalam NKRI.

Namun, tantangan utama dalam meningkatkan pendidikan di Papua adalah infrastruktur yang terbatas dan konflik yang berkepanjangan. Meskipun ada upaya untuk membangun lebih banyak sekolah dan fasilitas pendidikan, khususnya di pedalaman Papua yang masih sulit dijangkau, kondisi ini belum berjalan dengan maksimal. Hal ini sering dijadikan argumen oleh pihak-pihak yang mengkritik kebijakan Indonesia di Papua, yang menyoroti kurangnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas sebagai salah satu faktor penyebab ketidakpuasan di kalangan masyarakat Papua (Perkasa, 2023). Dalam merespon hal ini, Indonesia berusaha menunjukkan komitmen terhadap pembangunan infrastruktur yang lebih baik di Papua sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua (Katingka, 2023).

Selain pendidikan, kesehatan juga merupakan fokus utama dalam diplomasi pembangunan manusia di Papua. Data menunjukkan bahwa akses terhadap layanan kesehatan di Papua masih sangat terbatas dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia (Tjolli et al., 2021). Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan dana khusus untuk pembangunan fasilitas kesehatan dan pengiriman tenaga medis ke daerah-daerah terpencil di Papua. Dalam forum internasional, Indonesia sering menyoroti program-program ini sebagai bukti komitmennya terhadap peningkatan kondisi kesehatan masyarakat Papua. Misalnya, pemerintah telah mengirimkan tenaga medis ke daerah-daerah yang sulit dijangkau untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat Papua mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai (Indonesia, 2022). Dibawah ini akan di sajikan data persentase jumlah tenaga kesehatan tiap wilayah yang berkaitan dengan upaya peningkatan layanan kesehatan.

Gambar 9. 10 Daerah dengan Persentase Puskesmas Tanpa Dokter Tertinggi, 2021



Sumber: Indraswari, D. L. (2023). "Masih Timpangnya Distribusi Tenaga Kesehatan di Indonesia."

Namun, berbagai laporan penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat Papua merasakan manfaat dari program-program ini. Misalnya, angka kematian ibu dan anak di Papua masih tinggi, dan prevalensi penyakit seperti malaria dan tuberculosis masih menjadi masalah serius (Zumaeroh et al., 2023; Theodora, 2023). Tantangan ini memerlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan dalam

kebijakan kesehatan, yang sering diangkat dalam diplomasi Indonesia sebagai komitmen jangka panjang terhadap pembangunan manusia di Papua. Pemerintah Indonesia juga perlu bekerja sama dengan organisasi internasional dan negara-negara sahabat untuk memastikan bahwa program-program kesehatan ini dapat berjalan dengan efektif dan mencapai hasil yang diinginkan.

Untuk menghadapi kritik internasional, diplomasi Indonesia juga berupaya meningkatkan kerjasama dengan organisasi internasional dan negara-negara sahabat untuk membawa program-program pembangunan yang inovatif dan berkelanjutan ke Papua (Krisdamarjati, 2023). Misalnya, kerjasama dengan organisasi non-pemerintah internasional dalam program kesehatan dan pendidikan bertujuan untuk mengisi kesenjangan yang ada dan memastikan bahwa bantuan internasional dapat disalurkan dengan efektif. Hal ini juga membantu meningkatkan citra Indonesia di mata dunia sebagai negara yang bertanggung jawab dan berkomitmen terhadap pembangunan manusia.

b. Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Diplomasi Papua

Diplomasi Indonesia dalam internasionalisasi isu Papua terkait perlindungan hak asasi manusia merupakan topik yang kompleks dan multidimensi, melibatkan berbagai aspek politik, hukum, dan sosial. Sejak integrasi Papua ke dalam Indonesia, isu diskriminasi, ketidakadilan ekonomi, dan pelanggaran HAM telah menjadi sumber ketegangan yang berkepanjangan. Pemerintah Indonesia telah menerapkan pendekatan dual strategi, yang menggabungkan upaya peningkatan kesejahteraan dan keamanan di Papua, serta berusaha memfasilitasi akses terhadap hak-hak dasar masyarakat Papua dalam kerangka pembangunan yang sesuai dengan kearifan lokal atau dikenal dengan istilah etno-pembangunan (Hadi, 2021).

Pada tataran internasional, Indonesia menghadapi tantangan dari berbagai organisasi dan negara yang mendukung gerakan kemerdekaan Papua, seperti *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP). ULMWP telah berusaha mendapatkan pengakuan internasional melalui pendekatan diplomasi dan kampanye isu HAM, dengan klaim bahwa status

mereka sebagai insurgen telah mencapai tahap belligerent, yang menurut hukum internasional, memberi mereka hak untuk menuntut dukungan internasional untuk kemerdekaan (Rahim & Timur, 2021). Dalam menanggapi tekanan internasional ini, Indonesia menggunakan prinsip non-intervensi dan menekankan pentingnya kedaulatan negara. Namun, prinsip ini mulai mengalami pergeseran dengan hadirnya konsep *Responsibility to Protect* (R2P) yang memungkinkan intervensi internasional dalam kasus pelanggaran HAM berat (Rahim & Timur, 2021).

Indonesia telah menonjolkan langkah-langkah konkret yang telah diambil untuk memperbaiki kondisi di Papua. Pemerintah, misalnya, telah melibatkan lebih banyak putra daerah dalam posisi-posisi pemerintahan dan mempercepat pembangunan infrastruktur di Papua (Berlianto, 2023). Langkah-langkah ini menunjukkan kepada komunitas internasional bahwa Indonesia serius dalam menangani masalah di Papua dan berkomitmen untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat Papua. Dalam menghadapi tekanan internasional, diplomasi Indonesia juga berusaha menonjolkan upaya pemerintah dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan menggelar berbagai investigasi dan penyelidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM, serta mengambil langkah-langkah hukum yang tegas terhadap pelaku pelanggaran (Indonesia, 2022).

Namun, tantangan tetap ada. ULMWP dan kelompok-kelompok lain terus menggunakan platform internasional untuk menggalang dukungan dan menyebarkan narasi pelanggaran HAM di Papua. Mereka menggunakan diplomasi digital dan media sosial untuk menyebarkan pesan mereka secara luas dan efektif, yang memungkinkan mereka menjangkau audiens global dan mendapatkan dukungan dari berbagai negara dan organisasi internasional (Sagala & Baskoro, 2023). Selain itu, dukungan bagi ULMWP juga datang dari berbagai anggota parlemen dan organisasi non-pemerintah di negara-negara seperti Vanuatu dan Kepulauan Solomon yang memainkan peran aktif dalam mendukung gerakan kemerdekaan Papua. Vanuatu, khususnya, telah menjadi pendukung vokal di forum-forum internasional seperti Perserikatan

Bangsa-Bangsa (PBB), menyerukan investigasi internasional terhadap pelanggaran HAM di Papua dan mendukung hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat. Vanuatu bahkan menyediakan fasilitas fisik untuk kantor ULMWP di Port Vila (Wikipedia contributors, 2024).

Dukungan ini tidak hanya datang dari negara-negara di kawasan Pasifik, tetapi juga dari berbagai anggota parlemen dan organisasi non-pemerintah di negara-negara Barat. Misalnya, anggota Parlemen Eropa telah menyuarakan dukungan mereka untuk hak penentuan nasib sendiri bagi Papua Barat. Acara di parlemen Inggris yang dihadiri oleh Presiden sementara ULMWP, Benny Wenda, menyoroti pelanggaran HAM oleh pemerintah Indonesia, menggalang simpati dan dukungan politik dari beberapa anggota parlemen Inggris dan Eropa lainnya (Lundström, 2021). Di Australia, meskipun pemerintah secara resmi mendukung kedaulatan Indonesia atas Papua, berbagai organisasi masyarakat sipil dan LSM secara aktif mendukung ULMWP. Namun, dukungan ini sering kali terhalang oleh keinginan pemerintah Australia untuk menjaga hubungan baik dengan Indonesia demi kepentingan keamanan dan ekonomi (APR Editor, 2023).

Dalam menghadapi tantangan ini, Indonesia berpartisipasi aktif dalam forum-forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyampaikan perkembangan terbaru mengenai Papua. Dalam forum tersebut, pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam menangani isu HAM di Papua dan menunjukkan bahwa isu Papua adalah masalah domestik yang memerlukan pendekatan yang komprehensif dan inklusif (Anwar, 2021). Pendekatan diplomasi Indonesia juga mencakup upaya untuk meningkatkan pemahaman global tentang kompleksitas isu Papua, misalnya dengan mengajak delegasi internasional untuk mengunjungi Papua dan melihat langsung kondisi di lapangan (Lantang & Tambunan, 2020). Langkah ini bertujuan untuk mengurangi misinformasi dan membangun narasi yang lebih seimbang mengenai situasi di Papua.

Selain itu, Indonesia juga telah berupaya untuk melibatkan aktor-aktor non-pemerintah dalam diplomasi internasionalnya. Melalui diplomasi jalur dua (track two diplomacy), organisasi masyarakat sipil, akademisi,

dan lembaga penelitian diundang untuk memberikan perspektif mereka mengenai isu Papua dalam berbagai forum internasional. Upaya ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia tidak bekerja sendiri dalam menangani isu Papua, tetapi melibatkan berbagai pihak untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan (Moningkey et al., 2023; Pugu & Buiney, 2022). Dalam menghadapi tekanan internasional ini, diplomasi Indonesia berusaha membangun narasi bahwa Papua adalah bagian yang sah dari Indonesia dan bahwa isu-isu yang muncul di Papua dapat diselesaikan secara damai melalui dialog dan kerjasama internasional.

Selain fokus pada diplomasi politik, Indonesia juga memperkuat hukum dan regulasi domestik untuk memastikan perlindungan HAM di Papua. Pemerintah telah mengadopsi berbagai kebijakan dan program yang bertujuan untuk mengurangi diskriminasi dan meningkatkan akses terhadap layanan dasar bagi masyarakat Papua (Berlianto, 2023). Langkah-langkah ini diharapkan dapat menunjukkan kepada komunitas internasional bahwa Indonesia berkomitmen untuk memperbaiki kondisi di Papua dan memastikan bahwa hak-hak dasar masyarakat Papua dihormati dan dilindungi. Misalnya, pemerintah telah memperkenalkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di Papua (Tjolli et al., 2021).

Diplomasi Indonesia dalam internasionalisasi isu Papua terkait perlindungan HAM adalah proses yang kompleks dan membutuhkan pendekatan yang holistik. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menunjukkan komitmennya terhadap penyelesaian damai dan berkelanjutan di Papua, sambil menghadapi tekanan dari berbagai aktor internasional yang mendukung gerakan kemerdekaan Papua. Dengan menggabungkan upaya diplomasi, pembangunan, dan reformasi hukum, Indonesia berharap dapat menciptakan kondisi yang lebih baik bagi masyarakat Papua dan menjaga integritas wilayahnya. Pendekatan ini tidak hanya penting dalam menjaga stabilitas nasional, tetapi juga dalam meningkatkan citra Indonesia di mata dunia sebagai negara yang

menghormati HAM dan berkomitmen terhadap pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

c. Strategi Komunikasi Internasional dalam Diplomasi Papua

Dalam konteks komunikasi internasional, diplomasi Indonesia dalam menangani isu Papua menghadapi tantangan yang kompleks, mengingat berbagai aspek politik, budaya, dan keamanan yang terlibat. Pendekatan komunikasi internasional yang efektif sangat penting dalam menangani isu Papua, terutama untuk memastikan bahwa narasi yang diusung oleh Indonesia dapat diterima oleh komunitas internasional. Pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai strategi komunikasi yang bertujuan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menangani isu Papua di tingkat internasional.

Diplomasi publik dan budaya memainkan peran penting dalam komunikasi internasional terkait isu Papua. Pemerintah Indonesia menggunakan berbagai platform diplomasi budaya untuk mempromosikan keberagaman dan integrasi nasional, termasuk budaya Papua sebagai bagian dari mozaik budaya Indonesia yang kaya (Damayanti, 2021). Diplomasi budaya ini bertujuan untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik di kalangan komunitas internasional tentang komitmen Indonesia terhadap pembangunan dan kesejahteraan di Papua. Misalnya, Indonesia sering mengadakan festival budaya dan pameran seni yang menampilkan kekayaan budaya Papua, yang bertujuan untuk memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang menghargai keberagaman dan memperkuat rasa persatuan di antara seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, diplomasi publik juga digunakan untuk merespons berbagai tuduhan pelanggaran HAM di Papua. Indonesia telah menginisiasi berbagai program untuk meningkatkan transparansi dan menunjukkan komitmen terhadap peningkatan hak asasi manusia di Papua (Sabir, 2018). Melalui kerja sama dengan negara-negara sahabat dan organisasi internasional, Indonesia berusaha untuk menampilkan narasi yang berimbang dan menunjukkan progres yang telah dicapai. Misalnya, pemerintah Indonesia telah mengundang organisasi internasional untuk melakukan pemantauan independen terhadap situasi HAM di Papua, yang

bertujuan untuk menunjukkan bahwa Indonesia terbuka terhadap kritik dan berkomitmen untuk memperbaiki kondisi di lapangan (Indonesia, 2022).

Kolaborasi antara pemerintah Indonesia dengan berbagai aktor non-negara juga menjadi kunci penting dalam menghadapi isu Papua. Anriani et al. (2021) menyoroti pentingnya kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan komunitas internasional untuk menciptakan pendekatan yang lebih inklusif dan holistik dalam menangani masalah Papua. Strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua suara didengar dan solusi yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan. Misalnya, pemerintah Indonesia telah bekerja sama dengan LSM internasional dalam mengembangkan program-program pembangunan yang berkelanjutan di Papua, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketegangan di wilayah tersebut (Moningkey et al., 2023).

Penggunaan jaringan advokasi transnasional oleh kelompok separatis Papua juga menjadi tantangan bagi Indonesia. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia harus lebih proaktif dalam menggunakan teknologi komunikasi modern untuk mengcounter narasi yang disebar oleh kelompok-kelompok tersebut dan memastikan bahwa informasi yang akurat dan kredibel tersedia bagi komunitas internasional (Taliawo et al., 2023). Misalnya, Indonesia telah memperkuat kehadirannya di media sosial dan platform digital lainnya untuk menyebarkan informasi yang lebih seimbang mengenai situasi di Papua. Pemerintah juga bekerja sama dengan media internasional untuk memastikan bahwa narasi yang disampaikan tentang Papua tidak hanya berfokus pada konflik dan pelanggaran HAM, tetapi juga mencakup upaya-upaya pembangunan dan kesejahteraan yang telah dilakukan oleh pemerintah.

Selain itu, strategi komunikasi internasional Indonesia juga mencakup diplomasi pertahanan, yang melibatkan kombinasi antara operasi keamanan untuk menekan kelompok bersenjata dan program pembangunan untuk memenangkan hati dan pikiran masyarakat Papua (Ramdhan, 2021). Strategi ini dikenal dengan pendekatan counterinsurgency (COIN), yang mengintegrasikan upaya-upaya militer

dan non-militer untuk menciptakan stabilitas di wilayah Papua. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi ancaman separatisme, tetapi juga untuk memperkuat legitimasi pemerintah Indonesia di mata komunitas internasional dan masyarakat Papua itu sendiri.

Diplomasi ekonomi juga merupakan bagian penting dari strategi komunikasi internasional Indonesia terkait isu Papua. Pemerintah Indonesia berusaha untuk menarik investasi asing ke Papua dan meningkatkan kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain sebagai cara untuk menunjukkan komitmen terhadap pembangunan di wilayah tersebut (Lantang & Tambunan, 2020). Melalui proyek-proyek infrastruktur dan program pemberdayaan ekonomi, pemerintah Indonesia berharap dapat mengurangi ketidakpuasan di Papua dan menciptakan stabilitas yang lebih berkelanjutan. Diplomasi ekonomi ini juga bertujuan untuk menunjukkan bahwa Papua adalah bagian integral dari Indonesia yang memiliki potensi besar untuk berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional.

Tidak kalah pentingnya, peran media dalam komunikasi internasional juga menjadi perhatian utama. Media internasional seringkali mengangkat isu-isu pelanggaran hak asasi manusia di Papua yang dapat merusak citra Indonesia di mata dunia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu bekerja sama dengan media untuk menyampaikan narasi yang lebih seimbang dan akurat mengenai situasi di Papua (Rosyidin et al., 2022). Misalnya, pemerintah Indonesia telah menjalin kerjasama dengan berbagai outlet media internasional untuk mempromosikan proyek-proyek pembangunan di Papua, serta untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap dan objektif mengenai tantangan yang dihadapi di wilayah tersebut.

14. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Diplomasi Indonesia dalam Internasionalisasi Isu Papua guna Menjaga Stabilitas Nasional

Internasionalisasi isu Papua telah menjadi salah satu tantangan terbesar bagi diplomasi Indonesia, terutama dalam menjaga stabilitas nasional. Berbagai faktor mempengaruhi upaya diplomasi Indonesia dalam menangani isu ini,

melibatkan dimensi pembangunan manusia, perlindungan hak asasi manusia (HAM), dan komunikasi internasional. Masing-masing aspek ini memiliki kompleksitas tersendiri dan saling berkaitan, memerlukan pendekatan yang holistik dan strategis untuk memastikan bahwa kedaulatan nasional tetap terjaga dan bahwa Papua terus menjadi bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam hal ini, teori-teori pembangunan manusia, perlindungan HAM, diplomasi publik, realisme dan liberalisme, serta resolusi konflik memberikan kerangka pemikiran yang penting untuk menganalisis dan mengoptimalkan diplomasi Indonesia.

a. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Diplomasi dalam Pembangunan Manusia di Papua

Pembangunan manusia di Papua telah menjadi fokus utama pemerintah Indonesia dalam upaya meredam tekanan internasional terkait isu Papua. Diplomasi Indonesia di bidang ini melibatkan berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti aspek politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Teori Pembangunan Manusia yang dikembangkan oleh Amartya Sen dan Mahbub ul Haq menjadi landasan penting dalam memahami dan mengarahkan kebijakan Indonesia di Papua. Menurut Sen (1999), pembangunan sejati diukur melalui peningkatan kebebasan yang dinikmati oleh individu, yang memungkinkan mereka untuk memilih dan mengejar kehidupan yang mereka nilai. Ini bukan hanya tentang peningkatan pendapatan, tetapi juga tentang perluasan kemampuan-kemampuan dasar individu, seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi politik.

Salah satu faktor kunci yang mempengaruhi diplomasi Indonesia dalam isu Papua adalah kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Otsus dirancang untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah Papua dalam mengelola sumber daya dan menyelesaikan berbagai permasalahan lokal. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan manusia di Papua serta meredam tuntutan internasional yang kerap muncul terkait ketidaksetaraan pembangunan dan pelanggaran HAM. Krisdamarjati (2023) mencatat bahwa meskipun Otsus telah berjalan selama beberapa dekade, banyak

warga Papua yang merasa manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan, yang sering kali disebabkan oleh masalah korupsi dan tata kelola pemerintahan yang lemah.

Teori Pembangunan Manusia mengusulkan bahwa pembangunan ekonomi harus disertai dengan keadilan sosial, kesempatan yang setara, dan perlindungan lingkungan, yang semuanya bersifat penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif (Haq, 1995). Dalam konteks ini, diplomasi Indonesia harus mampu menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan inklusif dan berkelanjutan dalam strategi internasionalnya. Dengan mempresentasikan data dan inisiatif yang menunjukkan peningkatan dalam indikator-indikator Indeks Pembangunan Manusia (HDI) di Papua, seperti peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, Indonesia dapat menegaskan usahanya dalam mengatasi ketimpangan regional. Hal ini penting untuk meredam kritik internasional dan menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam memperbaiki kualitas hidup warga Papua.

Selain kebijakan Otsus, pendidikan juga merupakan faktor penting dalam pembangunan manusia di Papua. Pendidikan yang berkualitas diharapkan dapat mendorong mobilitas sosial dan memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat Papua. Upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Papua telah dilakukan melalui berbagai program beasiswa dan kerjasama dengan institusi pendidikan ternama di Indonesia (Indonesia, 2022). Namun, tantangan geografis dan infrastruktur yang kurang memadai sering kali menjadi hambatan utama. Menurut Theodora (2023), upaya pemerintah dalam meningkatkan pendidikan di Papua juga bertujuan untuk menunjukkan kepada komunitas internasional bahwa Indonesia serius dalam memperbaiki kualitas hidup warga Papua dan berkomitmen terhadap pengembangan sumber daya manusia di wilayah tersebut.

Teori Pembangunan Manusia menekankan pentingnya akses terhadap sumber daya yang memungkinkan individu untuk membangun dan menggunakan kemampuan mereka (Sen, 1999). Dalam hal ini, pendidikan menjadi kunci untuk meningkatkan kapabilitas masyarakat

Papua dan mengurangi "kemiskinan kapabilitas," yang didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu untuk mencapai fungsi-fungsi dasar kehidupan akibat kurangnya peluang dan akses terhadap sumber daya. Dengan meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan di Papua, Indonesia dapat memperluas kemampuan dasar masyarakat Papua dan membangun fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan. Ini juga penting untuk membangun narasi positif yang dapat digunakan dalam diplomasi internasional untuk menunjukkan komitmen Indonesia terhadap pembangunan manusia.

Ekonomi juga merupakan faktor penting lainnya yang mempengaruhi diplomasi Indonesia terkait Papua. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata di Indonesia, terutama di Papua, sering menjadi sorotan dalam isu internasionalisasi Papua. Meski ada pertumbuhan ekonomi yang signifikan di Indonesia bagian timur, dampaknya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat Papua (Theodora, 2023). Ketimpangan ini menjadi salah satu alasan kritik internasional terhadap kebijakan Indonesia di Papua, terutama terkait dengan distribusi manfaat ekonomi yang dianggap tidak adil. Dalam konteks ini, teori Pembangunan Manusia mendukung pandangan bahwa pembangunan ekonomi harus disertai dengan upaya untuk mengurangi ketidaksetaraan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Teori ini juga mendukung gagasan bahwa pembangunan ekonomi harus disertai dengan keadilan sosial dan kesempatan yang setara (Haq, 1995). Oleh karena itu, diplomasi Indonesia perlu menunjukkan komitmen yang lebih besar untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi di Papua dapat menetes hingga ke lapisan masyarakat terbawah, yang pada gilirannya dapat mengurangi ketegangan sosial dan politik di wilayah tersebut. Dengan demikian, Indonesia dapat mengoptimalkan strategi diplomasi yang berfokus pada pembangunan manusia untuk menunjukkan bahwa upaya pembangunan di Papua dilakukan dengan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan.

Aspek keamanan juga memainkan peran signifikan dalam diplomasi Indonesia mengenai Papua. Situasi keamanan yang tidak stabil sering kali

digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mengadvokasi internasionalisasi isu Papua. Insiden kekerasan dan konflik bersenjata di Papua, seperti yang dilaporkan oleh Perkasa (2023), sering kali menarik perhatian internasional dan memicu kritik terhadap pemerintah Indonesia. Untuk mengurangi ketegangan ini, pemerintah Indonesia berusaha mengadopsi pendekatan yang lebih dialogis dan meningkatkan keamanan di wilayah tersebut. Pendekatan keamanan yang lebih manusiawi dan berbasis pada komunitas diharapkan dapat menciptakan kondisi yang lebih stabil dan mengurangi potensi konflik yang dapat merusak citra Indonesia di mata dunia.

Dalam konteks keamanan, teori Realisme dapat memberikan perspektif tambahan yang penting. Realisme, seperti yang diartikulasikan oleh Hans Morgenthau (1948), menekankan pentingnya kekuasaan dan keamanan sebagai pusat politik internasional. Dari perspektif realis, Indonesia akan menilai isu Papua terutama dari sudut pandang keamanan dan stabilitas nasional. Pendekatan realis mendorong Indonesia untuk mempertahankan kedaulatannya atas Papua, mengelola keseimbangan kekuasaan di kawasan Asia Tenggara, dan berhati-hati terhadap intervensi asing yang bisa mempengaruhi kestabilan domestik. Diplomasi dalam konteks ini akan digunakan untuk menegaskan posisi Indonesia dalam forum internasional dan mengelola hubungan bilateral dengan negara-negara yang mungkin mendukung atau menentang klaim kedaulatan Indonesia atas Papua.

Namun, dari perspektif Liberalisme, Indonesia juga dapat melihat kerja sama internasional sebagai alat yang efektif untuk mengatasi tantangan di Papua. Ini bisa mencakup mempromosikan dialog dan rekonsiliasi melalui lembaga-lembaga seperti ASEAN atau PBB, serta menggunakan hukum internasional dan norma-norma global untuk memastikan bahwa pengelolaan isu Papua sejalan dengan standar hak asasi manusia internasional. Liberalisme menekankan peran lembaga internasional, hukum internasional, dan norma-norma, serta interaksi ekonomi dan sosial sebagai faktor yang memperdalam ketergantungan

antar negara, yang pada gilirannya dapat mempromosikan perdamaian dan stabilitas (Keohane & Nye, 1977).

Keberlanjutan pembangunan manusia di Papua juga menjadi fokus utama dalam konteks internasionalisasi isu Papua. Pengembangan model indeks pembangunan manusia yang berkelanjutan di Papua Barat menjadi salah satu upaya untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia berkomitmen dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan di wilayah tersebut (Tjolle et al., 2021). Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada aspek ekonomi, tetapi juga lingkungan dan sosial, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat Papua. Dengan demikian, keberlanjutan pembangunan menjadi salah satu indikator keberhasilan diplomasi Indonesia dalam meredakan tekanan internasional dan memastikan bahwa pembangunan di Papua berjalan sesuai dengan standar internasional.

Faktor budaya dan identitas masyarakat Papua juga sangat berpengaruh dalam diplomasi Indonesia terkait Papua. Hasibuan (2022) menekankan bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap budaya lokal Papua menjadi penting dalam upaya internasionalisasi isu Papua. Pemerintah Indonesia perlu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya bertujuan untuk pembangunan ekonomi semata, tetapi juga mempertahankan dan mengembangkan budaya Papua sebagai bagian dari identitas nasional yang lebih luas. Penghormatan terhadap budaya lokal ini tidak hanya penting untuk menjaga stabilitas sosial di Papua, tetapi juga untuk menunjukkan kepada komunitas internasional bahwa Indonesia menghargai keberagaman budaya dan komitmen terhadap pembangunan yang inklusif.

Diplomasi publik juga memainkan peran penting dalam mengelola persepsi internasional terkait isu Papua. Menurut teori Diplomasi Publik yang diartikulasikan oleh Joseph Nye (2004), soft power atau kekuatan lunak menjadi elemen kunci dalam mempengaruhi opini publik internasional. Nye mendefinisikan soft power sebagai kemampuan untuk menarik dan mempengaruhi, dibandingkan dengan hard power yang mengandalkan paksaan. Dalam konteks diplomasi publik, soft power

melibatkan pembentukan citra positif negara, penyebaran nilai-nilai budaya, politik, dan ideologis, serta pembinaan hubungan yang memungkinkan suatu negara untuk mempengaruhi aktor-aktor internasional lainnya dengan lebih efektif.

Dalam konteks Papua, diplomasi publik Indonesia dapat digunakan untuk mengelola dan mempengaruhi narasi internasional seputar isu ini, menekankan pada upaya dan kemajuan yang telah dilakukan dalam hal peningkatan hak asasi manusia, pembangunan ekonomi dan sosial, serta dialog dan rekonsiliasi. Dengan mengkomunikasikan ini secara efektif melalui media global dan forum internasional, Indonesia bisa membangun persepsi yang lebih positif dan mengurangi kritik internasional. Teori Diplomasi Publik, seperti yang diuraikan oleh Nicholas J. Cull (2008), juga menekankan pentingnya mendengarkan dalam diplomasi publik, yang mengacu pada pengumpulan dan analisis pandangan dan kebutuhan publik asing untuk memandu kebijakan dan strategi komunikasi yang lebih efektif.

Selain itu, pendekatan budaya dalam diplomasi juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi internasionalisasi isu Papua. Diplomasi budaya Indonesia berusaha untuk mempromosikan keberagaman budaya dan integrasi nasional, termasuk budaya Papua sebagai bagian dari mozaik budaya Indonesia (Damayanti, 2021). Melalui berbagai platform diplomasi budaya, Indonesia berusaha untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik di kalangan komunitas internasional tentang komitmen Indonesia terhadap pembangunan dan kesejahteraan di Papua. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi ketegangan dan meningkatkan dukungan internasional terhadap integritas teritorial Indonesia.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Diplomasi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Papua

Diplomasi Indonesia dalam internasionalisasi isu Papua terkait perlindungan hak asasi manusia (HAM) merupakan isu yang kompleks dan dinamis, dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Sejarah konflik, pendekatan pemerintah, peran aktor internasional, serta media massa dan diplomasi digital semuanya memainkan peran penting dalam

membentuk bagaimana isu ini dipersepsikan dan ditangani oleh Indonesia. Teori Perlindungan Hak Asasi Manusia memberikan kerangka pemikiran yang penting untuk memahami bagaimana Indonesia dapat memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang memenuhi kewajiban hukum internasional dan memperkuat legitimasi negara di mata komunitas internasional.

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi diplomasi Indonesia dalam isu Papua adalah sejarah konflik yang panjang dan rumit. Sejak integrasi Papua ke dalam Indonesia, masalah diskriminasi, ketidakadilan ekonomi, dan pelanggaran HAM telah menjadi sumber ketegangan yang berkepanjangan (Hadi, 2021). Perbedaan perspektif mengenai sejarah integrasi Papua turut memperumit upaya diplomasi, karena terdapat narasi berbeda antara pemerintah Indonesia dan kelompok-kelompok pro-kemerdekaan seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Narasi ini sering kali digunakan oleh aktor-aktor internasional untuk menekan Indonesia dan mengadvokasi kemerdekaan Papua.

Teori Perlindungan Hak Asasi Manusia yang dikemukakan oleh Jack Donnelly (2013) menegaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang inheren, universal, dan tidak dapat dicabut yang dimiliki setiap individu, tidak tergantung pada status hukum, ekonomi, atau kondisi politik mereka. Dalam konteks ini, negara-negara memiliki kewajiban hukum dan moral untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak ini. Ini termasuk kewajiban untuk tidak melanggar hak-hak tersebut (respect), melindungi individu dari pelanggaran oleh pihak lain (protect), dan mengambil langkah aktif untuk memastikan bahwa individu dapat menikmati hak-hak mereka sepenuhnya (fulfill).

Pendekatan dual strategi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia, yaitu kombinasi antara peningkatan kesejahteraan dan keamanan di Papua, juga mempengaruhi diplomasi negara ini. Pemerintah berupaya meningkatkan akses terhadap hak-hak dasar masyarakat Papua melalui pembangunan yang sesuai dengan kearifan lokal atau ethno-development (Hadi, 2021). Namun, pendekatan ini sering kali dikritik karena dianggap

belum cukup efektif dalam mengatasi akar permasalahan yang ada, seperti diskriminasi dan ketidakadilan ekonomi. Kritik ini menjadi bahan bagi kelompok-kelompok internasional yang mendukung gerakan kemerdekaan Papua untuk menekan pemerintah Indonesia di berbagai forum internasional.

Dalam menghadapi tekanan ini, Indonesia menggunakan prinsip non-intervensi dan menekankan pentingnya kedaulatan negara. Namun, prinsip ini mulai mengalami pergeseran dengan hadirnya konsep Responsibility to Protect (R2P) yang memungkinkan intervensi internasional dalam kasus pelanggaran HAM berat (Rahim & Timur, 2021). Konsep R2P menantang posisi diplomasi Indonesia karena membuka kemungkinan intervensi oleh komunitas internasional jika pemerintah Indonesia dianggap gagal melindungi hak asasi warganya. Oleh karena itu, Indonesia perlu terus memperkuat upaya dalam menangani isu HAM di Papua untuk mencegah intervensi internasional yang dapat merusak kedaulatan negara.

Selain itu, media massa memainkan peran krusial dalam membentuk opini publik tentang isu Papua. Media internasional sering kali memberikan sorotan yang kritis terhadap situasi di Papua, yang dapat mempengaruhi opini publik global dan tekanan politik terhadap pemerintah Indonesia. Tempo.co, misalnya, telah aktif dalam kontra-propaganda terhadap narasi yang dibangun oleh ULMWP, dengan menggunakan teknik framing untuk menyajikan berita yang mendukung integritas wilayah Indonesia (Martianto & Isnaini, 2021). Framing berita yang dilakukan oleh media domestik ini penting untuk mempengaruhi persepsi publik baik di dalam maupun luar negeri. Namun, tantangan besar yang dihadapi Indonesia adalah bagaimana mengelola narasi ini di media internasional yang sering kali lebih simpatik terhadap gerakan separatistis.

Di era digital, diplomasi juga mengalami transformasi dengan adanya diplomasi digital. ULMWP dan kelompok-kelompok pro-kemerdekaan lainnya menggunakan platform media sosial untuk menyebarkan pesan mereka secara luas dan efektif (Sagala & Baskoro, 2023). Mereka berhasil menjangkau audiens global dan mendapatkan dukungan dari berbagai negara dan organisasi internasional melalui kampanye digital. Diplomasi

digital ini memungkinkan kelompok-kelompok separatis untuk mengadvokasi isu-isu HAM di Papua dengan lebih efektif, yang pada gilirannya menambah tekanan terhadap pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu memperkuat strategi diplomasi digitalnya untuk menghadapi tantangan ini dan memastikan bahwa narasi yang disampaikan di platform digital sejalan dengan kepentingan nasional.

Tantangan lain dalam diplomasi Indonesia adalah adanya tekanan dari aktor non-pemerintah. Dukungan dari aktor non-pemerintah seperti organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga penelitian sangat penting dalam membangun narasi yang mendukung posisi Indonesia dalam isu Papua (Moningkey et al., 2023). Namun, tekanan dari kelompok-kelompok pro-kemerdekaan dan pendukung internasional mereka tetap menjadi tantangan besar. Pemerintah Indonesia perlu memastikan bahwa aktor-aktor non-pemerintah domestik dapat berperan sebagai mitra dalam upaya diplomasi dan tidak menjadi alat bagi kepentingan asing yang bertentangan dengan kedaulatan nasional.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah konkret untuk memperbaiki kondisi di Papua. Langkah-langkah ini termasuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan keterlibatan putra daerah dalam pemerintahan, dan mengadopsi kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi diskriminasi dan meningkatkan akses terhadap layanan dasar bagi masyarakat Papua (Berlianto, 2023). Langkah-langkah ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua tetapi juga untuk menunjukkan kepada komunitas internasional bahwa Indonesia berkomitmen dalam menangani isu HAM di Papua.

Diplomasi Indonesia juga aktif di berbagai forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam forum-forum ini, Indonesia sering kali menekankan bahwa isu Papua adalah masalah domestik yang memerlukan pendekatan yang komprehensif dan inklusif, melibatkan semua pihak terkait (Anwar, 2021). Upaya ini penting untuk melawan narasi negatif yang dibangun oleh kelompok-kelompok pro-kemerdekaan di panggung internasional. Dengan menunjukkan bahwa pemerintah

Indonesia berkomitmen terhadap solusi damai dan berkelanjutan, diplomasi Indonesia berusaha mengurangi tekanan internasional dan memperkuat posisi Indonesia di kancah global.

Selain itu, pendekatan diplomasi Indonesia mencakup upaya untuk meningkatkan pemahaman global tentang kompleksitas isu Papua. Delegasi internasional, seperti dari Vanuatu dan Selandia Baru, beberapa kali diundang untuk mengunjungi Papua dan melihat langsung kondisi di lapangan, sehingga mereka dapat memahami upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua (Lantang & Tambunan, 2020). Langkah ini bertujuan untuk mengurangi misinformasi dan membangun narasi yang lebih seimbang mengenai situasi di Papua. Dengan demikian, diplomasi Indonesia tidak hanya berfokus pada aspek politik dan ekonomi, tetapi juga pada bagaimana isu Papua dipersepsikan oleh komunitas internasional.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Diplomasi dalam Komunikasi Internasional tentang isu Papua

Komunikasi internasional memainkan peran penting dalam upaya diplomasi Indonesia untuk mengelola internasionalisasi isu Papua. Faktor-faktor seperti persepsi internasional, pengaruh aktor non-negara, peran media, pendekatan budaya, dan strategi diplomasi pertahanan semuanya berkontribusi secara signifikan terhadap bagaimana isu Papua dipersepsikan dan ditangani oleh komunitas internasional.

Persepsi internasional adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi diplomasi Indonesia terkait isu Papua. Perbedaan perspektif antara pemerintah Indonesia dan komunitas internasional mengenai konflik Papua sering kali menjadi sumber ketegangan (Rosyidin et al., 2022). Media global sering kali menyoroiti isu pelanggaran HAM di Papua, yang dapat merusak citra Indonesia di mata dunia. Pemerintah Indonesia perlu bekerja keras untuk mengelola persepsi ini dengan cara meningkatkan transparansi dan membuka dialog dengan berbagai pemangku kepentingan internasional. Upaya ini termasuk menampilkan bukti kemajuan di Papua, seperti proyek pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua, yang bertujuan untuk mengubah

persepsi negatif dan meningkatkan dukungan internasional terhadap posisi Indonesia.

Pengaruh aktor non-negara, seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan jaringan advokasi transnasional mereka, juga memainkan peran penting dalam internasionalisasi isu Papua. Melalui penggunaan media sosial dan platform digital, KNPB dan organisasi sejenisnya berhasil menyebarkan narasi yang menyoroti penderitaan masyarakat Papua dan menuntut kemerdekaan (Taliawo et al., 2023). Narasi ini sering kali didukung oleh organisasi internasional dan individu yang bersimpati terhadap gerakan kemerdekaan Papua. Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah Indonesia harus lebih proaktif dalam menggunakan teknologi komunikasi modern untuk melakukan kontra narasi dan memastikan bahwa informasi yang akurat dan kredibel selalu tersedia bagi komunitas internasional.

Peran media internasional juga tidak dapat diabaikan dalam konteks ini. Media global sering kali memberikan sorotan yang kritis terhadap situasi di Papua, yang dapat mempengaruhi opini publik global dan tekanan politik terhadap pemerintah Indonesia. Media internasional memiliki kemampuan untuk membentuk persepsi publik tentang konflik Papua, yang sering kali menyoroti pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan represif pemerintah (Rosyidin et al., 2022). Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk menjalin hubungan yang baik dengan media internasional dan menyampaikan narasi yang lebih seimbang mengenai situasi di Papua. Hal ini termasuk menyoroti inisiatif pembangunan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang telah dilakukan oleh pemerintah.

Pendekatan budaya dalam diplomasi juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi internasionalisasi isu Papua. Diplomasi budaya Indonesia berusaha untuk mempromosikan keberagaman budaya dan integrasi nasional, termasuk budaya Papua sebagai bagian dari mozaik budaya Indonesia (Damayanti, 2021). Melalui berbagai platform diplomasi budaya, Indonesia berusaha untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik di kalangan komunitas internasional tentang komitmen Indonesia terhadap pembangunan dan kesejahteraan di Papua. Pendekatan ini

bertujuan untuk mengurangi ketegangan dan meningkatkan dukungan internasional terhadap integritas teritorial Indonesia.

Strategi diplomasi pertahanan juga menjadi faktor penting dalam konteks ini. Integrasi antara upaya diplomatik dan militer sangat penting dalam menangani konflik Papua (Ramdhan, 2021). Indonesia menggunakan model counterinsurgency (COIN) yang melibatkan kombinasi antara operasi militer untuk menekan kelompok bersenjata dan program pembangunan untuk memenangkan hati dan pikiran masyarakat Papua. Strategi ini diharapkan dapat menciptakan stabilitas di wilayah tersebut dan memperkuat legitimasi pemerintah Indonesia di mata komunitas internasional. Namun, pendekatan ini juga harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari kritik internasional terkait pelanggaran hak asasi manusia.

Kolaborasi dengan aktor non-negara merupakan strategi lain yang penting dalam diplomasi Indonesia terkait isu Papua. Kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan berbagai organisasi masyarakat sipil dan komunitas internasional diperlukan untuk menciptakan pendekatan yang lebih inklusif dan holistik dalam menangani masalah Papua (Anriani et al., 2021). Melalui kolaborasi ini, Indonesia dapat menunjukkan komitmen terhadap dialog dan keterbukaan, yang dapat meningkatkan dukungan internasional dan mengurangi tekanan dari komunitas global.

Peran Indonesia di forum-forum internasional juga sangat penting dalam konteks ini. Indonesia telah aktif berpartisipasi dalam berbagai pertemuan internasional, termasuk di forum Majelis Umum PBB, untuk mengadvokasi posisi Indonesia dan menjawab berbagai tuduhan yang disuarakan oleh negara-negara yang mendukung gerakan separatis Papua (Febriyanti & Roring, 2022). Partisipasi aktif ini penting untuk membangun dukungan internasional dan memperkuat posisi Indonesia di kancah global. Melalui diplomasi yang gigih dan argumentasi yang terstruktur, diplomat Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa pandangan Indonesia diterima oleh komunitas internasional.

Diplomasi ekonomi juga menjadi bagian penting dari strategi komunikasi internasional Indonesia terkait isu Papua. Indonesia berusaha

untuk menarik investasi asing ke Papua dan meningkatkan kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain sebagai cara untuk menunjukkan komitmen terhadap pembangunan di wilayah tersebut (Lantang & Tambunan, 2020). Proyek-proyek infrastruktur dan program pemberdayaan ekonomi diharapkan dapat mengurangi ketidakpuasan di Papua dan menciptakan stabilitas yang lebih berkelanjutan. Dengan menunjukkan hasil nyata dari upaya pembangunan, Indonesia berharap dapat mengubah persepsi negatif dan meningkatkan dukungan internasional.

Dalam menghadapi tantangan yang kompleks ini, transparansi menjadi kunci penting. Diplomasi publik Indonesia harus meningkatkan transparansi dalam menangani isu Papua, termasuk dalam hal pelaporan kemajuan dan tantangan yang dihadapi (Sabir, 2018). Dengan membuka akses informasi yang lebih luas dan mengajak berbagai pemangku kepentingan untuk berdialog, Indonesia dapat menunjukkan komitmen yang lebih kuat terhadap peningkatan hak asasi manusia dan kesejahteraan di Papua. Transparansi ini diharapkan dapat mengurangi kritik internasional dan membangun kepercayaan di antara komunitas global.

15. Langkah Strategis Optimalisasi Diplomasi Indonesia dalam Internasionalisasi Isu Papua guna Menjaga Stabilitas Nasional

Dalam penyusunan langkah strategis optimalisasi diplomasi Indonesia dalam mengatasi internasionalisasi isu Papua supaya stabilitas nasional terjaga, maka akan digunakan pendekatan Teori Perubahan (*Theory of Change*). Tahapan dalam penulisan Teori Perubahan terdiri atas: identifikasi masalah utama, penetapan tujuan akhir, identifikasi intervensi yang diperlukan, serta membuat rantai kausalitas untuk memastikan intervensi akan mengarah pada tujuan akhir.

a. Identifikasi Masalah Utama

Masalah utama yang dihadapi Indonesia dalam konteks internasionalisasi isu Papua berkaitan dengan meningkatnya perhatian dan intervensi dari aktor-aktor internasional terhadap situasi di Papua,

yang berpotensi mengancam stabilitas nasional. Sejak integrasi Papua ke dalam Indonesia melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969, wilayah ini telah menjadi sumber ketegangan politik dan konflik, baik di tingkat domestik maupun internasional. Dalam beberapa dekade terakhir, isu Papua telah mendapatkan perhatian luas dari berbagai organisasi internasional, negara-negara lain, dan lembaga-lembaga hak asasi manusia, yang semakin memperumit upaya Indonesia untuk mempertahankan integritas teritorialnya dan menjaga stabilitas nasional.

Salah satu masalah utama adalah adanya persepsi negatif dari komunitas internasional terhadap pendekatan Indonesia dalam menangani isu Papua, khususnya terkait dengan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Berbagai laporan dari organisasi internasional, seperti Amnesty International dan Human Rights Watch, telah mengkritik tindakan pemerintah Indonesia dalam menangani gerakan separatis di Papua, termasuk penggunaan kekuatan militer yang dianggap berlebihan dan kurangnya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat Papua. Persepsi ini diperburuk oleh dukungan internasional terhadap gerakan separatis, seperti United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), yang aktif melakukan kampanye internasional untuk mendapatkan dukungan bagi kemerdekaan Papua.

Di tingkat regional, beberapa negara di kawasan Pasifik, seperti Vanuatu dan Kepulauan Solomon, telah secara terbuka mendukung perjuangan kemerdekaan Papua di forum-forum internasional, termasuk di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dukungan ini menambah tekanan terhadap diplomasi Indonesia dan menciptakan tantangan dalam menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga. Selain itu, negara-negara seperti Australia dan Selandia Baru, meskipun secara resmi mendukung kedaulatan Indonesia atas Papua, tetap menghadapi tekanan domestik dari kelompok-kelompok masyarakat sipil yang mendukung hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua. Hal ini menunjukkan bahwa masalah Papua bukan hanya persoalan domestik, tetapi juga telah menjadi isu internasional yang memerlukan pendekatan diplomasi yang lebih kompleks dan terkoordinasi.

Di sisi lain, di dalam negeri, ketidakpuasan masyarakat Papua terhadap kebijakan pemerintah pusat juga menjadi masalah yang signifikan. Meskipun pemerintah Indonesia telah memberikan Otonomi Khusus (Otsus) kepada Papua sebagai upaya untuk meredam ketegangan dan meningkatkan pembangunan, implementasinya sering kali dianggap tidak efektif oleh masyarakat setempat. Ketidakpuasan ini terutama terkait dengan masalah korupsi, kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana Otsus, serta masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat Papua dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Ketidakpuasan ini menjadi salah satu faktor yang memperkuat gerakan separatis dan mempersulit upaya pemerintah untuk menciptakan stabilitas di wilayah tersebut.

Masalah lainnya adalah lemahnya komunikasi dan diplomasi publik Indonesia dalam mengelola narasi internasional terkait Papua. Pemerintah Indonesia sering kali dianggap kurang proaktif dalam menyampaikan informasi yang akurat dan kredibel mengenai situasi di Papua kepada komunitas internasional. Hal ini memberikan ruang bagi kelompok separatis dan pendukung mereka untuk menyebarkan narasi negatif tentang Indonesia, yang kemudian diadopsi oleh media internasional dan organisasi hak asasi manusia. Akibatnya, persepsi internasional yang negatif terhadap Indonesia semakin menguat, yang pada gilirannya meningkatkan tekanan terhadap kebijakan luar negeri Indonesia dan mengancam stabilitas nasional.

Secara keseluruhan, masalah utama yang dihadapi Indonesia dalam menghadapi internasionalisasi isu Papua adalah bagaimana mengelola persepsi internasional, meredam dukungan terhadap gerakan separatis, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, serta memperkuat diplomasi dan komunikasi internasional untuk menjaga stabilitas nasional. Tantangan ini memerlukan strategi kebijakan yang komprehensif, terkoordinasi, dan berkelanjutan agar Indonesia dapat mempertahankan integritas teritorialnya dan memastikan stabilitas yang berkelanjutan di wilayah Papua dan di seluruh negeri.

b. Penetapan Tujuan Akhir

Tujuan akhir dari langkah strategis kebijakan ini adalah menjaga dan memperkuat stabilitas nasional Indonesia dengan mengatasi internasionalisasi isu Papua secara efektif. Stabilitas nasional merupakan elemen krusial bagi kelangsungan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, serta kedaulatan negara. Dalam konteks ini, stabilitas nasional mencakup kestabilan politik, sosial, ekonomi, serta integritas teritorial Indonesia, yang semuanya dapat terancam oleh meningkatnya perhatian dan tekanan internasional terkait isu Papua.

Pertama-tama, stabilitas nasional sangat bergantung pada kemampuan Indonesia untuk mempertahankan integritas teritorialnya. Isu Papua telah menjadi salah satu tantangan terbesar bagi Indonesia dalam mempertahankan keutuhan wilayahnya, terutama karena dukungan yang semakin meningkat dari komunitas internasional terhadap gerakan separatis Papua. Oleh karena itu, strategi kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional, memastikan bahwa isu Papua tidak digunakan sebagai alat oleh pihak-pihak tertentu untuk mengganggu kedaulatan Indonesia. Hal ini mencakup penguatan diplomasi publik dan internasional, serta pengelolaan narasi global yang lebih efektif untuk memperbaiki persepsi internasional tentang kebijakan Indonesia di Papua.

Selain itu, stabilitas nasional juga berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan ekonomi di dalam negeri, khususnya di wilayah Papua. Ketidakpuasan masyarakat Papua terhadap kebijakan pemerintah pusat, terutama terkait dengan implementasi Otonomi Khusus (Otsus) dan ketidakmerataan pembangunan, telah memicu ketegangan sosial dan memperkuat gerakan separatis. Oleh karena itu, tujuan akhir dari strategi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui percepatan pembangunan manusia dan infrastruktur, reformasi kebijakan, serta perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, strategi ini tidak hanya berfokus pada aspek eksternal, tetapi juga pada upaya untuk mengatasi akar masalah di dalam negeri yang dapat mempengaruhi stabilitas nasional.

Langkah strategis ini juga bertujuan untuk mengurangi dukungan internasional terhadap gerakan separatis Papua dengan cara memperkuat aliansi strategis dengan negara-negara kunci dan organisasi internasional. Kerjasama internasional yang proaktif dan terkoordinasi akan memastikan bahwa Indonesia tidak hanya bertahan terhadap tekanan internasional, tetapi juga mampu menggalang dukungan untuk kebijakan-kebijakannya terkait Papua. Dengan meningkatkan kerjasama diplomatik, Indonesia dapat mengurangi isolasi internasional dan membangun koalisi yang mendukung integritas teritorialnya.

Lebih lanjut, langkah strategis ini bertujuan untuk memperbaiki perlindungan hak asasi manusia di Papua sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi kritik internasional yang sering kali memanfaatkan isu HAM untuk menekan Indonesia. Reformasi kebijakan yang berfokus pada perlindungan HAM, pengawasan yang lebih ketat, serta peningkatan transparansi dalam implementasi kebijakan di Papua akan menunjukkan komitmen Indonesia terhadap norma-norma internasional. Ini diharapkan dapat meredam kritik dan meningkatkan legitimasi Indonesia di mata masyarakat internasional.

Pada akhirnya, tujuan akhir dari langkah strategis ini adalah menciptakan stabilitas yang berkelanjutan di Papua dan di seluruh Indonesia dengan cara yang komprehensif dan inklusif. Ini melibatkan tidak hanya tindakan diplomatik di tingkat internasional, tetapi juga reformasi domestik yang penting untuk memastikan bahwa masyarakat Papua merasa diikutsertakan dalam pembangunan nasional. Dengan memperkuat stabilitas nasional, Indonesia dapat memastikan bahwa isu Papua tidak lagi menjadi ancaman signifikan terhadap kedaulatan dan pembangunan nasional, serta dapat terus maju sebagai negara yang stabil, berdaulat, dan dihormati di kancah internasional.

Tujuan akhir ini tidak hanya penting untuk mengatasi tantangan jangka pendek, tetapi juga untuk memastikan bahwa Indonesia dapat menghadapi masa depan dengan keyakinan bahwa stabilitas dan kesatuan nasionalnya terjaga. Dengan demikian, strategi ini dirancang untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi perdamaian, pembangunan, dan

integritas nasional, memastikan bahwa setiap wilayah di Indonesia, termasuk Papua, dapat berkontribusi secara positif terhadap kesejahteraan dan kemajuan negara.

c. Pengembangan Intervensi Kunci

Untuk mencapai tujuan akhir dari langkah strategis kebijakan ini, yaitu menjaga dan memperkuat stabilitas nasional Indonesia dengan mengatasi internasionalisasi isu Papua, diperlukan pengembangan intervensi kunci yang terfokus dan efektif. Intervensi-intervensi ini harus didesain untuk merespons faktor-faktor utama yang mempengaruhi dinamika internasionalisasi isu Papua, serta harus dilaksanakan dengan koordinasi antar instansi pemerintah yang relevan. Berikut adalah pengembangan intervensi kunci beserta strategi implementasinya:

1) Peningkatan Diplomasi Publik dan *Soft Power*

Strategi peningkatan diplomasi publik dan soft power bertujuan untuk memperkuat citra Indonesia di mata dunia, terutama dalam menangani isu Papua. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) akan memimpin kampanye global untuk mengkomunikasikan kemajuan yang telah dicapai Indonesia di Papua, seperti peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pembangunan infrastruktur. Kampanye ini akan menggunakan berbagai media internasional untuk menyebarkan informasi positif, termasuk testimoni langsung dari masyarakat Papua yang merasakan manfaat dari kebijakan pemerintah. Selain itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan berperan dalam mempromosikan budaya Papua sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang lebih luas. Tujuan dari strategi ini adalah untuk mengubah persepsi internasional yang selama ini cenderung negatif terhadap Indonesia terkait Papua, serta untuk mendapatkan dukungan global yang lebih besar terhadap kebijakan Indonesia.

a) Indikator Kinerja: Keberhasilan langkah ini akan diukur melalui peningkatan persepsi positif terhadap Indonesia dalam survei internasional, jumlah liputan media internasional yang

menggambarkan Papua secara positif, dan partisipasi aktif Indonesia dalam forum-forum internasional dengan hasil yang mendukung.

- b) Jangka Waktu: dimulai dalam jangka pendek dan terus berlanjut dalam jangka panjang, dengan penekanan pada pemantapan citra positif Indonesia secara berkelanjutan.

2) Kerjasama Internasional yang Proaktif

Penggalangan kerjasama internasional yang proaktif adalah langkah strategis yang bertujuan untuk memperkuat dukungan internasional terhadap posisi Indonesia mengenai Papua. Kementerian Luar Negeri, dengan dukungan dari Kementerian Pertahanan dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, akan memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara berpengaruh, khususnya di kawasan Pasifik dan di forum-forum internasional seperti PBB dan ASEAN. Melalui diplomasi bilateral dan multilateral yang lebih intensif, Indonesia berupaya untuk membangun aliansi strategis yang mendukung kedaulatan Indonesia dan menekan dukungan internasional terhadap gerakan separatis di Papua. Strategi ini juga mencakup upaya untuk menegosiasikan resolusi internasional yang mendukung integritas teritorial Indonesia dan memblokir upaya dari negara-negara atau organisasi yang mencoba menginternasionalisasi isu Papua.

- a) Indikator Kinerja: Keberhasilan strategi ini diukur melalui jumlah perjanjian bilateral dan multilateral yang berhasil diimplementasikan, peningkatan jumlah negara dan organisasi internasional yang secara eksplisit mendukung Indonesia, serta keberhasilan dalam forum internasional terkait Papua.
- b) Jangka Waktu: dimulai dari jangka pendek hingga jangka panjang, dengan tujuan jangka panjang untuk memperkuat dan memperluas dukungan internasional.

3) Percepatan Pembangunan Manusia dan Infrastruktur di Papua

Langkah Strategis percepatan pembangunan manusia dan infrastruktur di Papua berfokus pada peningkatan kesejahteraan

masyarakat Papua sebagai upaya untuk mengurangi ketidakpuasan domestik yang dapat memicu separatisme. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan memimpin pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya, yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan akses terhadap layanan dasar di Papua. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta Kementerian Kesehatan akan berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan di Papua. Implementasi kebijakan Otonomi Khusus yang lebih efektif juga menjadi fokus utama dalam strategi ini, dengan memastikan bahwa dana Otsus digunakan secara transparan dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- a) Indikator Kinerja: Keberhasilan strategi ini akan diukur melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua, peningkatan akses masyarakat terhadap layanan dasar, serta penurunan ketimpangan ekonomi antara Papua dan wilayah lain di Indonesia.
- b) Jangka Waktu: langkah strategis ini memerlukan jangka menengah hingga panjang untuk melihat dampak yang signifikan, tetapi harus dimulai segera untuk menanamkan fondasi yang kuat bagi pembangunan berkelanjutan.

4) Reformasi Kebijakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Langkah strategis reformasi kebijakan dan perlindungan hak asasi manusia bertujuan untuk mengatasi kritik internasional terkait dugaan pelanggaran HAM di Papua dan meningkatkan legitimasi pemerintah di mata masyarakat Papua serta komunitas internasional. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dengan dukungan dari Komnas HAM dan aparat keamanan, akan memimpin upaya ini. Langkah-langkah yang akan diambil termasuk memperkuat mekanisme pengawasan HAM yang independen dan transparan, merevisi kebijakan keamanan untuk mengurangi pendekatan represif, dan mengutamakan pendekatan yang lebih humanis. Pemerintah juga akan memberdayakan masyarakat sipil

dan meningkatkan partisipasi lokal dalam pengambilan keputusan, yang akan membantu membangun kepercayaan dan mengurangi ketegangan di Papua.

- a) Indikator Kinerja: Keberhasilan strategi ini diukur melalui penurunan jumlah insiden pelanggaran HAM di Papua, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta pengakuan internasional terhadap upaya Indonesia dalam memperbaiki situasi HAM di Papua.
- b) Jangka Waktu: langkah strategis ini akan berlangsung dalam jangka menengah hingga panjang, dengan penekanan pada perubahan nyata yang dapat dilihat di lapangan dan pematapan reformasi kebijakan.

5) Diplomasi Digital dan Pengelolaan Narasi Internasional

Pengembangan diplomasi digital dan pengelolaan narasi internasional merupakan langkah strategis yang dirancang untuk mengendalikan dan memengaruhi persepsi global terkait isu Papua di ruang digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan memimpin inisiatif ini, dengan dukungan dari Kementerian Luar Negeri dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Strategi ini meliputi pengembangan kampanye digital yang proaktif untuk menyebarkan informasi positif tentang Papua, melawan propaganda yang mendukung separatisme, dan meningkatkan keterlibatan audiens internasional dengan narasi yang kredibel dari pemerintah Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi dominasi konten negatif terkait Papua di media sosial dan internet, serta membangun dukungan global melalui kampanye digital yang terkoordinasi.

- a) Indikator Kinerja: Keberhasilan ini diukur melalui peningkatan jumlah kampanye digital yang berhasil mengubah persepsi internasional, pengurangan konten negatif terkait Papua di platform digital, serta peningkatan keterlibatan audiens internasional dengan konten-konten positif yang diproduksi oleh pemerintah.

- b) Jangka Waktu: dimulai dalam jangka pendek dan harus berkelanjutan untuk memastikan pengendalian narasi terkait Papua di ruang digital.

6) Dialog dan Rekonsiliasi dengan Masyarakat Papua

Langkah strategis peningkatan dialog dan rekonsiliasi dengan masyarakat Papua bertujuan untuk menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan mengurangi ketegangan di wilayah tersebut. Kementerian Dalam Negeri akan memimpin inisiatif ini, dengan dukungan dari Kantor Staf Presiden dan lembaga-lembaga adat di Papua. Strategi ini mencakup upaya untuk mengadakan dialog yang inklusif dengan partisipasi aktif dari masyarakat Papua, termasuk pemimpin adat dan tokoh agama, guna mencapai kesepakatan yang konstruktif dan berkelanjutan. Selain itu, mekanisme rekonsiliasi akan dikembangkan untuk menangani keluhan masyarakat Papua secara adil dan terbuka, yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah.

- a) Indikator Kinerja: Keberhasilan langkah ini diukur melalui jumlah dialog yang berhasil dilaksanakan dengan partisipasi aktif masyarakat Papua, kesepakatan rekonsiliasi yang tercapai, serta peningkatan partisipasi masyarakat Papua dalam pembangunan.
- b) Jangka Waktu langkah strategis ini akan berlangsung dalam jangka menengah hingga panjang, dengan fokus pada membangun kepercayaan dan mencapai kesepakatan yang berkelanjutan.

d. Pengembangan Rantai Kausalitas

Pengembangan rantai kausalitas dalam optimalisasi diplomasi Indonesia terkait internasionalisasi isu Papua bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat antara berbagai intervensi kunci yang telah diidentifikasi dan bagaimana intervensi tersebut akan membawa pada pencapaian tujuan akhir, yaitu memperkuat stabilitas nasional Indonesia.

Berikut adalah pengembangan rantai kausalitas yang menghubungkan setiap intervensi dengan hasil yang diinginkan:

- 1) Peningkatan Diplomasi Publik dan Soft Power
 - a) Intervensi: Meluncurkan kampanye diplomasi publik yang proaktif dan mempromosikan budaya Papua sebagai bagian dari citra nasional.
 - b) Dampak Jangka Pendek: Persepsi internasional tentang komitmen Indonesia terhadap Papua membaik. Media internasional mulai meliput narasi yang lebih positif tentang Papua dan upaya pembangunan di sana.
 - c) Dampak Jangka Menengah: Dukungan internasional terhadap integritas teritorial Indonesia meningkat, mengurangi tekanan global terhadap kebijakan Indonesia di Papua.
 - d) Dampak Jangka Panjang: Stabilitas nasional diperkuat karena dukungan global yang lebih solid dan berkurangnya kritik internasional yang dapat mengganggu keutuhan wilayah Indonesia.
- 2) Penggalangan Kerjasama Internasional yang Proaktif
 - a) Intervensi: Membangun dan memperkuat aliansi strategis dengan negara-negara kunci dan organisasi internasional, serta memperkuat posisi Indonesia dalam forum multilateral.
 - b) Dampak Jangka Pendek: Perjanjian bilateral dan multilateral yang mendukung posisi Indonesia terkait Papua mulai terbentuk. Dukungan dari negara-negara berpengaruh diperoleh, mengurangi isolasi diplomatik Indonesia.
 - c) Dampak Jangka Menengah: Negara-negara yang sebelumnya mendukung gerakan separatis di Papua mulai mengalihkan dukungannya, dan resolusi internasional yang mendukung integritas Indonesia disetujui di forum-forum global.
 - d) Dampak Jangka Panjang: Integritas teritorial Indonesia diakui secara luas, mengurangi risiko intervensi internasional yang dapat mengancam stabilitas nasional.
- 3) Percepatan Pembangunan Manusia dan Infrastruktur di Papua

- a) Intervensi: Meningkatkan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan di Papua, serta memastikan transparansi dalam implementasi kebijakan Otonomi Khusus.
 - b) Dampak Jangka Pendek: Akses masyarakat Papua terhadap layanan dasar meningkat, dan ketidakpuasan domestik mulai berkurang. Pemerintah menunjukkan komitmen nyata dalam peningkatan kualitas hidup di Papua.
 - c) Dampak Jangka Menengah: Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua dan penurunan ketimpangan ekonomi antara Papua dan wilayah lain di Indonesia. Ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat berkurang signifikan.
 - d) Dampak Jangka Panjang: Gerakan separatis kehilangan dukungan lokal karena peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup, yang pada akhirnya memperkuat stabilitas nasional.
- 4) Reformasi Kebijakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia
- a) Intervensi: Melakukan reformasi kebijakan untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia di Papua dan mengurangi pendekatan represif.
 - b) Dampak Jangka Pendek: Penurunan jumlah insiden pelanggaran HAM yang dilaporkan di Papua. Masyarakat internasional mulai mengakui upaya reformasi Indonesia.
 - c) Dampak Jangka Menengah: Meningkatnya kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat. Kritik internasional terhadap situasi HAM di Papua berkurang, dan legitimasi pemerintah meningkat.
 - d) Dampak Jangka Panjang: Peningkatan stabilitas di Papua melalui pendekatan yang lebih humanis, yang mengurangi ketegangan dan menghilangkan potensi konflik yang dapat mengancam stabilitas nasional.
- 5) Pengembangan Diplomasi Digital dan Pengelolaan Narasi Internasional

- a) Intervensi: Mengembangkan strategi diplomasi digital untuk mengendalikan narasi internasional terkait Papua dan melawan propaganda separatis.
 - b) Dampak Jangka Pendek: Peningkatan keterlibatan global dengan narasi positif yang diproduksi oleh pemerintah Indonesia. Pengurangan konten negatif terkait Papua di media sosial dan internet.
 - c) Dampak Jangka Menengah: Persepsi internasional mulai bergeser lebih mendukung Indonesia, dan propaganda separatis kehilangan pengaruhnya di ruang digital.
 - d) Dampak Jangka Panjang: Narasi global yang mendukung posisi Indonesia semakin kuat, yang berkontribusi pada dukungan internasional yang lebih besar dan stabilitas nasional yang lebih kokoh.
- 6) Peningkatan Dialog dan Rekonsiliasi dengan Masyarakat Papua
- a) Intervensi: Mengadakan dialog inklusif dan membangun mekanisme rekonsiliasi dengan partisipasi aktif masyarakat Papua.
 - b) Dampak Jangka Pendek: Terbentuknya dialog yang konstruktif antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua. Keluhan-keluhan masyarakat mulai didengar dan ditangani secara adil.
 - c) Dampak Jangka Menengah: Meningkatnya kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah dan berkurangnya dukungan lokal terhadap gerakan separatis. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional meningkat.
 - d) Dampak Jangka Panjang: Hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua memperkuat keutuhan nasional dan menciptakan stabilitas yang berkelanjutan di wilayah tersebut.

BAB IV

PENUTUP

16. Simpulan

Pada Bab III sebelumnya, telah dibahas secara mendalam langkah strategis diplomasi Indonesia dalam menghadapi internasionalisasi isu Papua dan bagaimana upaya tersebut bertujuan untuk menjaga dan memperkuat stabilitas nasional. Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Diplomasi Indonesia dalam Mengatasi Internasionalisasi Papua Saat Ini

Diplomasi Indonesia dalam mengatasi internasionalisasi isu Papua saat ini telah menunjukkan upaya yang signifikan, namun tantangan yang dihadapi tetap kompleks dan multidimensi. Papua adalah wilayah yang sangat strategis dan sensitif, baik dari segi geopolitik maupun dari segi domestik. Integrasi Papua ke dalam Indonesia yang melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969 telah menjadi sumber kontroversi internasional, terutama di kalangan negara-negara di kawasan Pasifik dan beberapa organisasi internasional yang mendukung gerakan separatis Papua.

Indonesia telah berupaya untuk menangani isu Papua melalui tiga aspek utama: pembangunan manusia, perlindungan hak asasi manusia (HAM), dan komunikasi internasional. Pada aspek pembangunan manusia, Indonesia telah menginisiasi kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) untuk Papua, yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan mengurangi kesenjangan pembangunan antara Papua dan daerah lainnya di Indonesia. Namun, implementasi kebijakan ini sering kali menemui berbagai kendala, termasuk masalah korupsi, tata kelola yang buruk, dan ketidakpuasan masyarakat Papua terhadap hasil yang dicapai.

Dalam hal perlindungan HAM, Indonesia menghadapi tekanan internasional yang cukup besar, terutama dari organisasi-organisasi HAM internasional yang menyoroti adanya dugaan pelanggaran HAM di Papua. Pemerintah Indonesia telah mencoba untuk merespons kritik ini dengan memperkuat mekanisme pengawasan HAM dan meningkatkan

transparansi dalam penanganan isu-isu HAM. Meskipun demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam mengatasi persepsi negatif yang telah terbentuk di mata komunitas internasional.

Pada aspek komunikasi internasional, Indonesia berupaya untuk membangun narasi yang lebih positif mengenai Papua di panggung internasional. Pemerintah telah mengundang delegasi asing untuk melihat langsung kondisi di Papua dan mengembangkan diplomasi publik untuk meningkatkan citra Indonesia. Namun, diplomasi publik ini sering kali dihadapkan pada narasi kontra yang disebar oleh kelompok separatis Papua dan pendukung mereka di luar negeri.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Diplomasi Indonesia dalam Internasionalisasi Isu Papua guna Menjaga Stabilitas Nasional

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi diplomasi Indonesia dalam menghadapi internasionalisasi isu Papua yang berhubungan langsung dengan upaya menjaga stabilitas nasional. Faktor-faktor tersebut meliputi aspek pembangunan manusia, perlindungan HAM, dan komunikasi internasional.

Pertama, dalam aspek pembangunan manusia, kebijakan Otsus Papua merupakan elemen penting dalam diplomasi Indonesia. Namun, efektivitas kebijakan ini masih dipertanyakan, terutama terkait dengan distribusi dan penggunaan dana Otsus yang sering kali tidak tepat sasaran. Hal ini mengakibatkan ketimpangan pembangunan yang tetap tinggi di Papua, yang menjadi salah satu alasan kritik internasional terhadap Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk terus memperbaiki pelaksanaan kebijakan ini dan menunjukkan komitmen nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua.

Kedua, dalam hal perlindungan HAM, sejarah panjang konflik di Papua menjadi salah satu faktor utama yang memperumit diplomasi Indonesia. Pemerintah telah mengadopsi pendekatan dual strategi dengan mengombinasikan upaya peningkatan kesejahteraan dengan pendekatan keamanan. Namun, pendekatan ini sering kali dikritik karena dianggap belum cukup efektif dalam mengatasi akar masalah yang ada. Oleh karena itu, Indonesia perlu meningkatkan upaya untuk memperkuat mekanisme

perlindungan HAM dan menunjukkan komitmennya terhadap standar internasional.

Ketiga, dalam aspek komunikasi internasional, peran media dan aktor non-negara sangat penting dalam membentuk persepsi global mengenai isu Papua. Media internasional dan kelompok advokasi sering kali memberikan sorotan negatif terhadap Indonesia, terutama terkait dengan isu HAM di Papua. Untuk mengatasi hal ini, Indonesia harus lebih proaktif dalam mengelola narasi internasional dan meningkatkan diplomasi digital untuk menghadapi tantangan ini.

c. Langkah Strategis Optimalisasi Diplomasi Indonesia dalam Internasionalisasi Isu Papua guna Menjaga Stabilitas Nasional

Berdasarkan analisis masalah dan faktor-faktor yang mempengaruhi diplomasi Indonesia dalam internasionalisasi isu Papua, telah dikembangkan strategi optimalisasi diplomasi yang bertujuan untuk menjaga dan memperkuat stabilitas nasional. Strategi ini didasarkan pada pendekatan Teori Perubahan (Theory of Change) yang mencakup identifikasi masalah utama, penetapan tujuan akhir, pengembangan intervensi kunci, dan rantai kausalitas untuk memastikan bahwa setiap intervensi akan mengarah pada tujuan akhir.

Masalah utama yang dihadapi Indonesia adalah meningkatnya perhatian dan intervensi internasional terhadap isu Papua yang berpotensi mengancam stabilitas nasional. Hal ini diperparah oleh persepsi negatif terhadap pendekatan Indonesia dalam menangani isu Papua, terutama terkait dengan dugaan pelanggaran HAM. Tujuan akhir dari strategi ini adalah untuk menjaga dan memperkuat stabilitas nasional Indonesia dengan mengatasi internasionalisasi isu Papua secara efektif.

Intervensi kunci yang dikembangkan dalam strategi ini mencakup peningkatan diplomasi publik dan soft power, penggalangan kerjasama internasional yang proaktif, percepatan pembangunan manusia dan infrastruktur di Papua, reformasi kebijakan dan perlindungan HAM, serta penguatan diplomasi digital. Setiap intervensi ini dirancang untuk merespons faktor-faktor utama yang mempengaruhi internasionalisasi isu

Papua, dengan tujuan akhir untuk menjaga dan memperkuat stabilitas nasional.

Dalam implementasi strategi ini, peran Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta Kementerian Hukum dan HAM sangat penting. Keberhasilan strategi ini akan diukur melalui berbagai indikator kinerja, termasuk peningkatan persepsi positif terhadap Indonesia, jumlah dukungan internasional yang diperoleh, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua, serta penurunan insiden pelanggaran HAM di wilayah tersebut.

Secara keseluruhan, strategi optimalisasi diplomasi Indonesia dalam mengatasi internasionalisasi isu Papua dirancang untuk merespons tantangan yang kompleks dan multidimensi yang dihadapi Indonesia. Dengan mengimplementasikan langkah strategis ini secara efektif, Indonesia diharapkan dapat menjaga dan memperkuat stabilitas nasionalnya, serta meningkatkan posisi Indonesia di kancah internasional.

17. Rekomendasi

Berikut ini adalah rekomendasi kebijakan dalam rangka optimalisasi diplomasi Indonesia dalam internasionalisasi isu Papua guna menjaga stabilitas nasional. Rekomendasi kebijakan berikut merupakan langkah operasional dalam menjawab rumusan masalah pada Taskap, yaitu: “Bagaimana optimalisasi diplomasi Indonesia dalam internasionalisasi isu Papua guna menjaga stabilitas nasional?” Setiap rekomendasi dirancang untuk memberikan solusi yang komprehensif dan terintegrasi, dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mempengaruhi dinamika internasionalisasi isu Papua.

a. Memperkuat Diplomasi Publik melalui Kampanye Global

Diplomasi publik memainkan peran penting dalam membentuk persepsi internasional tentang kebijakan dan tindakan suatu negara. Dalam konteks isu Papua, Indonesia perlu meningkatkan diplomasi publiknya melalui kampanye global yang proaktif. Kampanye ini harus menyoroti keberhasilan pembangunan di Papua, komitmen Indonesia terhadap hak

asasi manusia, dan integrasi Papua sebagai bagian dari wilayah yang sah dari Republik Indonesia. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) akan memimpin upaya ini dengan dukungan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Media internasional, forum-forum global, dan kegiatan diplomasi budaya akan digunakan untuk menyebarkan informasi yang akurat dan positif tentang Papua. Dengan demikian, Indonesia dapat mengubah persepsi internasional yang selama ini cenderung negatif dan meningkatkan dukungan global terhadap kebijakannya.

b. Membangun Aliansi Strategis Internasional

Kerjasama internasional yang efektif adalah kunci untuk memperkuat posisi diplomatik Indonesia terkait isu Papua. Indonesia perlu membangun dan memperkuat aliansi strategis dengan negara-negara berpengaruh dan organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan ASEAN, untuk mendukung kedaulatan Indonesia di Papua. Kementerian Luar Negeri, bersama dengan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, akan memimpin diplomasi ini. Fokus utamanya adalah menegosiasikan perjanjian bilateral dan multilateral yang mendukung posisi Indonesia, serta memastikan bahwa isu Papua tidak digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melemahkan integritas teritorial Indonesia. Dengan memperkuat dukungan internasional, Indonesia dapat mengurangi tekanan diplomatik yang sering kali muncul dari isu ini.

c. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Kebijakan Otonomi Khusus

Pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) di Papua merupakan elemen penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan meredam kritik internasional. Namun, untuk memastikan efektivitas kebijakan ini, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana Otsus harus ditingkatkan. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) harus bekerja sama untuk memastikan bahwa dana Otsus digunakan dengan tepat sasaran, terutama dalam bidang

pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Reformasi dalam pengelolaan dana ini juga harus dilakukan untuk menghindari korupsi dan memastikan bahwa manfaat kebijakan Otsus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Papua. Dengan menunjukkan komitmen nyata terhadap kesejahteraan masyarakat Papua, Indonesia dapat mengurangi ketidakpuasan domestik dan kritik internasional.

d. Memperkuat Perlindungan Hak Asasi Manusia di Papua

Isu hak asasi manusia di Papua sering kali menjadi sorotan negatif di kancah internasional. Untuk mengatasi hal ini, Indonesia perlu memperkuat mekanisme perlindungan hak asasi manusia di Papua. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, serta aparat keamanan perlu bekerja sama untuk mengurangi pendekatan represif dan mengutamakan pendekatan humanis dalam penanganan isu-isu di Papua. Reformasi kebijakan keamanan harus dilakukan untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dilindungi, dan mekanisme pengawasan yang independen harus diperkuat untuk menjamin akuntabilitas. Upaya ini akan meningkatkan legitimasi pemerintah di mata masyarakat Papua dan komunitas internasional, serta membantu meredakan ketegangan yang ada.

e. Mengembangkan Strategi Diplomasi Digital

Di era digital saat ini, narasi terkait isu Papua tidak hanya terbentuk di forum-forum tradisional tetapi juga di ruang digital. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengembangkan strategi diplomasi digital yang proaktif untuk mengendalikan persepsi global tentang Papua. Kementerian Komunikasi dan Informatika, didukung oleh Kementerian Luar Negeri dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), akan memimpin inisiatif ini. Strategi ini harus mencakup kampanye digital yang menyebarkan informasi positif tentang Papua, serta melawan propaganda yang mendukung separatisme. Dengan mengoptimalkan penggunaan media sosial dan platform digital, Indonesia dapat mempengaruhi opini publik internasional secara lebih efektif dan memastikan bahwa narasi yang mendukung integritas teritorial Indonesia mendominasi ruang digital.

f. Memfasilitasi Dialog dan Rekonsiliasi yang Inklusif

Untuk mencapai perdamaian dan stabilitas yang berkelanjutan di Papua, pemerintah Indonesia harus memfasilitasi dialog yang inklusif dan rekonsiliasi dengan masyarakat Papua. Kementerian Dalam Negeri, dengan dukungan dari Kantor Staf Presiden dan lembaga-lembaga adat di Papua, harus memimpin upaya ini. Dialog yang melibatkan pemimpin adat, tokoh agama, dan masyarakat sipil ini sangat penting untuk membangun kepercayaan dan mengurangi ketegangan. Melalui proses rekonsiliasi, keluhan dan aspirasi masyarakat Papua dapat diakomodasi secara adil, yang akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan mengurangi potensi konflik. Dengan demikian, stabilitas nasional dapat terjaga melalui hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua.

g. Mengoptimalkan Penggunaan Soft Power melalui Diplomasi Budaya

Diplomasi budaya merupakan alat yang efektif untuk mempromosikan citra positif Indonesia di panggung internasional. Dalam konteks Papua, Indonesia perlu mengoptimalkan penggunaan soft power melalui diplomasi budaya untuk memperkuat identitas Papua sebagai bagian dari keanekaragaman budaya Indonesia. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, bersama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, akan berperan dalam mempromosikan budaya Papua melalui program pertukaran budaya, festival budaya internasional, dan kerjasama dengan institusi kebudayaan global. Diplomasi budaya ini tidak hanya akan meningkatkan pemahaman internasional tentang kekayaan budaya Papua, tetapi juga memperkuat hubungan interpersonal antara masyarakat Papua dan komunitas internasional, yang pada akhirnya mendukung stabilitas nasional.

h. Peningkatan kapabilitas Diplomat Indonesia, melalui salah satu terobosan tentang Penunjukan Diplomat Khusus yang Berasal dari Orang Asli Papua (OAP).

Sebagai bagian dari strategi diplomasi yang inklusif dan representatif, Indonesia harus mempertimbangkan penunjukan diplomat khusus yang berasal dari orang asli Papua untuk menghadapi internasionalisasi isu

Papua. Diplomat yang berasal dari Papua akan memiliki legitimasi dan kredibilitas yang lebih tinggi dalam menyampaikan posisi Indonesia, karena mereka dapat berbicara dari perspektif masyarakat Papua itu sendiri. Kementerian Luar Negeri, bekerja sama dengan Kantor Staf Presiden dan pemerintah daerah Papua, harus mengidentifikasi dan mempersiapkan kandidat diplomat dari Papua. Penunjukan ini akan menunjukkan komitmen Indonesia terhadap inklusivitas dan representasi yang adil, serta memperkuat kepercayaan dan partisipasi masyarakat Papua dalam proses diplomasi nasional.

Rekomendasi rekomendasi ini dirancang untuk mengatasi tantangan yang dihadapi Indonesia dalam internasionalisasi isu Papua dan menjaga stabilitas nasional. Setiap rekomendasi mempertimbangkan aspek yang berbeda dari isu ini, mulai dari diplomasi publik dan soft power, kerjasama internasional, transparansi kebijakan, perlindungan hak asasi manusia, diplomasi digital, dialog dan rekonsiliasi, diplomasi budaya, hingga penunjukan diplomat dari Papua. Implementasi yang terkoordinasi dari rekomendasi-rekomendasi ini diharapkan dapat memperkuat posisi diplomatik Indonesia di dunia internasional, menjaga stabilitas nasional, dan memastikan kesejahteraan masyarakat Papua sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, N. R., & Prabowo, D. (2021, Mei 7). *Sederet Langkah yang Bisa Diambil Pemerintah untuk Akhiri Konflik di Papua*. Diambil kembali dari Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/07/09545191/sederet-langkah-yang-bisa-diambil-pemerintah-untuk-akhiri-konflik-di-papua?page=all>
- Afalia, W., Hamda, I., Adriana, S. A., Alamsyah, A. F., & Wafiroh, N. L. (2023). Determinants of Human Development Index in Papua Province 2012-2021. *Wiga: Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 13(2), 246-256. <https://doi.org/10.30741/wiga.v13i2.1076>
- Afriandi, D. (2015). *The Indonesian coin strategy: failures and alternative approaches in overcoming the Papuan insurgency*. Naval Postgraduate School.
- Agung, I. A. (1973). *Twenty Years Indonesian Foreign Policy: 1945–1965*. Mouton & Co.
- Anderson, B. (2015, January 1). Papua's Insecurity: State Failure in the Indonesian Periphery. *Policy Studies*(73). Diambil kembali dari <https://www.eastwestcenter.org/publications/papuas-insecurity-state-failure-in-the-indonesian-periphery>
- Andrews, S. (2015, April 3). *West Papua: Melanesian Spearhead Group has a tough decision to make*. Diambil kembali dari Lowy Institute: <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/west-papua-melanesian-spearhead-group-has-tough-decision-make>
- Anriani, S., Rahayu, A. Y., & Salomo, R. V. (2021). Indonesian collaborative governance analysis facing Free Papua movement. *Utopía y praxis latinoamericana: revista internacional de filosofía iberoamericana y teoría social*(Ext. 2), 89-108. Diambil kembali dari <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8051635>
- Anwar, L. A. (2021, Oktober 11). *Soal Diplomasi Papua, Indonesia Ingin Jadi Pendekar Serigala*. Diambil kembali dari Kompas.id: <https://www.kompas.id/baca/internasional/2021/10/11/soal-diplomasi-papua-indonesia-ingin-jadi-pendekar-serigala>
- APR Editor. (2023, November 25). *Veteran West Papua independence leader*

- elected ULMWP president*. Diambil kembali dari Asia Pacific Report:
<https://asiapacificreport.nz/2023/11/25/veteran-west-papua-independence-leader-elected-ulmwp-president/>
- APR Editor. (2024, February 10). *Indonesian presidential hopefuls explain their West Papua policies*. Diambil kembali dari Asia Pacific Report:
<https://asiapacificreport.nz/2024/02/10/indonesian-presidential-hopefuls-explain-their-west-papua-policies/>
- Bakhshi, U. (2021, November 30). *Indonesia and the Papua Issue: Resolution Increasingly Unlikely*. Diambil kembali dari The Diplomat:
<https://thediplomat.com/2021/11/indonesia-and-the-papua-issue-resolution-increasingly-unlikely/>
- Bayuseno, A. B., & Windiani, R. (2020). Memahami Konsistensi Sikap Politik Negara-Negara Melanesia mengenai Isu Papua di Forum Internasional. *Jurnal Politica*, 11(2), 203-222. <https://doi.org/10.22212/jp.v11i2.1668>
- Berlianto, H. B. (2023). Upaya Hukum Penghapusan Diskriminasi dan Rasisme terhadap Masyarakat Asli Papua. *COMSERVA: Indonesian Journal of Community Services and Development*, 2(10), 2209-2222. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i10.631>
- Blades, J. (2020, May 1). *West Papua: The Issue That Won't Go Away for Melanesia*. Diambil kembali dari Lowy Institute:
<https://www.lowyinstitute.org/publications/west-papua-issue-won-t-go-away-melanesia>
- Bonasir, R. (2019, November 30). *Upaya internasionalisasi Papua: 'Negara-negara anggota PBB lebih banyak dengar suara pemerintah Indonesia'*. Diambil kembali dari BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50498660>
- Budiatri, A. (2020, 6). *Revising the Special Autonomy Law for Papua: Challenges and Possibilities*. Diambil kembali dari <https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2020-56-revising-the-special-autonomy-law-for-papua-challenges-and-possibilities-by-aisah-putri-budiatri/>
- Chairil, T., & Sadi, W. A. (2020, Oktober 5). Konflik Papua: Pemerintah Perlu Mengubah Pendekatan Keamanan dengan Pendekatan Humanis. *CBDS Commentaries*. Diambil kembali dari <https://ir.binus.ac.id/2020/10/05/konflik->

papua-pemerintah-perlu-mengubah-pendekatan-keamanan-dengan-pendekatan-humanis/

- Chauvel, R. (2005, Januari 1). Constructing Papuan Nationalism: History, Ethnicity, and Adaptation. *Policy Studies*(14). Diambil kembali dari <https://www.eastwestcenter.org/publications/constructing-papuan-nationalism-history-ethnicity-and-adaptation>
- Crocombe, R. G. (2007). *Asia in the Pacific Islands: Replacing the West*. IPS Publications.
- Cull, N. J. (2008). Public Diplomacy: Taxonomies and Histories. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 616, 31-54. Diambil kembali dari <https://www.jstor.org/stable/25097993>
- Damayanti, D. (2021). Implementation Policy of Cultural Diplomacy of West Papua Province and Defense Diplomation Relationship in the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia. *Proceedings of The 3rd International Conference on Research in Education*. Rome: Diamond Scientific Publishing. <https://doi.org/10.33422/3rd.icreconf.2021.03.163>
- Darmawan, A. R. (2022, September 13). *Why Indonesia's engagement with Pacific countries matters*. Diambil kembali dari Lowy Institute: <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/why-indonesia-s-engagement-pacific-countries-matters>
- Djelantik, S. (2024). Indonesia's Diplomacy towards the Free Papua Organization (OPM). *European Modern Studies Journal*, 8(2), 1-12. Diambil kembali dari <https://journal-ems.com/index.php/emsj/article/view/1037>
- Donnelly, J. (2013). *Universal Human Rights in Theory and Practice* (3rd ed.). Cornell University Press. Diambil kembali dari <https://www.jstor.org/stable/10.7591/j.ctt1xx5q2>
- Faizasyah, T. (2023, April 3). Penanganan Isu HAM di Papua dan Tantangan Internasionalisasi. Jakarta: Kementerian Luar Negeri.
- Febriyanti, & Roring, F. P. (2022). Eksistensi Diplomat Indonesia di Forum Majelis Umum PBB 2016-2021 dalam Menghadapi Tuntutan Papua Merdeka oleh Delegasi Vanuatu. *Jurnal Communitarian*, 4(1), 580-590. <https://doi.org/10.56985/jc.v4i1.227>
- Firdausi, F. A. (2019, Agustus 19). *Sejarah Pepera 1969: Upaya Lancung RI*

- Merebut Papua?* Diambil kembali dari Tirto: <https://tirto.id/sejarah-pepera-1969-upaya-lancang-ri-merebut-papua-egAj>
- FISIP UI. (2018, September 24). *Meninjau Pembangunan Papua melalui perspektif sosial budaya*. Diambil kembali dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UI: <https://fisip.ui.ac.id/meninjau-pembangunan-papua-melalui-perspektif-sosial-budaya/>
- Fox, L. (2015, Juni 25). *West Papuans given Melanesia bloc access, but not full membership*. Diambil kembali dari ABC News: <https://www.abc.net.au/news/2015-06-27/west-papuans-given-melanesia-bloc-access/6577722>
- Friawan, D. (2023, April 19). *Helping Papua escape from its natural resource curse*. Diambil kembali dari The Jakarta Post: <https://www.thejakartapost.com/paper/2023/04/19/helping-papua-escape-from-its-natural-resource-curse.html>
- Galtung, J. (1996). *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*. SAGE Publications.
- Glaister, K. W., & Falshaw, J. R. (1999). Strategic Planning: Still Going Strong? *Long Range Planning*, 32(1), 107-116. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0024-6301\(98\)00131-9](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0024-6301(98)00131-9)
- Greenpeace Indonesia. (2022). *Otonomi Khusus dan Kutukan Sumber Daya Alam Papua*. INDEF dan Greenpeace Indonesia.
- Hadi, A. (2021). The Dynamics of Ethnonationalism and Conflict Resolution in Papua. *MUHARRIK: Jurnal Dakwah dan Sosial*, 4(2), 267-282. <https://doi.org/10.37680/muharrrik.v4i02.1054>
- Hadi, R. P. (2016, September 27). *Tantangan Keamanan Nasional Indonesia dalam Menyikapi Transformasi Separatisme dan Cyberprotest di Papua*. Diambil kembali dari Universitas Airlangga: <https://repository.unair.ac.id/68175/3/jurnal%20rany.pdf>
- Hafidz, I. A. (2021). *Strategi Amnesty International dalam Advokasi Kasus Pelanggaran HAM di Papua*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Diambil kembali dari <https://etd.umy.ac.id/id/eprint/4650>
- Hamid, U. (2023, April 3). *Strategi Politik Menghadapi Internasionalisasi Papua*. Jakarta: Amnesty International Indonesia.

- Haq, M. u. (1995). *Reflections on Human Development*. Oxford University Press.
- Hasan, A. M. (2017, Agustus 2023). *Dukungan Internasional untuk Papua Merdeka*. Diambil kembali dari Tirto: <https://tirto.id/dukungan-internasional-untuk-papua-merdeka-cu9o>
- Hasibuan, S. (2022, 11). Special Autonomy in Papua and West Papua: An Overview of Key Issues. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 2(2), 145-158. <https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.2.2.145-158>
- Hematang, F. A., Pedrason, R., & Wahyudi, B. (2019). Diplomasi Pertahanan Indonesia di Negara Kawasan Pasifik Selatan terkait Internasionalisasi Separatisme Papua guna Menjaga Kedaulatan Indonesia. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 5(2), 87-106.
- Hergianasari, P., As'ad, M. U., & Nau, N. U. (2022). People-centered development: The case of development projects in Papua Indonesia during the Special Autonomy System. *Problems of Management in the 21st Century*, 17(1), 36-47. <https://doi.org/10.33225/pmc/22.17.36>
- Hill, T., & Westbrook, R. (1997). SWOT analysis: It's time for a product recall. *Long Range Planning*, 30(1), 46-52. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0024-6301\(96\)00095-7](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0024-6301(96)00095-7)
- HRM. (2023, January 13). *Human Rights Council calls for access to West Papua during UPR*. Diambil kembali dari Human Rights Monitor: <https://humanrightsmonitor.org/news/human-rights-council-calls-for-access-to-west-papua-during-upr-2/>
- HRM. (2023, Februari 8). *Laporan Tahunan Tanah Papua 2022 – Hak Asasi Manusia dan Situasi Konflik*. Diambil kembali dari Human Rights Monitor: <https://humanrightsmonitor.org/id/laporan/tanah-papua-2022/>
- HRM. (2024, April 10). *Annual Report 2023: Human Rights and Conflict in West Papua*. Diambil kembali dari Human Rights Monitor: <https://humanrightsmonitor.org/reports/hrm-annual-report-human-rights-and-conflict-in-west-papua-2023/>
- HRW. (t.thn.). *World Report 2023: Indonesia*. Diambil kembali dari Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters/indonesia>
- Humairoh, S. (2018). *Analisis Penggunaan Diplomasi Multi-Jalur Indonesia Untuk Mendukung Penyelesaian Konflik Papua Barat Tahun 2009-2018*. Universitas

Brawijaya.

- Hutabarat, J. (2022, Juni 20). *Ancaman Eksploitasi Sumber Daya di Balik Pemekaran Papua*. Diambil kembali dari Tirto: <https://tirto.id/ancaman-eksploitasi-sumber-daya-di-balik-pemekaran-papua-gs7K>
- ICG. (2012, Agustus 9). Indonesia: Dinamika Kekerasan di Papua. *Asia Report*(232). Diambil kembali dari <https://www.crisisgroup.org/id/asia/south-east-asia/indonesia/indonesia-dynamics-violence-papua>
- Indonesia, A. (2022, 4). Education and Social Mobility for Orang Asli Papua. *PCD Journal*, 9(2), 121-147. <https://doi.org/10.22146/pcd.v9i2.3313>
- Kahin, G. M. (1952). *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Cornell University Press.
- Katingka, N. (2023, November 11). *Terobosan Papua Pegunungan Mengatasi Ketertinggalan Pembangunan Manusia*. Diambil kembali dari Kompas.id: <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/11/11/terobosan-papua-pegunungan-mengatasi-ketertinggalan-pembangunan-manusia>
- Kelen, T. (2024, Juni 4). *Konflik bersenjata di Tanah Papua terus berlanjut dan kian menghebat*. Diambil kembali dari Media Jubi Papua: <https://jubi.id/polhukam/2024/konflik-bersenjata-di-tanah-papua-terus-berlanjut-dan-kian-menghebat/>
- Kementerian Luar Negeri. (2024, Januari 8). *Diplomasi Indonesia Terus Perkuat Kerja Sama di Kawasan Pasifik*. Diambil kembali dari <https://kemlu.go.id/portal/id/read/5663/berita/diplomasi-indonesia-terus-perkuat-kerja-sama-di-kawasan-pasifik>
- Keohane, R., & Nye, J. S. (1977). *Power and Interdependence*. Boston: Little, Brown, and Co.
- Kissinger, H. (2012). *Diplomacy*. Simon & Schuster UK.
- Korwa, J. R. (2021, Oktober 8). *Internasionalisasi Isu Papua dan Reposisi Implementasi Otonomi Khusus Papua*. Diambil kembali dari Imparsial: <https://imparsial.org/internasionalisasi-isu-papua-dan-reposisi-implementasi-otonomi-khusus-papua/>
- Krisdamarjati, Y. (2023, 11 22). *Hari Otonomi Khusus Papua, Jalan Panjang Mencapai Sejahtera*. Diambil kembali dari Kompas.id: <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/11/22/hari-otonomi-khusus-papua->

jalan-panjang-mencapai-sejahtera

- Lantang, F., & Tambunan, E. M. (2020). The Internationalization of “West Papua” Issue and Its Impact on Indonesia’s Policy to the South Pacific Region. *Journal of ASEAN Studies*, 8(1), 41-59. <https://doi.org/10.21512/jas.v8i1.6447>
- Lederach, J. P. (2005). *The Moral Imagination: The Art and Soul of Building Peace*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/0195174542.001.0001>
- Litaay, T. L. (2023, April 3). Internasionalisasi Isu Papua. Jakarta: Kantor Staf Presiden.
- Liwe, A. J. (2019, September 13). *Why do the US, China and international community remain silent on Papua?* Diambil kembali dari The Conversation: <https://theconversation.com/why-do-the-us-china-and-international-community-remain-silent-on-papua-123291>
- Lundström, K. (2021, July 15). *The Road to Freedom Lies Ahead*. Diambil kembali dari New Internationalist: <https://newint.org/features/2021/07/15/road-freedom-lies-ahead-west-papua>
- Marr, C. (2011, November). *Twenty-two years of top-down resource exploitation in Papua*. Diambil kembali dari Down to Earth: <https://www.downtoearth-indonesia.org/story/twenty-two-years-top-down-resource-exploitation-papua>
- Martianto, R. W., & Isnaini, M. (2021). Kontra Propaganda Deklarasi Negara Papua Barat dalam Konstruksi Pemberitaan Tempo.co. *Jurnal Kajian Jurnalisme*, 5(1), 48-63. <https://doi.org/10.24198/jkj.v5i1.31885>
- Mery, L., & Dewi, M. N. (2019). Peran Diplomasi Politik Internasional di Papua. *Petium*, 7(1), 39-58. <https://doi.org/10.36090/jh.v7i1%20April.458>
- Mesak, M., Yani, Y. M., & Dermawan, W. (2020). Chinese involvement in Vanuatu and Salomon Island foreign policy against the Papua Issue. *Sociae Polites*, 21(1), 95-110. <https://doi.org/10.33541/sp.v20i2.1931>
- Miskimmon, A., O'Loughlin, B., & Roselle, L. (2013). *Strategic Narratives: Communication Power and the New World Order*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315871264>
- Moningkey, S. M., Hidayat, E. R., Wahyudi, B., & Widodo, P. (2023). Papua Conflict Resolution in Contemporary Counter-Insurgency Perspective using Mystic Diamond. *International Journal of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, 3(2), 891-896. <https://doi.org/10.55227/ijhess.v3i2.711>

- Morgenthau, H. (1948). *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. Alfred A. Knopf.
- Mulyana, Y. G. (2023, Maret 14). Jaring Gerakan Politik Separatis Papua di Luar Negeri. Jakarta: Kementerian Luar Negeri.
- Musgrave, T. D. (2015). An analysis of the 1969 Act of Free Choice in West Papua. Dalam C. Chinkin, & F. Baetens, *Sovereignty, Statehood and State Responsibility: Essays in Honour of James Crawford* (hal. 209-228). Cambridge University Press.
- Nye, J. (2004). *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. PublicAffairs.
- Perkasa, V. D. (2023, Februari 27). *Darurat Perlindungan Warga Sipil di Papua*. Diambil kembali dari Kompas.id: <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/02/26/darurat-perlindungan-warga-sipil-di-papua>
- Pugu, M. R., & Buiney, M. E. (2022). Konflik Papua dalam Paradigma Track One dan Track Two Diplomasi. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(11). Diambil kembali dari <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/9936>
- Rahim, A. S., & Timur, F. G. (2021). Status United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dalam Hukum Internasional terhadap Kedaulatan Indonesia. *Interdependence Journal of International Studies*, 2(1), 11-30. <https://doi.org/10.54144/ijis.v2i1.43>
- Rahmi, N. (2021). *Analisis Alasan Melanesian Spearhead Group Menolak Permohonan United Liberation Movement for West Papua untuk Menjadi Anggota Penuh*. Universitas Andalas.
- Ramdhan, M. A. (2021). Analisis Dimensi Internasional Konflik Papua dalam Model Counterinsurgency (COIN). *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 17(1), 139-152. <https://doi.org/10.26593/jihi.v17i1.3532.139-152>
- Rosyidin, M., Dir, A. A., & Wahyudi, F. E. (2022). The Papua Conflict: The Different Perspectives of The Indonesian Government and International Communities—Review from The English School Theory. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 24(2), 277-302. <https://doi.org/10.7454/global.v24i2.1253>
- Russett, B. (1993). *Grasping the Democratic Peace: Principles for a Post-Cold War World*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctt7rqf6>

- Sabir, A. (2018). Diplomasi Publik Indonesia terhadap Vanuatu dalam Upaya Membendung Gerakan Separatisme Papua. *Jurnal Hubungan Internasional*, 11(1), 91-108. <https://doi.org/10.20473/jhi.v11i1.8679>
- Sagala, D. M., & Baskoro, R. M. (2023). The Utilization of Digital Diplomacy of Non-State Actors: Case Study of The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). *Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan*, 15(2), 23-45. Diambil kembali dari <http://www.jurnal.upnyk.ac.id/index.php/jsdk/article/view/8549>
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. New York: Anchor Books.
- Sianipar, B., & Somantri, G. (2022). Development and Democratization in Papua. *Journal of Positive School Psychology*, 6(8), 225-231. Diambil kembali dari <https://journalppw.com/index.php/jpsp/article/view/9711>
- Sitompul, M. (2023, Agustus 15). *Mula Bendera Indonesia Berkibar di Papua*. Diambil kembali dari Historia: <https://historia.id/politik/articles/mula-bendera-indonesia-berkibar-di-papua-P0zxK/>
- Strangio, S. (2021, Mei 14). *In Papua Fighting, Indonesian Forces Claim Rebel Commander Killed*. Diambil kembali dari The Diplomat: <https://thediplomat.com/2021/05/in-papua-fighting-indonesian-forces-claim-rebel-commander-killed/>
- Sucahyo, N. (2022, Juli 14). *Pepera, Sejarah Papua yang Tidak Pernah Selesai*. Diambil kembali dari VOA Indonesia: <https://www.voaindonesia.com/a/pepera-sejarah-papua-yang-tidak-pernah-selesai-/6658344.html>
- Sumito, V. S. (2024, Juni 28). *Tata Kelola Penyelenggaraan Otonomi Khusus dan Percepatan Pembangunan Papua*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Suyatra, I. P. (2024, Maret 8). *Dukungan Internasional terhadap Papua sebagai Bagian Integral dari NKRI*. Diambil kembali dari Bali Express: <https://baliexpress.jawapos.com/kolom/674420716/dukungan-internasional-terhadap-papua-sebagai-bagian-integral-dari-nkri>
- Taliawo, R. G., Subekti, V. S., & Pasha, J. A. (2023). Resisting without Violence: KNPB and Transnational Advocacy Network towards West Papua Referendum. *International Journal of Asia Pacific Studies*, 19(2), 109-129. <https://doi.org/10.21315/ijaps2023.19.2.5>
- Tarling, N. (2008). *Britain and the West New Guinea Dispute, 1949-1962*. Edwin

Mellen Press.

- Thalang, C. n., & Siraprapasiri, P. (2016). ASEAN's (non-)role in managing: Obstacles to institutionalization. Dalam A. D. Ba, C.-C. Kuik, & S. Sudo, *Institutionalizing East Asia: Mapping and Reconfiguring Regional Cooperation* (hal. 131-155). Routledge.
- Theodora, A. (2023, November 13). *Pertumbuhan Ekonomi Tinggi di Indonesia Timur Belum "Menetes" ke Bawah*. Diambil kembali dari Kompas.id: <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/11/12/pertumbuhan-ekonomi-tinggi-di-indonesia-timur-belum-menetes>
- Tjoli, I., Karuniasa, M., Rehiara, A. B., Jance, S., & Lestari, I. (2021). Development of the sustainable human development index model in West Papua. *The 1st Journal of Environmental Science and Sustainable Development Symposium*. 716, hal. 012106. Jakarta: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/716/1/012106>
- Tobing, G. J. (2024). *Strategi diplomasi Indonesia dalam menurunkan internasionalisasi kasus-kasus Papua*. Universitas Pelita Harapan.
- Wanggae, H. Y. (2016, Oktober 12). *Clumsy diplomacy: Indonesia, Papua and the Pacific*. Diambil kembali dari The University of Melbourne: <https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/clumsy-diplomacy-indonesia-papua-and-the-pacific/>
- Wardah, F. (2022, Desember 4). *Forum Indonesia-Pasifik Wujud Komitmen Indonesia Tingkatkan Keterlibatan di Asia Pasifik*. Diambil kembali dari VOA Indonesia: <https://www.voaindonesia.com/a/forum-indonesia-pasifik-wujud-komitmen-indonesia-tingkatkan-keterlibatan-di-asia-pasifik-/6861470.html>
- Wardhani, B. (2020, Desember 10). *Apa dampak diplomasi bantuan Indonesia ke kawasan Pasifik?* Diambil kembali dari The Conversation: <https://theconversation.com/apa-dampak-diplomasi-bantuan-indonesia-ke-kawasan-pasifik-147283>
- Wayar, A., & Blades, J. (2022, Juni 21). *Indonesia's New Plans for Papua Can't Hide Its Decades of Failures*. Diambil kembali dari The Diplomat: <https://thediplomat.com/2022/06/indonesias-new-plans-for-papua-cant-hide-its-decades-of-failures/>
- Weiss, C. H. (1995). *Nothing as practical as good theory: Exploring theory-based*

evaluation for comprehensive community initiatives for children and families. Dalam J. Connell, A. Kubisch, L. Schorr, & C. Weiss, *New approaches to evaluating community initiatives: Concepts, methods, and contexts* (hal. 65-92). Aspen Institute.

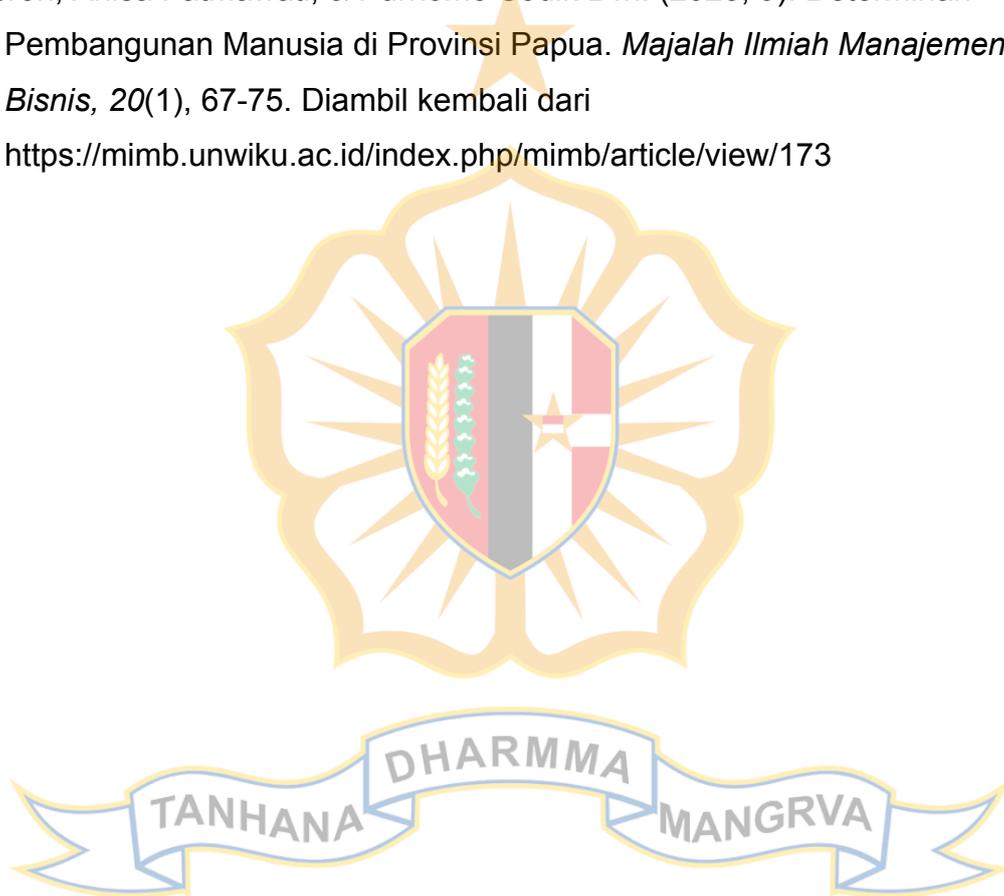
Weiss, T. G. (2010). *Global Governance and the UN: An Unfinished Journey*. Indiana University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctt16gznr>

Wikipedia contributors. (2024, June 4). *United Liberation Movement for West Papua*.

Diambil kembali dari Wikipedia, The Free Encyclopedia: <https://w.wiki/AZuQ>

Zumaeroh, Anisa Fatmawati, & Purnomo Sodik Dwi. (2023, 9). Determinan Pembangunan Manusia di Provinsi Papua. *Majalah Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 20(1), 67-75. Diambil kembali dari

<https://mimb.unwiku.ac.id/index.php/mimb/article/view/173>



ALUR PIKIR
OPTIMALISASI DIPLOMASI INDONESIA DALAM INTERNASIONALISASI ISU PAPUA
GUNA MENJAGA STABILITAS NASIONAL



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Susanto Dwi Asmara, S.H., lahir di Kudus pada tanggal 5 Januari 1971. Anak ke-2 dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak Soeparno (Alm) dan Ibu Mulyati (Alm). Menyelesaikan pendidikan di SD tahun 1984, SMP tahun 1987, SMA tahun 1990, program Sarjana (S1) tahun 1997, dan pada tahun 2024 menempuh Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVI di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.



Penulis saat ini menjabat sebagai Tenaga Ahli Pengkaji Muda bidang Diplomasi LEMHANAS RI sejak tahun 2024. Sebagai Perwira TNI aktif, Susanto Dwi Asmara mengawali karier tahun 1993. Jabatan-jabatan yang pernah di emban diantaranya Danyonkav -8/DIV 2 KOSTRAD, Dandim 0801/PCT DAM V/BRW, Kasilog Rem 181/ DAM LVIII KSR, Aster Kasdam/ DAM LVIII KSR, Kasubdit Bin Siapsat dan Alutsista Sdirsen Pussenkav TNI AD, dan Taji Muda Bid. Diplomasi Lemhanas RI.

Berbagai pendidikan TNI yang pernah diikuti yaitu Akademi Militer pada tahun 1993, Seskoad pada tahun 2009, di samping beberapa pendidikan spesialisasi di lingkungan TNI. Pengalaman tugas di dalam negeri adalah Operasi Papua tahun 2016 sd 2019.

Menikah dengan Eni tanggal 24 Oktober 1997 di Palembang dan dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu : Muhammad Galuh Eka Prakoso, Niken Ayu Prastiwi dan Aulia Putri Dewi.



